

**PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI**

**MUNDURNYA MOHAMMAD HATTA  
SEBAGAI WAKIL PRESIDEN TAHUN 1956**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh:

**AMBROSIUS OKY SUMANTRI**

**NIM: 041314010**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA**

**2009**

**MUNDURNYA MOHAMMAD HATTA  
SEBAGAI WAKIL PRESIDEN TAHUN 1956**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh:

**AMBROSIUS OKY SUMANTRI**

**NIM: 041314010**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH  
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SANATA DHARMA  
YOGYAKARTA**

**2009**

**SKRIPSI**

**MUNDURNYA MOHAMMAD HATTA  
SEBAGAI WAKIL PRESIDEN TAHUN 1956**

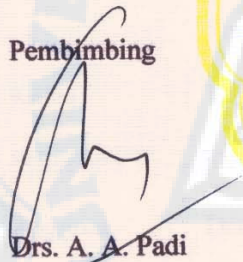
Oleh:

**AMBROSIUS OKY SUMANTRI**

**NIM: 041314010**

Telah disetujui oleh:

Pembimbing

  
Drs. A. A. Padi

Tanggal 20 April 2009

**SKRIPSI**

**MUNDURNYA MOHAMMAD HATTA  
SEBAGAI WAKIL PRESIDEN TAHUN 1956**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

**Ambrosius Oky Sumantri**

NIM: 041314010

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji  
pada tanggal 8 Mei 2009  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Susunan Panitia Penguji**

Nama Lengkap

Tanda Tangan

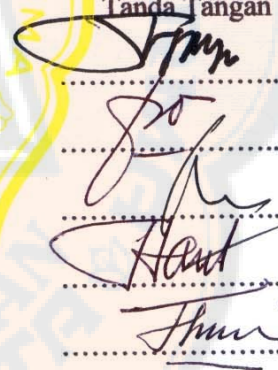
Ketua : Yohanes Harsoyo, S.Pd., M.Si.

Sekretaris : Drs. B. Musidi, M.Pd.

Anggota : Drs. A.A. Padi

Anggota : Drs. A.K. Wiharyanto, M.M.

Anggota : Dra. Th. Sumini, M.Pd.



Yogyakarta, 8 Mei 2009

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma

Dekan,



*Tarsisius Sarkim*  
Drs. Tarsisius Sarkim, M.Ed., Ph.D.

MOTTO



“Homo Homini Socius”

Jadilah Sahabat Bagi Sesama

( Driyarkara )

“Hanya satu negeri yang menjadi negeriku,  
ia tumbuh dari perbuatan,  
dan perbuatan adalah usahaku”

( Renne de Clerg )

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## PERSEMBAHAN

Atas dasar kasih sayang, skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ♥ Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupanku, terimakasih dan syukur pada-Mu atas segala penyertaan dan kesehatan yang telah Kau berikan
- ♥ Ibunda tersayang, sumber kekuatanku, yang telah mencurahkan seluruh kasih sayangnya kepadaku
- ♥ Almarhum Ayahku terkasih
- ♥ Adikku tersayang Margareta Putri Tirani yang senantiasa mendoakan dan mendukungku
- ♥ Kekasihku, Astri, yang senantiasa menemaniku, terimakasih atas kasih sayangmu, atas segala perhatian, atas doa dan dukungan, serta atas kesetiaanmu



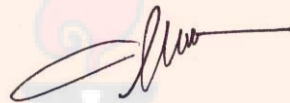
# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 8 Mei 2009

Penulis,



Ambrosius Oky Sumantri

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : **AMBROSIUS OKY SUMANTRI**

Nomor Mahasiswa : **041314010**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul :

### **MUNDURNYA MOHAMMAD HATTA SEBAGAI WAKIL PRESIDEN TAHUN 1956**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 01 Juni 2009

Yang menyatakan



**(Ambrosius Oky Sumantri)**



**ABSTRAK**

**AMBROSIUS OKY SUMANTRI**

**041314010**

**MUNDURNYA MOHAMMAD HATTA  
SEBAGAI WAKIL PREDISEN TAHUN 1956**

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga permasalahan, yaitu : 1) Faktor pendorong Mohammad Hatta mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden, 2) Proses pengunduran diri Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden, 3) Pengaruh pengunduran diri Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Langkah-langkahnya meliputi heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan psikologi dan politik. Model penulisan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pengunduran diri Hatta terutama disebabkan karena : pertama, perbedaan pandangan dengan Soekarno yang semakin meruncing dan tidak dapat ditemukan kesatuan pikiran dan pendapat. Kedua, posisi Hatta sebagai Wakil Presiden konstitusional, yang tidak lagi mempunyai fungsi serta peran yang menentukan dalam pemerintahan, sehingga Hatta tidak mampu berbuat apa-apa atas segala persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia. Ketiga, Hatta kecewa terhadap jalannya demokrasi dan pemerintahan di Indonesia oleh elit politik, karena Hatta menilai bahwa perjuangan para elit politik tidak lagi memihak pada kepentingan rakyat, tetapi untuk kepentingan pribadi, golongan, maupun partai sehingga banyak terjadi penyimpangan, perebutan kedudukan atau kekuasaan, serta korupsi. 2) Proses pengunduran diri Hatta melalui proses yang tidak mudah dan membutuhkan waktu yang tepat, serta membutuhkan perhitungan dan alasan yang tepat. Hatta mengajukan surat maksud pengunduran dirinya setelah DPR dan Konstituante hasil Pemilihan Umum terbentuk. Kesempatan inilah yang digunakan Hatta untuk dijadikan alasan resmi pengunduran dirinya. Oleh sebab itu, baru tanggal 1 Desember 1956 keinginan Hatta ini dapat terlaksana. 3) Pengunduran diri Hatta ternyata mempunyai pengaruh bagi pemerintah, diantaranya ialah hilangnya konsep Dwitunggal (Soekarno – Hatta), Soekarno menjadi penguasa tunggal, dan munculnya pemberontakan-pemberontakan di daerah, terutama di Sumatera dan Sulawesi.

**ABSTRACT**

**AMBROSIUS OKY SUMANTRI**

**041314010**

**MOHAMMAAD HATTA'S RESIGNATION  
AS THE VICE PRESIDENT IN 1956**

The purpose of the research is to analyze three aspects of the resignation of Mohammad Hatta as The Vice President: 1) the influential factors that pushed him to resign as Vice President, 2) the process of Mohammad Hatta's resignation as The Vice President, and 3) the impact of Mohammad Hatta's resignation as The Vice President.

The method which is used in the research is a historical method while the writing model is a descriptive analytical model. The steps in the research include heuristic, verification, interpretation, and historiography with psychological and political approaches.

The results show that: 1) Mohammad Hatta's resignation was mainly caused by: first, distinct insight with Soekarno's increased highly and unsettled. Second, his position as a constitutional Vice President had no more definitive function and didn't have significant role in the governance. In this case he could not do anything to face many problems faced by Indonesia. Third, Hatta was dissatisfied with the process of democratization and governance run by the political elite, whom he thought did not act for the benefit of the Indonesian people but only for their own benefit, for their group or party's benefit which in turn ended in deviation, vested interests, and corruption. 2) The process of Mohammad Hatta's resignation was not easy. It needed the right time, and good calculation and reasonable reason. This resignation happened on December 1, 1956. 3) Mohammad Hatta's resignation had great influence on the government; there was no good couple anymore between Soekarno and Hatta. Soekarno became 'the single actor in a one man show', and in Sumatra and Sulawesi, the rebellion was increasing.

## KATA PENGANTAR

Syukur kepada Tuhan, karena rahmat dan tuntunannya memberikan pencerahan dan semangat kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Mundurinya Mohammad Hatta Sebagai Wakil Presiden Tahun 1956”** ini dengan maksimal. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan, dukungan, petunjuk, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sanata Dharma.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma, yang telah memberikan kepercayaannya kepada penulis untuk dapat menulis topik pada skripsi ini.
4. Drs. A.A. Padi, selaku dosen pembimbing serta dosen wali akademik penulis, yang telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan masukan dengan penuh kesabaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap Dosen Universitas Sanata Dharma, khususnya Dosen Pendidikan Sejarah yang telah banyak memberi bekal pengetahuan dan membimbing

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

penulis selama kuliah. Serta Staf Sekretariat Prodi Pendidikan Sejarah yang telah banyak membantu penulis dalam segala urusan administrasi.

6. Segenap Staf Perpustakaan Sanata Dharma dan Perpustakaan Hatta (Hatta Corner) yang telah memberikan pelayanan terbaiknya sehingga penulis mampu memperoleh referensi-referensi yang dibutuhkan.
7. Yang terkasih, orang tua penulis, terkhusus Ibu, yang menjadi sumber semangat penulis, dan telah banyak memberikan doa, dukungan serta atas segala keringat dan air mata yang telah banyak dicurahkan bagi penulis, serta adik terkasih.
8. Yang terkasih, Astri, yang selalu mendampingi dan memberikan doa serta dukungannya kepada penulis.
9. Teman-teman Mahasiswa Pendidikan Sejarah Angkatan 2004, terutama Ponco, Joko, Sisil, Maria, Sigit, Tuti, Hendri, Beny, dan Vinco yang selalu berbagi dan memberikan masukan-masukan kepada penulis, dan atas kebersamaannya.
10. Kakak tingkat, terutama Mas Sinjo, Mas Bayu, Mas Leo, Mas Sigit, yang telah banyak memberikan masukan-masukan serta saran-saran bagi penulis, serta adik tingkat, terutama Dwi (Cui) dan Suster Vina yang telah memberikan dukungannya bagi penulis, dan atas kebersamaannya.
11. Semua pihak yang telah mendukung penulis, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga tulisan yang telah terselesaikan ini bermanfaat bagi yang membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, baik itu isi

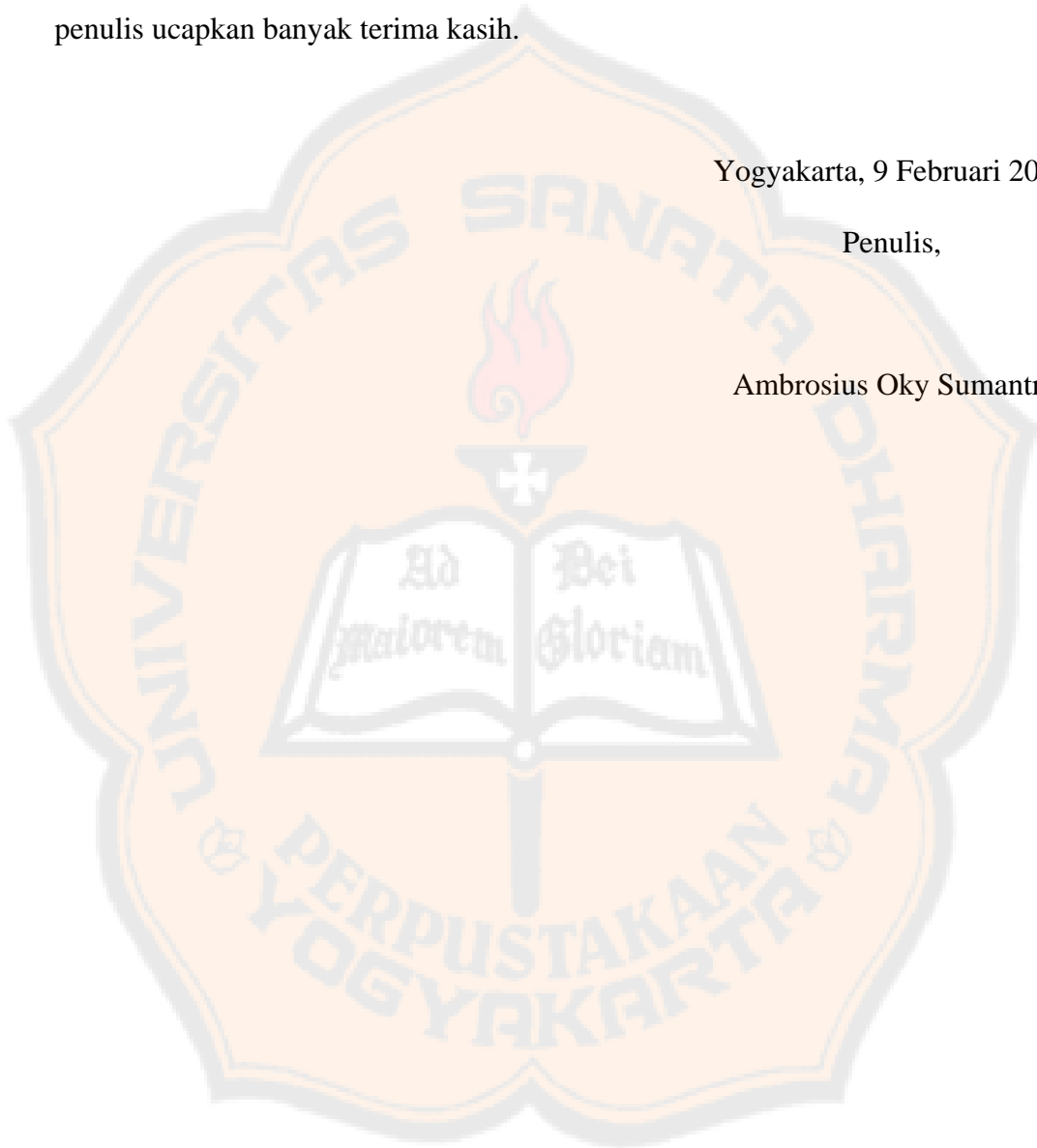
## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

maupun dalam penggunaan kosa kata. Banyak kesalahan dan ketidaktepatan kata dalam penulisan ini. Untuk itu, saran atau masukan yang bersifat membangun akan dapat lebih menyempurnakan tulisan ini. Atas dukungan dan perhatiannya penulis ucapkan banyak terima kasih.

Yogyakarta, 9 Februari 2009

Penulis,

Ambrosius Oky Sumantri



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .....	vi
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRACT</i> .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Kajian Pustaka .....	12
E. Landasan Teori .....	16
F. Metode dan Pendekatan Penelitian .....	22
1. Metode Penelitian .....	22
2. Pendekatan Penelitian .....	27
G. Metode Penulisan .....	29
H. Sistematika Penulisan .....	29
BAB II. FAKTOR PENDORONG PENGUNDURAN DIRI MOHAMMAD HATTA SEBAGAI WAKIL PRESIDEN TAHUN 1956 .....	31
A. Perbedaan Pandangan Dengan Soekarno .....	32

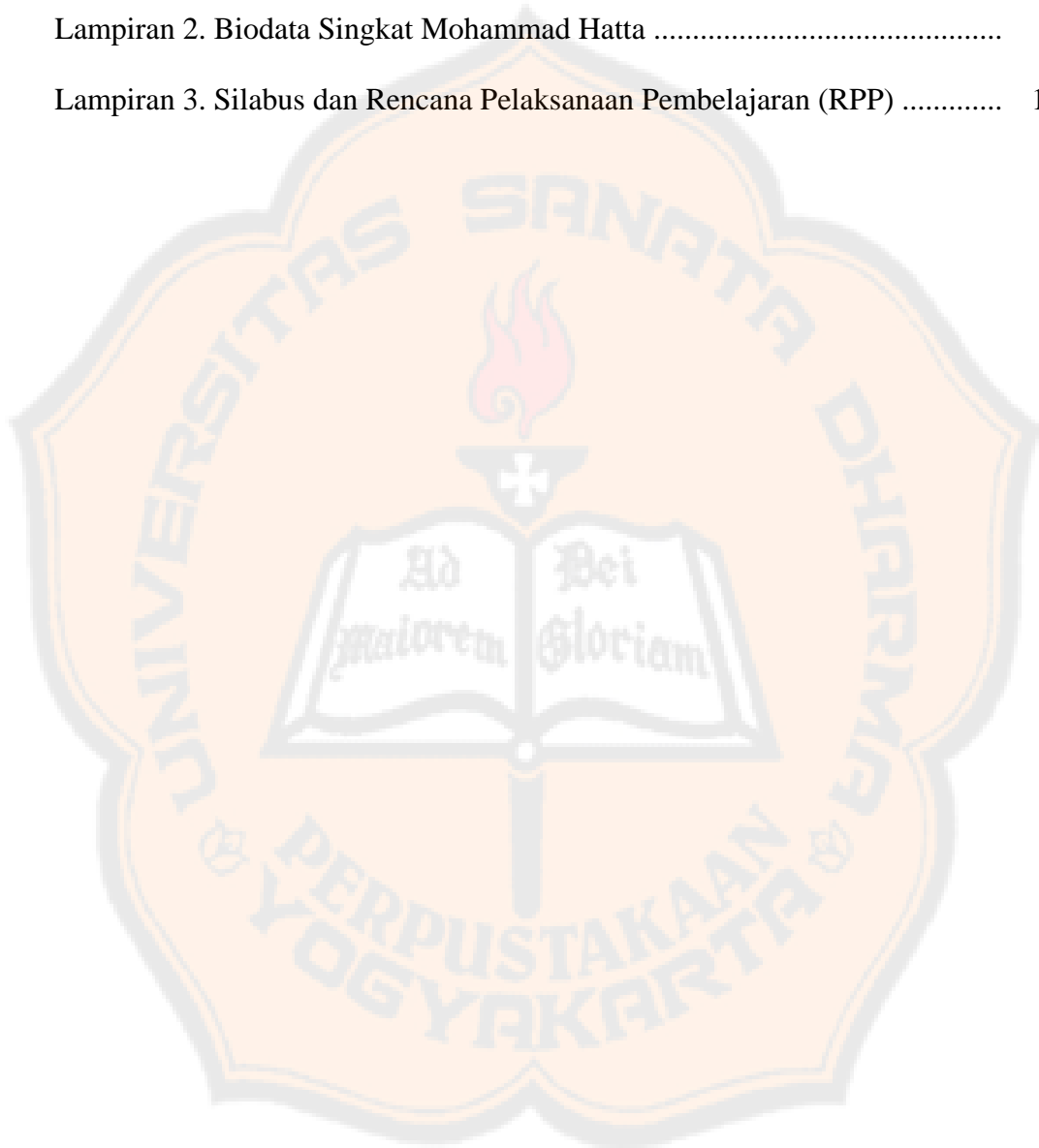
# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

1. Dalam Memandang Soal Partai Politik .....	34
2. Partai Komunis Indonesia (PKI) Dimasukkan Kedalam Pemerintahan/Kabinet .....	37
3. Dalam Memandang Soal Demokrasi .....	40
4. Pandangan Hatta Terhadap Sikap Kepemimpinan Soekarno .....	52
B. Jabatan Wakil Presiden Konstitusional Yang Tidak Memiliki Peran dan Fungsi Menentukan .....	55
C. Kecewa Terhadap Jalannya Pemerintahan .....	58
<b>BAB III. PROSES PENGUNDURAN DIRI MOHAMMAD HATTA SEBAGAI WAKIL PRESIDEN TAHUN 1956 .....</b>	<b>66</b>
A. Maksud dan Isu Pengunduran Diri Hatta .....	66
B. Hatta Tetap Memilih Mundur .....	69
C. Mengalah dan Memberi Kesempatan .....	71
D. Hatta Resmi Berhenti dari Jabatan Wakil Presiden .....	74
<b>BAB IV. PENGARUH PENGUNDURAN DIRI MOHAMMAD HATTA SEBAGAI WAKIL PRESIDEN BAGI PEMERINTAH INDONESIA .....</b>	<b>79</b>
A. Pemberontakan-pemberontakan di Daerah .....	79
B. Soekarno Menjadi Pemimpin Tunggal .....	89
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>98</b>



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Gambar Mohammad Hatta .....	98
Lampiran 2. Biodata Singkat Mohammad Hatta .....	99
Lampiran 3. Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) .....	103



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mohammad Hatta dengan sejarah Indonesia terdapat hubungan timbal balik yang unik. Hatta dipengaruhi oleh sejarah Indonesia, dan sebaliknya Hatta juga ikut menentukan arah perkembangan sejarah Indonesia. Sedangkan kaitan antara Hatta dengan perjuangan Indonesia sangatlah erat. Pengaruh Hatta mewarnai berbagai peristiwa penting yang turut menentukan sejarah Indonesia modern. Obsesi Hatta tentang masa depan Indonesia yang lebih baik, membuatnya gelisah dan tidak pernah memejamkan mata. Terus menatap masa depan bangsa Indonesia jauh ke depan.

Pergulatan pemikiran dan perjuangan Hatta sendiri sangatlah panjang dan berliku-liku. Hal ini perlu dilacak mulai dari Sumatera Barat, yang merupakan daerah asal dan tempat kelahirannya. Pengaruh lingkungan budaya Sumatera Barat, terutama lingkungan keluarganya ikut mewarnai kepribadian Hatta. Selanjutnya proses perkembangan pemikiran dan perjuangan Hatta juga dipengaruhi oleh pergaulan dan pendidikannya. Kurun waktu 11 tahun studi di Belanda dinilai sebagai periode yang penting bagi Hatta dalam menentukan gagasan, perjuangan, dan pergerakannya selanjutnya. Hubungan dengan sesama aktivis mahasiswa asal Indonesia maupun dengan pemerintah Kolonial Belanda, mempengaruhi perjuangan Hatta bagi Indonesia Merdeka.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Untuk melihat perjalanan hidup dan karier Hatta, dapat pula dilihat Lampiran 2 tentang Biodata Mohammad Hatta.

Hatta dikenal sebagai sosok pribadi yang pendiam namun mudah untuk bergaul, tenang, jujur, disiplin, selalu bekerja menurut waktu, teguh dalam pendirian, sederhana, dan taat pada ajaran agama. Selain itu Hatta juga merupakan pribadi yang cerdas, cakap, demokrat serta mempunyai wawasan kedepan.

Mohammad Hatta lahir di Bukittinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902,<sup>2</sup> merupakan putera dari Muhammad Djamil.<sup>3</sup> Hatta berasal dari keluarga yang boleh dikatakan cukup mapan karena kakek dari ibunya yang bernama Ilyas bergelar Bagindo Marah, Hatta menyebutnya Pak Gaek, merupakan seorang pedagang besar. Selain berasal dari seorang pedagang besar, Hatta juga berasal dari keluarga berlatar belakang surau atau ulama (agama Islam). Oleh sebab itu, latar belakang keluarganya tersebut sangat mempengaruhi pribadi Hatta. Terutama soal ketaatan terhadap ajaran agama.

Pada waktu kecil nama Hatta sebenarnya adalah Athar, Mohammad Athar. Namun, ibu dan saudaranya lebih sering memanggil Hatta dengan sebutan Atta, dan lama-kelamaan namanya berubah menjadi Mohmmad Hatta. Nama ini akrab dipanggil dengan nama Hatta.<sup>4</sup>

Pendidikan Hatta dimulai dari keluarganya, yakni dengan belajar agama di surau. Kemudian Bukittinggi, Padang, Jakarta, dan Belanda merupakan tempat di mana Hatta mengenyam pendidikan serta yang menentukan arah dan tujuan pemikiran Hatta selanjutnya, yakni sebagai tokoh

---

<sup>2</sup> Hatta, 1979, *Mohammad Hatta Memoir*, Tintamas, Jakarta, hlm. 1.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 14. Namun, ayah Hatta telah meninggal ketika Hatta masih berusia delapan bulan.

<sup>4</sup> Sumanang, dkk., 1972, *Bung Hatta Mengabdikan Pada Tjita-Tjita Perdjongan Bangsa*, Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta Ke-70, Jakarta, hlm. 2. Pada masa pergerakan nasional atau setelah kemerdekaan Indonesia, Hatta lebih dikenal dengan sebutan atau panggilan *Bung Hatta*.

pergerakan nasional. Pendidikan formal Hatta dimulai saat Hatta berusia 4 tahun, yakni dengan bersekolah di Frobel dan kemudian masuk sekolah Inlandscheschool di bukit tinggi usia 6 tahun. Namun, Hatta belajar di sekolah ini hanya 2 tahun saja. Hatta juga belajar bahasa Belanda. Pada tahun 1910 Hatta masuk ke Europese Lagere School (ELS) di Bukittinggi. Pada tahun 1916 Hatta lulus dari ELS dan berhak melanjutkan ke Hogere Burger School (HBS) di Jakarta. Akan tetapi, ibu Hatta belum mengijinkannya untuk melanjutkan sekolah ke Jakarta. Akhirnya, pada tahun itu juga Hatta melanjutkan ke MULO (Meer Vitgebreid Lager Onderwijs School) di Padang sebelum melanjutkan pendidikannya ke Jakarta.

Kota Padang memberi pengaruh yang cukup besar bagi perubahan Hatta. Ketika sekolah di MULO, pergaulan Hatta mulai luas. Hatta mulai aktif dan menjadi anggota sebuah perkumpulan yang bernama *Sarekat Usaha*, yang pada waktu itu diketuai oleh Thaher Marah Sutan.<sup>5</sup> Perkumpulan ini merupakan satu-satunya perkumpulan yang menjadi pelopor pergerakan di kota Padang ketika itu. Pada tahun 1918 berdiri perkumpulan yang bernama *Jong Sumatranen Bond* (Perkumpulan Pemuda Sumatera) cabang Padang.<sup>6</sup> Ketika organisasi ini berdiri, Hatta kemudian ditunjuk menjadi Bendahara. Hatta tertarik terhadap organisasi ini karena suatu rumusan dalam organisasi ini yang berbunyi “pemuda-pemuda Sumatera diharapkan menjadi pemimpin bangsanya” dan suatu rumusan lagi yang berbunyi “memajukan bangsa dan

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 5.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 6.

tanah air”.<sup>7</sup> Di sinilah titik awal Hatta mulai memperhatikan kehidupan masyarakat yang hidup dalam penjajahan. Dari organisasi inilah Hatta mulai mengenal soal politik, dan aktif dalam organisasi-organisasi politik atau pergerakan, yang menentukan arah perjuangan Hatta dikemudian hari. Namun, Hatta tetap tekun dalam mendalami ilmu agama.

Pada tahun 1919 Hatta lulus pendidikan di MULO, dan kemudian melanjutkan ke HMS (Handel Middlebare School) di Jakarta atau dikenal dengan nama Prins Hendrik School (PHS), yakni semacam sekolah dagang. Hatta tidak jadi melanjutkan ke HBS seperti yang direncanakan semula. Di Jakarta Hatta tinggal bersama pamannya yang bernama Ajub Rais. Paman Hatta ini adalah seorang pedagang. Bersama pamannya ini pula Hatta belajar dan mendalami praktek dagang. Seperti di Padang, di Jakarta Hatta tetap aktif dalam organisasi Jong Sumatranen Bond (JSB). Hatta kemudian oleh kawan-kawannya diangkat menjadi pengurus besar JSB sebagai Bendahara. Dalam pergerakan, Hatta bekerja dengan rajin, jujur, dan teliti dalam administrasi. Selain sebagai bendahara, Hatta juga mengurus majalah JSB yang bernama majalah *Jong Sumatra*.<sup>8</sup>

Pada tahun 1921 Hatta menyelesaikan pendidikannya di HMS, dan seperti yang telah direncanakkannya Hatta melanjutkan pendidikannya ke Belanda. Hatta melanjutkan pendidikannya ke Nederland Handelshogesschool

---

<sup>7</sup> *Idem*

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 7.

di Rotterdam mengambil jurusan ekonomi.<sup>9</sup> Pada tahun 1923 Hatta lulus dengan memperoleh gelar Doktorandus dan melanjutkan studinya dengan mengambil Jurusan Ekonomi Kenegaraan guna mengejar gelar Doktoral.<sup>10</sup>

Selain kuliah, Hatta juga aktif dalam pergerakan. Hatta aktif dalam kegiatan organisasi *Perhimpunan Indonesia*. Bahkan Hatta terpilih menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia pada tahun 1926, menggantikan Dr. Sukiman yang akan pulang ke Tanah Air.<sup>11</sup> Hatta secara terus-menerus menjadi Ketua Perhimpunan Indonesia hingga tahun 1930. Di dalam organisasi inilah Hatta mulai memperlihatkan perjuangannya untuk kemerdekaan Indonesia. Dengan tegas Hatta mengatakan bahwa “meruntuhkan penjajahan si-kulit putih atas si-kulit berwarna adalah tugas peradaban”.<sup>12</sup> Kemerdekaan Indonesia adalah maksud dan tujuan utama Hatta tentunya. Pada masa-masa ini pola politik yang ingin dicapai Hatta mulai mempunyai bentuk yang jelas. Pemahaman dan pengetahuan akan ilmu ekonomi menjadi dasar atau landasan pemikiran Hatta dengan menempatkan posisi ekonomi Indonesia dalam ekonomi masyarakat dunia.

Dengan cepat Hatta menjadi seorang politikus Indonesia yang berkaliber internasional. Hal ini dibuktikan dengan peran aktif Hatta dalam mengikuti konferensi-konferensi atau kongres-kongres di kancah internasional seperti misal, tahun 1927 Hatta masuk dalam gerakan *Liga Melawan Imperialisme dan Penjajahan* dengan menjadi pimpinan wakil

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 12.

<sup>11</sup> *Idem*

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 13.

Indonesia.<sup>13</sup> Keikutsertaan Hatta dalam organisasi bertaraf internasional ini tentu saja tujuannya adalah untuk memperjuangkan dan mencapai Kemerdekaan bagi Indonesia. Tujuan Hatta juga guna memperkenalkan perjuangan Indonesia di kancah internasional. Hatta juga pernah mengikuti *Kongres Democratique International IV* di Beirvile, Paris tahun 1926. Pada tahun 1927 juga mengikuti *Kongres Wanita* di Gland, Swiss. Di dalam kongres-kongres ini, Hatta mengemukakan keinginan bangsa Indonesia lepas dari penjajahan, yakni dari kegiatan eksploitasi ekonomi oleh kapital asing.<sup>14</sup> Keaktifannya di kancah Internasional tersebut, membuat Hatta banyak bertemu dan bergaul dengan tokoh-tokoh dari negara lain, seperti pertemanannya dengan Jawaharlal Nehru. Perjuangan Hatta tidak hanya dalam bentuk gerakan-gerakan, namun juga melalui tulisan-tulisan dalam majalah-majalah ataupun tulisan-tulisan dalam buku-buku hasil karangannya.

Selama berada di Belanda Hatta juga banyak berjumpa dan bergaul serta bekerjasama dengan tokoh-tokoh pergerakan lain yang ada di Belanda ataupun Eropa, seperti perjumpaan dengan Nazir, Ali Sastroamidjojo, ataupun Soetan Sjahrir. Namun, tidak hanya di luar negeri saja. Ketika Hatta kembali ke Indonesia tahun 1932, Hatta langsung bergabung dengan tokoh-tokoh pergerakan yang ada di Indonesia, dan disinilah pertemuan Hatta dan Soekarno dimulai. Kerjasama antar keduanya sering dijadikan simbol persatuan. Pada saat-saat itu mereka hidup berdampingan saling mengisi, begitu serasi dan begitu mapan, sehingga kepemimpinan mereka dijadikan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 15.



lambang persatuan bangsa. Pada masa-masa itu muncullah istilah “*Dwi Tunggal*”<sup>15</sup>. Meski demikian tidak jarang diantara keduanya kerap kali terjadi silang pendapat bahkan paham dan pemikiran yang berbeda. Akan tetapi, karena tujuan dan cita-cita yang sama keduanya dapat tetap bertahan menjadi pasangan sebagai pemimpin negara dan pemersatu rakyat.

Perjuangan Hatta di luar negeri, ternyata juga merupakan bagian dari perjuangan di dalam negeri. Baik perjuangan yang dilakukan di luar negeri maupun di dalam negeri, semuanya telah terkoordinasi dengan baik dan terorganisir. 17 Agustus 1945 merupakan puncak perjuangan dan pencapaian Hatta bersama teman-temannya dalam keberhasilannya memerdekakan Indonesia. Namun bagi Hatta, perjuangan belum usai, kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat masih harus terus diperjuangkan.

Perjuangan Hatta diwarnai dengan penangkapan dan pembuangan oleh pemerintah Kolonial Belanda. Hatta pernah ditangkap di Den Haag, Belanda pada tahun 1927 selama kurang lebih enam bulan.<sup>16</sup> Hatta ditangkap karena tulisan-tulisannya dalam majalah *Indonesia Merdeka* yang tajam dan berani dalam menyuarakan anti imperialisme dan anti penjajahan, sehingga dianggap mengancam bagi pemerintah Kolonial Belanda. Hatta kembali dipenjarakan oleh pemerintah Hindia-Belanda tahun 1934 di Glodok, Jakarta.<sup>17</sup> Kemudian di buang ke Boven Digul, Papua tahun 1934 – 1935.<sup>18</sup> Pada tahun 1935 – 1942 dibuang ke Banda Naira, dipindahkan ke penjara Sukabumi tahun 1942, dan

---

<sup>15</sup> \_\_\_\_\_, 1980, *Dwi Tunggal Soekarno Hatta*, Yayasan Idayu, Jakarta, hlm. 52.

<sup>16</sup> Rikard Bagun, editor, 2003: *Bung Hatta*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta: hlm. 408.

<sup>17</sup> *Idem*

<sup>18</sup> *Idem*

kemudian bebas pada bulan Maret 1942 setelah terjadi pemindahan kekuasaan oleh Pemerintah Kolonial Belanda kepada Jepang.<sup>19</sup> Penangkapan dan pembuangan yang mewarnai perjuangan Hatta, menunjukkan bahwa Hatta merupakan ancaman serius bagi pemerintah Kolonial Belanda, dan Hatta mempunyai peran penting dalam perjuangan dan pergerakan untuk mencapai Indonesia Merdeka.

Setelah Indonesia merdeka, Hatta diangkat menjadi Wakil Presiden oleh sidang PPKI. Hatta menjadi wakil dari Presiden Soekarno. Setelah Indonesia Merdeka karier politik Hatta terus berlanjut. Keberpihakan kepada rakyat tetap menjadi sesuatu yang diusung oleh Hatta. Hatta tetap mengabdikan pada kepentingan rakyat Indonesia. Peran Hatta dalam bidang politik sangat penting. Hatta mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), terutama dalam memasukkan unsur demokrasi dan kebebasan di dalam UUD 1945. Hatta mengeluarkan Maklumat tanggal 3 November 1945 yang membuka peluang bagi berdirinya partai-partai politik sebagai proses demokrasi.<sup>20</sup> Pada tahun 1948 hingga tahun 1949, Hatta merangkap sebagai Menteri Pertahanan.<sup>21</sup> Selain itu, Hatta juga menjadi Ketua Delegasi Indonesia ke Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag tahun 1949. Dalam Konferensi ini, Hatta menerima pengakuan dan penyerahan kedaulatan secara langsung dari Ratu Juliana, ratu Belanda.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> *Idem*

<sup>20</sup> *Idem*

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 409.

<sup>22</sup> Sumanang, dkk., *op.cit.*, hlm.13.

Ketika Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat (RIS), Hatta menjabat sebagai Wakil Presiden merangkap Perdana Menteri dalam kabinet RIS.

Peran dan karier politik Hatta memang lebih menonjol ketika sebelum Indonesia Merdeka dibandingkan pada saat Indonesia telah Merdeka. Terutama ketika Indonesia kembali kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dalam UUD 1950 ditetapkan sistem Parlementer dalam pemerintahan. Dimana Hatta maupun Soekarno hanya nampak sebagai simbol negara saja. Pada masa ini disebut sebagai masa *percobaan demokrasi*. Meskipun demikian, peran Hatta dalam bidang politik dan pemerintahan tetap penting. Pemikiran-pemikirannya tentang ekonomi kerakyatan terus diperjuangkan dalam pemerintahan. Hatta mencita-citakan pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial dan mensejahterakan rakyat. Cita-citanya tersebut diwujudkan di dalam Pasal 33 UUD 1945. Hatta juga terus menegakkan proses demokrasi di Indonesia, yakni kaderisasi generasi bangsa melalui pendidikan.

Akan tetapi, pada tahun 1956 Hatta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden bahkan dari segala jabatan apapun dalam pemerintahan. Pengunduran diri Hatta ini tentu membuat heran dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang ganjil. Pengunduran diri Hatta ini juga sangat disayangkan karena melihat karier politik Mohammad Hatta yang panjang dan cemerlang tersebut. Ditambah lagi pemerintah dan rakyat masih membutuhkan peran Hatta.

Pengunduran diri Hatta ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan dan argumentasi yang berbeda-beda. Apakah Hatta mundur karena jabatannya yang dirasa tidak memiliki fungsi yang jelas lagi, apakah Hatta mundur karena tidak ada gunanya lagi mempertahankan kekuasaan karena sulitnya membangun kerjasama dengan pemerintah, apakah ada kekecewaan dalam diri Hatta, atau Hatta mundur karena ketidakcocokan lagi dan ketidak sepahaman dengan Soekarno sebagai penguasa saat itu. Lalu, apakah konflik dengan Soekarno sehingga Hatta memilih untuk mundur. Atau juga karena ingin menjaga moralnya dari politik pemerintah yang dianggap tidak sesuai, Hatta memilih mundur dan rela mengorbankan kepentingan rakyat. Petanyaan besar yang muncul adalah mengapa Hatta mundur? Hal inilah yang menjadi daya tarik peneliti untuk membahasnya.

Hatta mundur dari pemerintahan dalam usianya yang bisa dikatakan masih relatif muda, dalam usia yang masih produktif dan matang dalam pemerintahan. Namun, kenapa Hatta memutuskan untuk mundur dari pemerintahan. Permasalahan tersebut menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Alasan ini yang menimbulkan ketertarikan bagi peneliti untuk menelusuri lebih dalam. Oleh karena itu, penelitian ini memilih topik Mundurnya Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden tahun 1956, dan mencoba mencari jawaban atas permasalahan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas untuk mengetahui lebih jelas Mundurnya Mohammad

Hatta sebagai Wakil Presiden tahun 1956. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa yang mendorong Mohammad Hatta mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden pada tahun 1956?
2. Bagaimana proses pengunduran diri Mohammad Hatta dari jabatannya sebagai Wakil Presiden tahun 1956?
3. Bagaimana pengaruh pengunduran diri Mohammad Hatta terhadap pemerintah?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menjelaskan faktor pendorong pengunduran diri Mohammad Hatta dari jabatannya sebagai Wakil Presiden pada tahun 1956.
- b. Menjelaskan proses pengunduran diri Mohammad Hatta dari jabatan sebagai Wakil Presiden.
- c. Menjelaskan seberapa besarkah pengaruh pengunduran diri Mohammad Hatta terhadap pemerintah.

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini semoga dapat berguna:

- a. Bagi perkembangan ilmu sejarah, khususnya sejarah nasional Indonesia tentang biografi tokoh-tokoh nasional. Semoga penelitian ini dapat menambah informasi dan memperkaya pengetahuan sejarah khususnya tentang tokoh Mohammad Hatta.
- b. Bagi Perpustakaan Universitas Sanata Dharma pada umumnya dan bagi Program Studi Pendidikan Sejarah secara khusus. Semoga karya ilmiah ini dapat menambah kekayaan kepustakaan yang bermanfaat sebagai referensi maupun sumber pengetahuan tentang tokoh Mohammad Hatta, khususnya tentang mundurnya Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden tahun 1956, bagi mahasiswa Universitas Sanata Dharma pada umumnya dan mahasiswa Pendidikan Sejarah secara khusus.
- c. Bagi penulis, semoga penelitian ini dapat memperluas pengetahuan akan sejarah bangsa Indonesia terutama tentang sejarah tokoh-tokoh nasional, khususnya tentang Mohammad Hatta.

#### D. Kajian Pustaka

Guna membahas permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka digunakan sumber-sumber untuk menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Sumber yang digunakan adalah sumber tertulis. Sumber-sumber tulisan maupun lisan dibagi menjadi dua jenis, yakni *sumber primer* dan *sumber sekunder*.<sup>23</sup> *Sumber primer* adalah kesaksian dari seorang

---

<sup>23</sup> Louis Gottschalk, 1986, *Mengerti Sejarah*, Terj., UI-Press, Jakarta, hlm. 35.

saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan pancaindra yang lain, atau dengan alat mekanis seperti diktafon, yakni orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya. Namun, sumber primer itu tidak perlu asli dalam arti hukum dari kata asli itu sendiri, yakni dokumen itu sendiri yang biasanya merupakan versi tulisan yang pertama, karena seringkali suatu copy yang kemudian (kopian) atau suatu edisi cetakan akan juga memenuhi syarat bagi keperluan itu.<sup>24</sup> Jadi, sumber primer hanya harus 'asli' dalam arti kesaksiannya tidak berasal dari sumber lain melainkan berasal dari tangan pertama.<sup>25</sup> Oleh karena itu, sumber primer itu setidaknya harus dihasilkan oleh seseorang yang sejaman dengan peristiwa yang dikisahnya. Meski sudah dicetak kemudian atau sudah turunan. Sedangkan *sumber sekunder* merupakan kesaksian daripada siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan-mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahnya.<sup>26</sup> Sumber sekunder ini dapat diartikan pula sebagai sumber kedua, yakni kisah dan eksposisi tangan-kedua sejarawan-sejarawan lain. Merupakan buku-buku yang ditulis sejarawan.<sup>27</sup>

Beberapa sumber primer dan sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya, pertama buku berjudul *Memoir*, merupakan karangan Mohammad Hatta,

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 35-36.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 36.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 35.

<sup>27</sup> P.J. Suwarno, 1994, (*Hand Out*) *Pengantar Ilmu Sejarah*, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, hlm. 20. Atau lihat juga Louis Gottschalk, 1986, *Mengerti Sejarah*, Terj., UI-Press, Jakarta, hlm. 78.



diterbitkan oleh Tinta Mas Jakarta pada tahun 1978. Buku ini menguraikan tentang riwayat perjalanan hidup Mohammad Hatta mulai dari kecil hingga pada masa awal kemerdekaan. Meski buku ini tidak memberikan uraian langsung tentang Mohammad Hatta pada masa Demokrasi Parlementer di Indonesia, yakni tahun 1950-an, namun buku ini membantu dalam memberikan gambaran serta uraian yang cukup untuk memahami karakter dan pola pikir dari Mohammad Hatta.

Kedua, *Beberapa Pokok Pikiran Mohammad Hatta*, disunting oleh Edi Swasono dan Fauzie Ridjal, diterbitkan oleh Universitas Indonesia Press, Jakarta, tahun 1992. Buku ini merupakan kumpulan hasil pemikiran Hatta, mulai dari pemikiran Hatta soal ekonomi kerakyatan, sampai pemikiran Hatta soal sosialisme Indonesia dan demokrasi untuk Indonesia, yang berisi tentang pemikiran Hatta soal demokrasi yang sesuai untuk Indonesia. Pemikiran Hatta soal demokrasi, dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk mengetahui dasar pemikiran Hatta dan faktor Hatta mundur dari jabatan Wakil Presiden tahun 1956. Uraian dari buku tersebut memberikan gambaran tentang pokok pemikiran Mohammad Hatta secara mendasar mengenai Indonesia.

*Bung Hatta Pribadinya Dalam Kenangan*, disunting oleh Meutia Farida Swasono, diterbitkan oleh Sinar Harapan dan Universitas Indonesia, Jakarta, tahun 1980. Buku ini menguraikan tentang kenangan-kenangan serta pandangan orang-orang yang pernah mengenal dan dekat dengan Mohammad Hatta. Baik itu keluarga, sahabat, teman seperjuangan ataupun teman dalam

pemerintahan. Di dalam buku ini terdapat uraian tentang pengunduran diri Mohammad Hatta.

Sumber sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya, pertama buku yang berjudul *Bung Hatta*, dengan editor Rikard Bagun, diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas Jakarta, tahun 2003. Buku ini berisi kumpulan artikel-artikel dan opini tentang Mohammad Hatta. Di dalamnya terdapat uraian tentang mengapa Mohammad Hatta mundur dari jabatannya pada tahun 1956. Oleh karena itu, buku ini menjadi salah satu acuan pokok guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Kedua, *Mohammad Hatta: Biografi Politik*, karangan Deliar Noer, diterbitkan oleh LP3ES Jakarta, tahun 1990. Buku ini memberikan uraian tentang perjalanan politik Mohammad Hatta, peran serta ide atau pokok pemikiran Mohammad Hatta. Di dalam buku tersebut menguraikan pula tentang pengunduran diri Mohamad Hatta dan faktor pendorong yang menjadikan alasannya memilih untuk mundur. Buku ini juga menjadi salah satu acuan pokok dalam penelitian ini.

Ketiga, *Mohammad Hatta: Hati Nurani Bangsa 1902-1980*, karangan Deliar Noer, terbitan Penerbit Djambatan Perwakilan KITLV Jakarta, tahun 2002. Buku ini menguraikan tentang perjalanan bangsa Indonesia mulai tahun 1902 sampai 1980, dimana Mohammad Hatta berperan didalamnya. Dalam buku ini terdapat pula uraian singkat tentang mundurnya Hatta dari pemerintahan.

Keempat, *Biografi Politik Mohammad Hatta*, dikarang oleh Mavis Rose, diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama Jakarta, tahun 1991. Buku ini memberi uraian tentang pribadi Mohammad Hatta yang memiliki karakteristik yang khas. Buku ini juga menguraikan perjalanan hidup Mohammad Hatta serta karier politiknya selama berkiprah dalam perpolitikan di Indonesia.

Kelima, *Demi Bangsa: Pertentangan Bung Karno vs Bung Hatta*, karangan Wawan Tunjung Alam SH, diterbitkan tahun 2003 oleh Penerbit Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Buku ini berisi tentang pertentangan antara Hatta dengan Soekarno, yang dimulai sejak masa pergerakan nasional hingga pada masa Indonesia telah memperoleh kedaulatannya secara penuh. Di dalamnya terdapat uraian tentang pertentangan Hatta dengan Soekarno pada masa Demokrasi Parlementer soal demokrasi yang sesuai untuk Indonesia, memberikan gambaran mengenai salah satu sebab Hatta mundur tahun 1956.

## **E. Landasan Teori**

Dalam hal ini, landasan teori yang dimaksudkan adalah kerangka pemikiran, artinya jalan pikiran menurut kerangka yang logis untuk menangkap, menerangkan, dan menunjukkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi, yang pada akhirnya berfungsi sebagai tuntunan untuk menjawab, memecahkan, atau menerangkan permasalahan yang telah diidentifikasi tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Dudung Abdurahman, 2007, *Metodologi Penelitian Sejarah*, AR-RUZZ Media, Yogyakarta, hlm. 61-62.

Dalam penelitian yang berjudul “Mundur nya Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden pada tahun 1956” ini, ada beberapa konsep yang perlu dipahami terlebih dahulu sebagai landasan teori untuk penulisan. Konsep-konsep tersebut adalah mundurnya Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden, jabatan Wakil Presiden, dan politik pemerintah Indonesia pada tahun 1950 – 1956.

## 1. Mundurnya Mohammad Hatta

Kata *mundur* dipahami sebagai tindakan mengambil langkah ke belakang, menyerah atau kalah, ataupun dipahami sebagai tindakan menarik diri atau lepas dari tanggungjawab. Akan tetapi, dalam konteks ini *mundur* bukan diartikan seperti yang telah sering dipahami tersebut. Mundur disini juga bukan dalam arti karena diberhentikan dari tugas atau karena usai suatu masa jabatan. Namun, kata mundur disini dipahami suatu pilihan sikap, yaitu sikap Hatta yang memilih untuk berhenti dari jabatannya dalam pemerintahan. Atau lebih tepatnya adalah penarikan diri Hatta dari segala bentuk jabatan dalam pemerintahan. Terutama disini adalah sebagai Wakil Presiden.

Mundur nya Hatta dari jabatan pemerintahan bukan pula diartikan sebagai sikap Hatta yang tidak bertanggungjawab atau lari dari tanggungjawab, tetapi Hatta mundur karena adanya suatu pertimbangan dengan perhitungan yang matang. Hatta menarik diri dari jabatan pemerintahan karena adanya pertentangan dan konflik antara dirinya dengan penguasa saat itu dan terhadap pemerintah. Demi kepentingan rakyat dan negara, dan untuk menghindari supaya tidak terjadi konflik atau pertentangan

terbuka yang dapat merugikan kepentingan bangsa dan negara, maka Hatta memilih untuk mundur.

Lebih singkatnya dapat dikatakan bahwa Hatta mundur karena ada kekecewaan dalam dirinya. Meski demikian, bukan berarti Hatta tidak peduli lagi terhadap bangsa dan negara Indonesia ini. Meskipun ia tidak menjabat lagi dari segala bentuk jabatan apapun dalam pemerintahan, tetapi Hatta tetap mengikuti perkembangan bangsa ini dan mengikuti percaturan politik di negeri ini dengan menggunakan statusnya sebagai warga negara melalui pendidikan maupun melalui tulisan-tulisannya.

## 2. Jabatan Wakil Presiden

Wakil presiden secara singkat dapat diartikan sebagai pembantu atau wakil dari seorang presiden, atau juga wakil kepala negara.<sup>29</sup> Segala bentuk jabatan pemerintahan di Indonesia, beserta kekuasaan dan kewenangannya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Termasuk jabatan sebagai Wakil Presiden.

Di dalam Penjelasan Pasal-Pasal UUD 1945, Wakil Presiden (bersama Presiden) termasuk dalam kekuasaan eksekutif (Penjelasan ayat 2, pasal 4 dan 5, bab III UUD 1945).<sup>30</sup> Wakil Presiden bertugas membantu tugas dan

---

<sup>29</sup> Rukman Amanwinata, dkk., 1985, *Kamus Istilah Tata Negara*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, hlm. 57.

<sup>30</sup> Pringgodigdo, 1955, *Tiga Undang-Undang Dasar*, Penerbit PT. Pembangunan, Jakarta, hlm. 74. Lihat juga Mohammad Tolchah Mansoer, 1969, *Pembahasan Beberapa Aspek Tentang Kekuasaan-Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia*, Radya Indria, Yogyakarta, hlm. 141.

keajiban Presiden (UUDS 1950, bab II, pasal 45 ayat 2).<sup>31</sup> Jabatan Wakil Presiden (bersama Presiden) dipilih menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang (UUDS 1950, bab II, pasal 45 ayat 3).<sup>32</sup> Dalam pengangkatan dan penghentiannya, Wakil Presiden mempunyai kedudukan yang sama atau yang sederajat dengan Presiden. Termasuk jika terjadi pertentangan atau perselisihan antara Presiden dengan Wakil Presiden, Presiden tidak dapat dengan sepihak memecat atau memberhentikan jabatan Wakil Presiden.<sup>33</sup>

Kedudukan Wakil Presiden adalah sebagai wakil atau pembantu dari Presiden, bahkan sebagai pengganti Presiden apabila Presiden mangkat (meninggal), berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, sampai habis masa jabatannya (UUDS 1950, bab II, pasal 48).<sup>34</sup>

Pada masa berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950), jabatan Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara bersifat konstitutif. Artinya, bahwa kedudukan Presiden dan Wakil Presiden berdasar atas konstitusi dan dibatasi oleh konstitusi. Kedudukan Wakil Presiden ataupun Presiden hanya menjadi simbol negara. Tugas keduanya hanya bersifat seremonial saja, misalnya pidato kebangsaan setiap tanggal 17 Agustus, pidato-pidato dalam pembukaan sidang-sidang parlemen ataupun sidang-sidang pemerintahan, melawat ke luar negeri ataupun menerima tamu utusan dari negara lain yang berkunjung ke Indonesia, dan dalam peresmian-

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 21.

<sup>32</sup> *Idem*. Dalam UUD 1945 Wakil Presiden dan Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan suara yang terbanyak (UUD 1945, bab III, pasal 6 ayat 2).

<sup>33</sup> Mohammad Tolchah Mansoer, *op.cit.*, hlm. 142.

<sup>34</sup> Pringgodigdo, *op.cit.*, hlm. 22. Bunyi pasal ini sama rumusannya dengan UUD 1945, terdapat pada Bab III Pasal 8 (UUD 1945, bab III, pasal 8). Lihat juga Mohammad Tolchah Mansoer, *op.cit.*, hlm. 210.

peresmian pembangunan. Oleh sebab itu, Presiden dan Wakil Presiden tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan penuh atas Pemerintahan, tetapi jalannya pemerintahan menjadi wewenang Kabinet (Parlemen) yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri (PM). Hal ini berkaitan dengan sistem pemerintahan yang diterapkan di Indonesia pada tahun 1950 tersebut, yakni sistem *Parlementer*.

Mohammad Hatta sendiri diangkat sebagai Wakil Presiden langsung oleh Presiden Soekarno atas anjuran Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk pertama kali Wakil Presiden diangkat langsung oleh Presiden (UUDS 1950, bab II, pasal 45, ayat 4).<sup>35</sup> Dan sejak itu, jabatan Wakil Presiden terus dijabat oleh Hatta hingga pengunduran dirinya tahun 1956. Pada saat Hatta mengundurkan diri sebenarnya masa jabatannya belum selesai.

### **3. Politik Pemerintah Indonesia Tahun 1950 – 1956**

Politik merupakan persoalan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan.<sup>36</sup> Sedangkan politik nasional dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan asas, haluan, usaha, serta kebijakan tindakan negara mengenai pembinaan serta penggunaan potensi nasional secara menyeluruh untuk tujuan negara.<sup>37</sup> Dalam hal ini adalah politik nasional Indonesia seperti tata cara pelaksanaan pemerintahan, dasar-dasar pemerintahan, serta

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 21, atau dalam UUD 1945, tentang Aturan Peralihan, Pasal III yang berbunyi: Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), hlm. 65.

<sup>36</sup> Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 763.

<sup>37</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, 1991, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, hlm. 1180.



kebijakan-kebijakannya pada tahun 1950 sampai tahun 1956. Dengan demikian, politik pemerintah Indonesia yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah sistem politik pemerintahan Indonesia pada masa itu, serta kondisi politik atau jalannya perpolitikan di Indonesia.

Antara tahun 1950 hingga tahun 1956, pada masa itu Indonesia sedang menjalankan dan mencoba sistem demokrasi di dalam negara dan pemerintahan. Sehingga pada masa ini disebut sebagai masa *percobaan demokrasi* atau juga disebut masa *demokrasi parlementer*.

Dalam penelitian ini dilakukan pembatasan tahun, yakni antara tahun 1950 – 1956 dengan alasan bahwa pada tahun 1950 merupakan tahun masa kembalinya negara Indonesia kedalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan pada saat itu Indonesia telah benar-benar menjadi sebuah negara yang mandiri dan berdaulat penuh atas bangsa dan negaranya. Pada masa inilah negara Indonesia mulai secara mandiri menjalankan pemerintahan negara serta mencari sistem pemerintahan yang cocok untuk digunakan dalam pemerintahannya. Pada masa ini pula Indonesia mulai mencari bentuk sistem pemerintahan yang sesuai yang pada akhirnya dijalankanlah sistem Demokrasi Parlementer. Perlu dijelaskan bahwa pada masa ini terjadi perubahan pola kekuasaan dan wewenang dalam pemerintahan. Pemerintahan tidak dijalankan secara langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden, namun berada di tangan Kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Dengan demikian, jabatan Presiden dan juga Wakil Presiden hanya sebagai simbol negara saja, dimana tidak memiliki kewenangan serta kekuasaan atau otoritas atas

pemerintahan. Oleh karena itu, Hatta yang menjabat sebagai Wakil Presiden tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pemerintahan.

Pada masa ini pula terjadi perubahan politik, dimana sistem demokrasi digunakan sebagai paham dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, masih mencari bentuk yang ideal mengenai sistem demokrasi yang akan digunakan. Oleh karenanya, pada masa ini terjadi perubahan atau pergantian format kabinet-kabinet berkali-kali dalam pemerintahan. Mulai dari kabinet Natsir hingga kabinet Ali II, dimana pada masa Ali II Hatta mengundurkan diri.<sup>38</sup>

Bersamaan dengan sistem demokrasi yang sedang berjalan, Mohammad Hatta melihat bahwa juga telah terjadi pergeseran-pergeseran tujuan dari pejabat-pejabat pemerintahan dan partai-partai politik atau pun organisasi-organisasi politik yang terlibat di dalamnya. Hatta melihat bahwa mulai terjadi banyak penyelewengan-penyelewengan kewenangan kekuasaan atau jabatan, serta tanggungjawab. Bukan lagi berorientasi dan mengutamakan tujuan bersama yaitu kepentingan rakyat, tetapi masing-masing orang, golongan, atau kelompok mulai saling bersaing dan saling menjatuhkan demi mencapai kepentingan pribadi dan memperoleh keuntungan.<sup>39</sup>

## **F. Metode dan Pendekatan Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian sejarah, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah.

---

<sup>38</sup> Moedjanto, 1992, *Indonesia Abad Ke-20 (jilid 2)*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 102.

<sup>39</sup> Ricklefs, 2005, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Penerbit Serambi, Jakarta, hlm. 502.

Metode sejarah di sini adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Rekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses itu disebut *historiografi* atau *penulisan sejarah*.<sup>40</sup> Dengan menggunakan metode sejarah dan historiografi, sejarawan berusaha untuk merekonstruksi masa lampau manusia.<sup>41</sup>

Metode penelitian sejarah secara umum mempunyai lima tahap atau proses. Kelima tahap tersebut adalah: a) Pemilihan subyek atau pemilihan topik, b) Pengumpulan sumber atau heuristik, c) Pengujian sumber atau kritik sumber (verifikasi), d) interpretasi (analisis dan sintesis), dan e) penulisan sejarah atau historiografi.<sup>42</sup> Karena penelitian ini adalah penelitian sejarah, oleh karena itu tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini menggunakan lima tahap dalam proses penulisannya, yakni sebagai berikut:<sup>43</sup>

## **a. Pemilihan Topik**

Pemilihan topik merupakan langkah pertama dalam sebuah penelitian. Peneliti harus mencari topik tertentu untuk dijadikan subyek dalam penelitiannya. Dalam memilih topik, seorang peneliti perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu: 1) kedekatan emosional, berkaitan dengan minat dan kedekatan dengan subyek yang diteliti. 2) kedekatan intelektual, berkaitan dengan kemampuan, yakni mampu atau tidaknya dalam meneliti subyek yang dijadikan obyek penelitian, serta tingkat pengetahuan

---

<sup>40</sup> Louis Gottschalk, *op.cit.*, hlm. 32.

<sup>41</sup> *Idem.*

<sup>42</sup> Kuntowijoyo, 2001, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Bentang Budaya, Yogyakarta, hlm. 91. Lihat juga Louis Gottschalk, 1986, *Mengerti Sejarah*, Terj., UI-Press, Jakarta, hlm. 34.

<sup>43</sup> Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 91.

peneliti. 3) rencana penelitian, berkaitan dengan permasalahan yang akan muncul dalam penelitian, sumber-sumber sejarahnya, serta pertimbangan waktu dan dana.<sup>44</sup>

Dengan menggunakan pertimbangan di atas, maka dalam penelitian ini topik yang dipilih adalah mengenai sejarah tokoh, yakni tentang Mohammad Hatta. Topik yang diambil dari tokoh Hatta ini adalah mengenai “Mundurinya Mohammad Hatta sebagai wakil Presiden Tahun 1956”.

## **b. Pengumpulan Sumber (Heuristik)**

Tahap ini merupakan proses pengumpulan data atau sumber yang relevan untuk keperluan penelitian. Sumber yang diperlukan untuk mencari informasi mengenai subyek pada penelitian ini sebagian besar diperoleh dari buku-buku. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan sumber yang berupa tulisan (sumber tertulis), dan penelitian ini merupakan penelitian kajian kepustakaan. Sumber tulisan dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu sumber primer dan sumber sekunder.<sup>45</sup>

Sumber-sumber buku atau tulisan tersebut diperoleh dari berbagai perpustakaan dan toko-toko buku seperti perpustakaan Universitas Sanata Drama, Perpustakaan Hatta Corner (Perpustakaan Yayasan Hatta), perpustakaan Universitas Gadjah Mada, perpustakaan Daerah Yogyakarta, dan toko-toko buku di Kota Yogyakarta. Buku-buku yang menuliskan tentang Mohammad Hatta, atau setidaknya yang berkaitan dengan Mohammad Hatta cukup banyak ditemukan di tempat-tempat tersebut.

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 92-95.

<sup>45</sup> Louis Gottschalk, *op.cit.*, hlm. 35.

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah buku berjudul *Memoir, Bung Hatta Pribadinya Dalam Kenangan, Surat-Menyurat Hatta dan Anak Agung, dan Mohammad Hatta: Beberapa Pokok Pikiran*. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan di antaranya, buku yang berjudul *Bung Hatta, Mohammad Hatta: Biografi Politik, Mohammad Hatta: Hati Nurani Bangsa 1902-1980, dan Biografi Politik Mohammad Hatta*.

### c. Kritik Sumber (Verifikasi)

Tahap ini merupakan tahap dalam penelitian sejarah setelah proses pengumpulan data. Kritik sumber dilakukan untuk mengetahui otentik atau tidaknya suatu sumber atau otentisitas (kritik ekstern) dan kredibel atau tidaknya suatu sumber atau kredibilitas (kritik intern).<sup>46</sup> Otentisitas artinya keaslian sumber, sedangkan kredibilitas artinya adalah tingkat kepercayaan sumber atau dapat dipercaya atau tidak sumber yang digunakan. Kritik sumber dalam penelitian sejarah merupakan langkah yang harus dilakukan untuk menghindari adanya suatu kepalsuan suatu sumber atau untuk mengetahui apakah data yang ada dapat dipertanggungjawabkan keasliannya atau tidak.

Dalam penelitian ini kritik intern lebih diperlukan daripada kritik ekstern. Kritik ekstern tidak perlu dilakukan karena keaslian bahan atau materi yang dari sumber digunakan, tidak perlu diragukan. Kritik intern lebih perlu untuk dilakukan sebab kebenaran sumber atau data masih perlu lagi dikaji apakah sumber atau data yang digunakan tersebut dapat dipercaya kebenarannya.

---

<sup>46</sup> Kuntowijoyo, *op.cit.*, hlm. 101-102.

Untuk itu, perlu membandingkan sumber-sumber yang ada, yaitu antara sumber yang satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh membandingkan antara buku Rikard Bagun yang berjudul *Bung Hatta*, kemudian buku *Biografi Politik Mohammad Hatta*, baik karangan Deliar Noer ataupun Mavis Rose, dan buku *Bung Hatta Pribadinya Dalam Kenangan* yang disunting oleh Meutia Farida Swasono. Di dalam ke empat buku tersebut, terdapat uraian, yang semuanya mempunyai pendapat yang sama dan senada mengenai alasan Hatta mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden ataupun dari jabatan dalam pemerintahan. Konflik dan kekecewaan merupakan alasan yang membuat Hatta memilih untuk mundur. Meskipun demikian, masing-masing dari tulisan-tulisan tersebut mempunyai cara penjelasan yang berbeda-beda.

Dengan membandingkan antara sumber satu dengan yang lainnya, maka akan diketahui keabsahan sumber-sumber yang ada tersebut.

#### **d. Interpretasi (Analisis dan Sintesis)**

Analisis sumber atau interpretasi dalam penelitian merupakan tahap yang cukup penting, karena tanpa adanya interpretasi atau penafsiran dari seorang peneliti maka sumber atau data yang ada tidak akan dapat berbicara atau tidak berarti.<sup>47</sup> Interpretasi ada dua macam, yaitu analisis dan sintesis.<sup>48</sup> Analisis berarti menguraikan, sedangkan sintesis berarti menggabungkan.<sup>49</sup> Keduanya merupakan cara berpikir dalam penelitian sejarah. Dengan demikian, sumber-sumber atau data-data yang telah diuji kebenarannya ditafsirkan dengan

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 103.

<sup>48</sup> *Idem*

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 103-104.

menganalisa dan menggabungkannya menjadi satu untuk diperoleh satu rangkaian peristiwa sejarah.

## **e. Penulisan Sejarah (Historiografi)**

Tahap ini merupakan tahap akhir dari penelitian sejarah, yaitu tahap penulisan sejarah. Penulisan sejarah tidak lepas dari sumber-sumber sejarah yang terkait di dalamnya, yang memberikan gambaran mengenai suatu peristiwa. Dalam penulisan sejarah, aspek kronologi sangat penting,<sup>50</sup> karena memberi suatu gambaran yang jelas akan waktu dan pemberian batasan waktu atau periodisasi suatu peristiwa.

Sedang metode penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis.

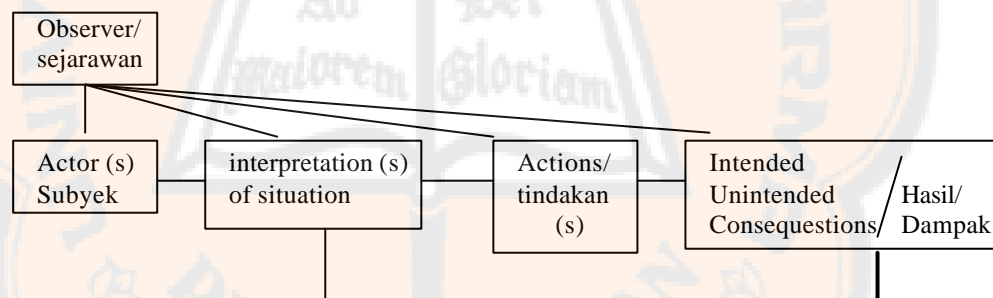
## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan politik dan pendekatan psikologi. Pendekatan politik digunakan untuk menganalisis kekuasaan yang dijalankan oleh Soekarno dan Mohammad Hatta saat menjabat sebagai Wakil Presiden hingga menjelang pengunduran diri Hatta dari pemerintahan. Selain itu juga untuk melihat berbagai macam aspek yang melandasi model kepemimpinan Hatta, serta untuk melihat pola pemerintahan atau kepemimpinan yang dijalankan oleh penguasa pada masa itu, sehingga membuat Hatta memilih untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden bahkan dari segala jabatan dalam pemerintahan.

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 105.

Pendekatan psikologi merupakan pendekatan yang berorientasikan pada tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia tidak muncul atau keluar begitu saja, namun tingkah laku digerakkan oleh adanya motivasi.<sup>51</sup> Karena setiap tindakan atau tingkah laku manusia tentu digerakkan dan dilatarbelakangi oleh motif tertentu. Motivasi ini merupakan suatu faktor yang terdapat dalam diri manusia, yang mengarahkan dan mengorganisasikan tingkah lakunya.<sup>52</sup> Oleh karenanya, manusia memiliki motif yakni suatu alasan atau dorongan dalam dirinya yang dipengaruhi oleh situasi dan sebab untuk melakukan tindakan atau mengambil suatu sikap.<sup>53</sup> Begitu halnya dengan Berkhofer yang membuat skema analisis sejarah dengan pendekatan psikologi sebagai berikut:<sup>54</sup>



(Skema Behaviour Approach/ Skema Analisis Sejarah dengan Pendekatan Situational/ Pendekatan Tingkah Laku)

Dalam penelitian ini pendekatan psikologi digunakan untuk mengetahui situasi Hatta (pelaku), sikap, dan tindakan Hatta. Dengan demikian, akan dapat membantu peneliti dalam mencari jawaban sebab Hatta mundur dari

<sup>51</sup> Martin Handoko, 1992, *Motivasi Daya Penggerak Tingkah Laku*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 9.

<sup>52</sup> *Idem*

<sup>53</sup> *Idem*

<sup>54</sup> Dudung Abdurahman, *op.cit.*, hlm. 74.



jabatannya sebagai Wakil Presiden. Apa yang menjadi faktor pendorongnya serta alasan Hatta mengambil sikap demikian.

## **G. Metode Penulisan**

Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Metode penulisan deskriptif merupakan metode penulisan yang bertujuan memberikan gambaran atau lukisan secara jelas, sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan data-data atau fakta-fakta.

Metode analitis dalam penulisan ini adalah interpretasi data atau fakta, artinya bahwa penulisan tidak hanya sekedar disajikan secara naratif, namun disertai dengan analisis. Dalam penelitian ini, penulisan deskriptif analitis menguraikan permasalahan tentang mundurnya Mohammad Hatta dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada penelitian ini ditunjukkan guna memaparkan secara garis besar mengenai Mundurnya Mohammad Hatta Sebagai Wakil Presiden Tahun 1956. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan ini secara garis besar memaparkan latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka,

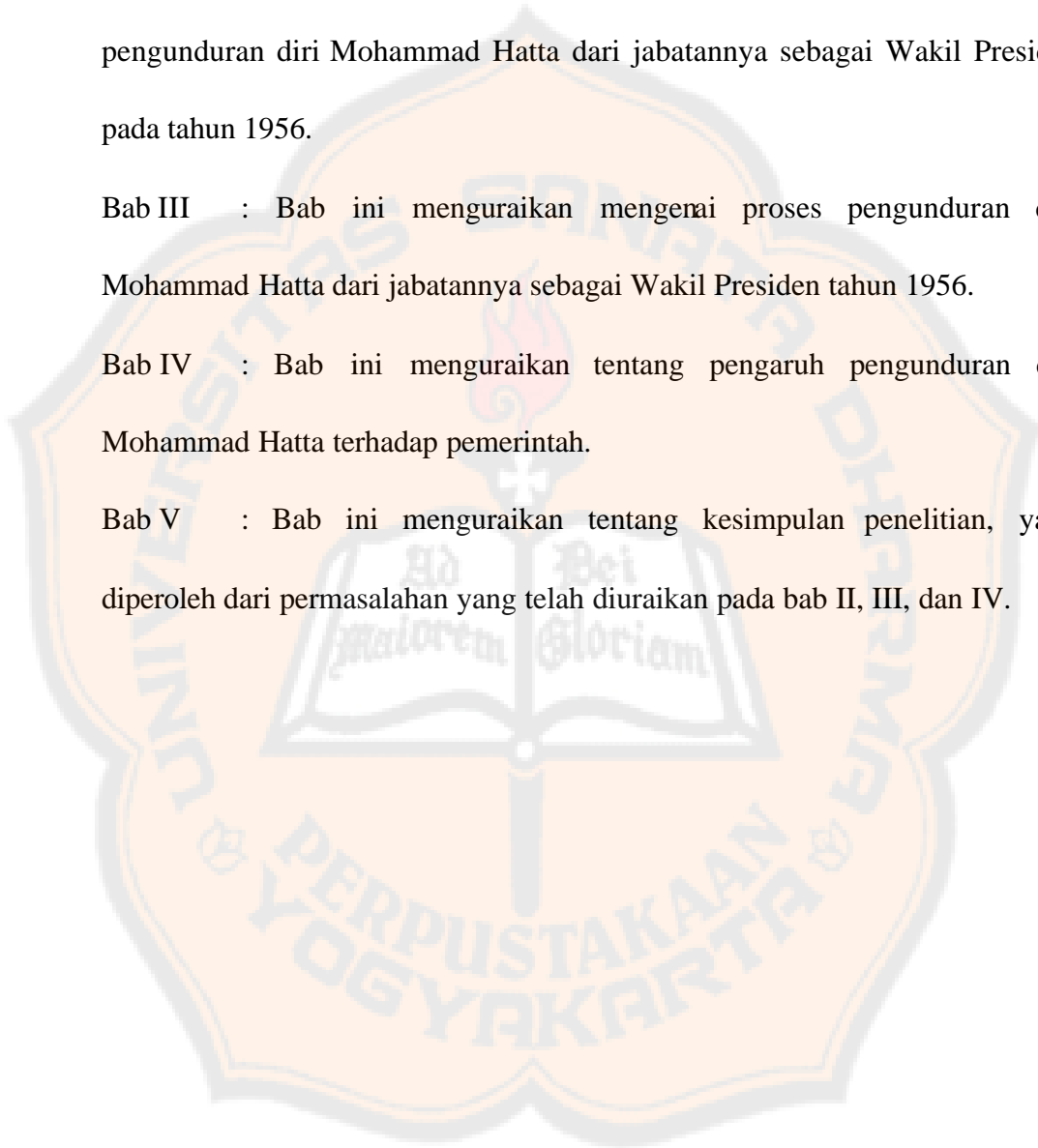
landasan teori, hipotesis, metode dan pendekatan penelitian, metode penulisan, serta sistematika penulisan.

Bab II : Pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang faktor pendorong pengunduran diri Mohammad Hatta dari jabatannya sebagai Wakil Presiden pada tahun 1956.

Bab III : Bab ini menguraikan mengenai proses pengunduran diri Mohammad Hatta dari jabatannya sebagai Wakil Presiden tahun 1956.

Bab IV : Bab ini menguraikan tentang pengaruh pengunduran diri Mohammad Hatta terhadap pemerintah.

Bab V : Bab ini menguraikan tentang kesimpulan penelitian, yang diperoleh dari permasalahan yang telah diuraikan pada bab II, III, dan IV.



## BAB II

### FAKTOR PENDORONG PENGUNDURAN DIRI HATTA SEBAGAI WAKIL PRESIDEN TAHUN 1956

Pada tanggal 1 Desember 1956 Mohammad Hatta meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Jabatan yang telah dipangkunya selama sebelas tahun, terhitung sejak pengangkatannya pada sidang Panitia Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945.

Persepsi-persepsi atau isu-isu yang berkembang dalam masyarakat pada umumnya memandang bahwa pengunduran diri Hatta dari jabatannya sebagai Wakil Presiden lebih dikarenakan hubungan antara Presiden Soekarno dan Hatta yang tidak lagi harmonis. Keduanya tidak lagi memiliki pandangan yang sama dalam memandang persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa. Banyak kalangan yang mengatakan bahwa Dwi tunggal telah retak dan berada diujung kehancuran. Sebenarnya, perbedaan-perbedaan pendapat ataupun pandangan antara Hatta dengan Soekarno bukanlah hal baru. Keduanya pernah berbeda pendapat pada masa pergerakan nasional di tahun 1932, yaitu dalam persoalan bentuk perjuangan yang *non-kooperatif*.<sup>55</sup> Namun, keduanya masih dapat menghindarkan perpecahan diantara mereka. Akan tetapi, pada tahap selanjutnya ini, perseteruan atau perbedaan pendapat atau gagasan antara keduanya dapat dikatakan mencapai pada puncaknya, karena tidak mampu disatukannya lagi antara Hatta dengan Soekarno,

---

<sup>55</sup> Deliar Noer, 1990, *Mohammad Hatta : Biografi Politik*, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta, hlm. 55-57.

yang ditandai dengan pengunduran diri Hatta sebagai Wakil Presiden bahkan dari segala jabatan dalam pemerintahan.

Akan tetapi, pengunduran Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden tidak dapat hanya diletakkan dalam hubungannya dengan Soekarno saja. Pasang surut hubungan antara Hatta dengan Soekarno bukan merupakan faktor satu-satunya penyebab Hatta mundur. Meski demikian, tetap diakui bahwa perseteruan antara Hatta dengan Soekarno ini menjadi faktor penting dalam pengambilan keputusan Hatta tersebut. Tentu, faktor-faktor lain turut mempengaruhi dan menjadi pertimbangan bagi Hatta untuk mundur. Untuk itu, faktor apa saja yang membuat Hatta mengambil keputusan untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan bab ini.

## A. Perbedaan Pandangan Dengan Soekarno

Faktor ini merupakan faktor kuat yang membuat Hatta mengambil keputusan untuk mundur sebagai Wakil Presiden. Pertentangan antara Hatta dengan Soekarno sangat prinsipil, yakni mengenai dasar-dasar pemikiran yang keduanya saling bertolak belakang. Bahkan sifat dan karakter antara keduanya sangat berbeda, dimana keduanya mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda pula.<sup>56</sup>

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa pertentangan di antara keduanya bukanlah hal baru. Pada masa pergerakan nasional kedua pemimpin

---

<sup>56</sup> G. Moedjanto, 2003, *Dari Pembentukan Pax Neerlandica Sampai Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Penerbit Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, hlm. 252. Hatta adalah seorang pemimpin yang berwatak rasional, berjiwa administrator, dan bergaya tenang. Sedangkan Soekarno adalah seorang pemimpin yang berwatak romantik, berjiwa penggerak, dan bergaya pendobrak.

bangsa Indonesia itu pernah terjadi polemik dalam memandang soal strategi dan bentuk perjuangan.<sup>57</sup> Karena keduanya mempunyai tujuan sama, yakni mencapai Indonesia Merdeka, maka keduanya mampu menghilangkan segala perbedaan demi mencapai cita-cita bersama. Namun, perseteruan antar keduanya kembali muncul di masa merdeka penuh, dan nampak sekali pada masa berjalannya demokrasi parlementer tahun 1950-an. Berbeda dengan masa pergerakan, perseteruan antara Hatta dan Soekarno muncul terutama dalam memandang soal demokrasi dan sistem pemerintahan. Kedua tokoh ini mempunyai pandangan, gagasan serta konsepsi yang berbeda pada persoalan ini. Keduanya saling bersilang pendapat tentang sistem demokrasi dan pemerintahan yang sesuai untuk Indonesia. Perbedaan pandangan ini yang semakin membulatkan tekad Hatta untuk memilih mundur. Hal ini diperkuat pula dengan sifat dan cara kepemimpinan Soekarno sebagai Presiden yang tidak disenangi Hatta. Tentu Hatta mempunyai alasan kuat untuk segala persepsi serta keputusannya tersebut.

Ketidaksesuaian Hatta terhadap Soekarno diantaranya tampak dalam memandang soal partai politik, soal keinginan Soekarno memaksukkan Partai Komunis Indonesia (PKI) ke dalam formatur pemerintahan (kabinet), kemudian soal gagasan atau ide demokrasi yang sesuai untuk Indonesia, dan ketidak senangan Hatta terhadap sikap Soekarno sebagai Kepala Negara Konstitusional yang mengarah ke sikap otoriter. Perbedaan pandangan antara

---

<sup>57</sup> Sebagai diketahui, bahwa pada masa ini perbedaan pandangan antara Hatta dengan Soekarno sudah tampak. Keduanya menunjukkan adanya perbedaan karakter serta pemikiran antara keduanya. Pernah terjadi polemik antara keduanya dalam menentukan strategi dan bentuk perjuangan, yakni *Cooperasi* atau *Non-cooperasi*. Pertentangan ini yang kemudian ditulis oleh Hatta sendiri dalam karangannya yang berjudul *Memoir*. Lihat Hatta, *op.cit.*, hlm. 279-283.

Hatta dengan Soekarno pada masa berjalannya Demokrasi Parlementer (tahun 1950-an) lebih tampak dalam memandang soal bagaimana sistem dan bentuk demokrasi yang sesuai untuk bangsa Indonesia. Perbedaan pandangan atau persetujuan antara Hatta dengan Soekarno yang menjadi faktor pendorong pengunduran diri Hatta, secara singkat dan jelas akan diuraikan pada uraian dibawah ini.

## **1. Dalam Memandang Soal Partai Politik**

Adanya partai politik dalam sebuah negara dapat menunjukkan bahwa negara itu menjalankan demokrasi. Begitu pula dengan Indonesia pada dekade awal kemerdekaan mencoba sistem ini dalam pemerintahan. Akan tetapi, yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Sejak munculnya partai-partai politik berkenaan dengan sistem parlementer, situasi pemerintahan justru bergolak.

### **a. Pandangan Soekarno**

Soekarno dikemudian hari sangat menyesalkan keputusan yang diambil Hatta mengenai berdirinya partai-partai, karena memang Hatta yang memprakarsai bahkan menandatangani mengenai berdirinya partai-partai di Indonesia<sup>58</sup>. Hatta memang merupakan salah satu pemrakarsa yang memberikan kesempatan bagi rakyat untuk mendirikan partai-partai politik. Hatta pula yang menandatangani Maklumat 3 November 1945 soal partai politik.<sup>59</sup> Motivasi dari disahkannya maklumat ini adalah agar memberi ruang bagi hak-hak politik rakyat serta untuk menegakkan demokrasi. Karena menurut Hatta, adanya partai-partai menunjukkan wujud kehidupan demokrasi

---

<sup>58</sup> Rikard Bagun, *op.cit.*, hlm. 381.

<sup>59</sup> Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 286-287.

rakyat serta menunjukkan bahwa negara itu merupakan negara demokrasi. Oleh karenanya, masalah kepartaian ini pada masa demokrasi parlementer kembali menjadi salah satu penyebab pertentangan dan perbedaan pandangan antara Hatta dengan Soekarno. Dalam sebuah pidato pada tahun 1956, dihadapan pemuda Soekarno secara tegas menyinggung soal kepartaian tersebut. Soekarno mengatakan:

Ada penyakit yang kadang-kadang lebih parah daripada perasaan kesukuan dan kedaerahan... Itulah penyakit kepartaian... Pada bulan November 1945 kita telah membuat kesalahan besar. Kita menganjurkan pembentukan partai-partai...Kita terkena penyakit kepartaian yang menyebabkan kita selalu cacar-cakaran satu sama lain... Sekarang marilah kita bersama-sama mengubur semua partai..<sup>60</sup>

Dari pernyataan tersebut jelas, bahwa Soekarno sebenarnya tidak setuju dengan berdirinya partai-partai politik, dan ia ingin membebaskan diri dari partai-partai. Menurutnya, berdirinya partai-partai politik justru akan memecah persatuan yang selama ini dicita-citakan. Persatuan nasional dengan menyatukan segala unsur masyarakat dan berada di bawah pemimpin rakyat memang semboyan yang diusungnya demi menjalankan politiknya.<sup>61</sup>

## **b. Pandangan Hatta**

Mengenai persoalan penyakit kepartaian, Hatta sepakat dengan Sukarno. Namun, Hatta juga mempunyai pendapat lain. Menurutnya, bahwa masalahnya bukan semata-mata karena keberadaan partai-partai, tetapi pada

---

<sup>60</sup> Rikard Bagun, *op.cit.*, hlm. 382. Pidato Soekarno pada tanggal 28 Oktober 1956, dalam upacara peringatan Sumpah Pemuda.

<sup>61</sup> Wawan Tunggul Alam SH, 2003, *Demi Bangsaku Pertentangan Bung Karno vs Bung Hatta*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 228-229.

masa-masa itu pemerintahan juga berada dalam kondisinya yang tidak berwibawa. Yang berkembang pada masa-masa itu justru proses demoralisasi dan mulai hilangnya rasa tanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya. Segala macam pergerakan dan semboyan nasional (nasionalisme) digunakan dan dimanfaatkan sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi. Partai-partai politik ditunggangi oleh pihak-pihak berkepentingan untuk mencapai kepentingan sendiri. Partai-partai menyuruh orang-orangnya untuk duduk di dalam kabinet sehingga lembaga pemerintahan hanya seperti suruhan partai saja<sup>62</sup>. Pernyataannya ini ia ungkapkan pada pidatonya di Universitas Gadjah Mada pada 27 November 1956.<sup>63</sup>

Menurutnya, untuk mengembangkan demokrasi tidak bisa dengan jalan seperti yang ditempuh Sukarno, yakni dengan mengubur semua partai-partai. Hatta lebih suka memperbaiki partai-partai, dan mempersiapkan pembentukan kader-kader yang lebih matang<sup>64</sup>. Dengan demikian, proses pembelajaran untuk membangun sebuah negara yang demokratis akan terus berjalan.

Dari perbedaan pandangan soal partai politik di atas cukup jelas, bahwa Hatta dengan Soekarno mempunyai pemikiran yang berbeda soal bangsa ini, terutama soal wujud demokrasi bagi rakyat. Hatta sangat mendukung adanya partai politik, sedangkan Soekarno menganggap bahwa pengadaan partai politik bukanlah cara yang tepat untuk membangun persatuan dan menjalankan demokrasi bagi Indonesia.

---

<sup>62</sup> *Idem*

<sup>63</sup> *Idem*

<sup>64</sup> M.C. Ricklefs, *op.cit.*, hlm. 502.



## **2. Partai Komunis Indonesia (PKI) Dimasukkan Kedalam Formatur Kabinet**

Perbedaan pandangan antara Hatta dengan Soekarno tampak jelas pula dalam memandang soal PKI. Soekarno menyadarkan perjuangannya kepada apa yang dinamakan “massa aksi”, sedangkan Hatta lebih menekankan pada pembentukan “kader-kader”.

### **a. Ide dan Gagasan Soekarno soal Partai Komunis (PKI)**

Soekarno menyadarkan perjuangannya kepada apa yang dinamakan “massa aksi”, yakni penyatuan kekuatan-kekuatan politik. Oleh karenanya, Soekarno menghendaki disatukannya semua kekuatan serta segala unsur atau golongan dalam masyarakat demi tercapainya persatuan nasional, dan dalam rangka menghadapi apa yang dinamakannya neo-kolonialisme. Termasuk mengajak kaum komunis untuk turut serta dalam pemerintahan.

Menurut Soekarno, kekuatan PKI perlu diperhitungkan dalam pemerintahan. Tampaknya Soekarno melihat PKI merupakan sebuah potensi yang akan mampu mendukung serta memberikan sumbangan bagi pemerintahan. Penilaian Soekarno ini tampaknya berdasar atas hasil pemilu 1955, dimana PKI mampu menjadi partai politik papan atas dengan menembus perolehan suara (massa pendukung) yang menakjubkan.<sup>65</sup> Hal ini yang memberikan daya tarik tersendiri bagi Soekarno.

Oleh karena itu, Soekarno menginginkan agar kabinet yang terbentuk sebagai hasil pemilihan umum merupakan sebuah kabinet “kaki empat”, yang

---

<sup>65</sup> PKI mampu menduduki peringkat empat besar dalam perolehan suara, yakni dengan memperoleh 6.176.914 suara. Lihat M.C. Ricklefs, *op.cit.*, hlm. 496.

secara inti terdiri atas empat partai besar dan terkuat dengan memiliki jumlah massa besar, yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Masjumi, Nahdlatul Ulama (NU), dan tentu saja PKI.<sup>66</sup> Itu sebabnya, ketika Kabinet Ali Sastroamidjojo II terbentuk pada 20 Maret 1956, ia tidak segera mengesahkannya, karena Soekarno mencoba agar formatur Ali bisa menerima gagasannya untuk memasukkan PKI ke dalam kabinet.

**b. Ide dan Gagasan Hatta**

Hatta tidak dapat menerima teori demikian. Hatta lebih mementingkan kepada pembentukan “kader-kader”<sup>67</sup> demi keberlanjutan proses demokrasi. Tidak sekedar memanfaatkan kekuatan-kekuatan politik yang telah ada. Kaum komunis memang benar ikut berjuang, akan tetapi hal itu bukan berarti bahwa mereka juga harus mutlak perlu diajak serta duduk dalam pemerintahan. Sejarah telah membuktikan, kaum komunis jasadnya saja yang ada di bumi Indonesia, tetapi loyalitas dan kesetiaan mereka tertuju kepada Komunis Internasional, yakni komunis di seluruh dunia. Antara ke Rusia atau ke Cina, bila tidak ke Moskow, ke Peking.<sup>68</sup> Hatta mengingatkan, jika konsepsi Soekarno itu benar-benar dijalankan maka justru akan menjadi ‘boomerang’ bagi pemerintah.

Alasan Hatta tidak dapat menerima teori Soekarno cukup masuk akal.

Nampaknya, pandangan Hatta soal PKI berdasar atas pengalamannya ketika ia

---

<sup>66</sup> Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 477. Lihat pula Rikard Bagun, *op.cit.*, hlm. 96. Pada masa berjalannya Demokrasi Terpimpin konsepsi Soekarno yang menyatukan partai-partai besar di dalamnya, dikenal dengan konsepsi “*Nasakom*”, yakni penggabungan antara kekuatan Nasionalis, Agama, dan Komunis.

<sup>67</sup> Rikard Bagun, *op.cit.*, hlm. 375-377.

<sup>68</sup> \_\_\_\_\_, 1980, *Dwi Tunggal Soekarno Hatta*, Yayasan Idayu, Jakarta, hlm. 52.

studi di Belanda, terutama ketika Hatta mulai aktif dalam pergerakan-pergerakan yang bertaraf internasional. Dimana Hatta banyak bertemu dengan paham-paham serta ideologi-ideologi Barat yang kemudian cukup dikenalnya. Diantaranya tentu saja paham Komunis. Ada satu pengalaman yang membuat Hatta dengan Komunis kemudian berseteru, dan sejak itu kaum Komunis menganggap bahwa Hatta merupakan batu sandungan bagi gerakan Komunis.<sup>69</sup> Sedangkan Hatta juga tidak pernah percaya terhadap PKI. Tampaknya, persoalan itu turut dibawa oleh kaum Komunis Nasional (PKI) di dalam negeri.

Terlepas dari itu, yang perlu dipahami pula ialah sepertinya Soekarno lupa bahwa sebenarnya konsepsinya itu terlalu dipaksakan. Perlu diketahui bahwa kaum Agama dan kaum Komunis itu merupakan dua paham serta aliran yang berbeda. Oleh karena itu tidak akan pernah dapat disatukan. Apabila kabinet semacam ini benar terbentuk maka akan pasti ditolak oleh Masyumi dan NU. Jika berjalan pun, kepincangan-kepincangan yang justru akan terjadi di dalam pemerintahan. Hatta bahkan mengingatkan, jika di kemudian hari PKI benar-benar memenangi hati rakyat, bukan tidak mungkin Soekarno akan disingkirkannya.<sup>70</sup>

Oleh karena alasan itulah, mengapa Hatta sangat tidak setuju apabila Soekarno mencoba memasukkan PKI sebagai salah satu basis kekuatan dalam parlemen. Menurut Hatta, jika PKI akan dilibatkan dalam perpolitikan negara biarlah partai ini menjadi *partai oposisi* yang akan selalu mempertanyakan

---

<sup>69</sup> Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 67-68.

<sup>70</sup> Wawan Tunggal Alam SH, *op.cit.*, hlm. 289.

dan ikut mengontrol setiap kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian akan terjaga keseimbangan politik dalam pemerintah. Sebaiknya PKI ada di luar kabinet. Namun, nampaknya Soekarno tetap berpegang teguh pada gagasannya tentang mempersatukan segala unsur dalam masyarakat dengan maksud, demi tercapainya kesatuan nasional yang utuh dan berlandaskan atas kedaulatan rakyat. Namun, Hatta tetap melihat bahwa konsepsi Soekarno ini sebenarnya hanya demi memperkuat kedudukan serta kekuasaannya.

### **3. Dalam Memandang soal Demokrasi dan Sistem Pemerintahan**

Soal demokrasi, Hatta dengan Soekarno mempunyai pemikiran dan pandangan yang berbeda. Soekarno adalah seorang yang revolusioner, sedangkan Hatta seorang yang reformis. Soekarno sangat gandrung dengan persatuan, sedangkan Hatta memandang persatuan hanyalah sebagai alat untuk mencapai tujuan. Soekarno anti demokrasi parlementer, sedangkan Hatta pendukung demokrasi parlementer.

#### **a. Pemikiran Soekarno**

Soekarno mempunyai sebuah konsep demokrasi bagi Indonesia, yakni menganut prinsip musyawarah yang akhirnya menghasilkan mufakat. Menurutnya, demokrasi Indonesia adalah sosio-demokrasi dengan sebuah lembaga yang mewakili seluruh rakyat. Prinsip-prinsip gotong-royong perlu dimasukkan di dalamnya. Konsep demokrasi musyawarah untuk mencapai mufakat berarti pula harus adanya sikap saling mengalah untuk sampai pada mufakat. Sampai pada suara bulat atau berkompromi sampai mencapai

mufakat dan bukan atas dasar suara mayoritas. Oleh karena itu, Soekarno tidak menyukai demokrasi berdasarkan pemungutan suara (voting), sebab dalam pandangannya, sistem pemungutan suara seperti di negara-negara Barat yang didasarkan atas kehendak mayoritas adalah tidak adil. Menurutnya, cara ini dapat menimbulkan “tirani terhadap minoritas”.<sup>71</sup>

Soekarno memberi penjelasan dengan melihat kultur bangsa Indonesia yang sejak berabad-abad lalu sebelum Indonesia merdeka bukanlah kultur suara rakyat. Rakyat hanya menuruti *sabdo pandhito Ratu*, yakni kultur terpinpin. Hal ini dilihat dari sejak jaman Sriwijaya, Majapahit, dan kerajaan-kerajaan lain bahwa bangsa Indonesia ini tidak mengenal demokrasi. Karena itu, setelah Proklamasi, rakyat harus mengubah kultur warisan nenek moyangnya dengan mengadopsi demokrasi Barat. Kultur yang menjadi tinjauan Soekarno ini tampaknya berdasar kebudayaan Jawa yang sangat feodalistis. Tetapi, argumentasi lainnya adalah bahwa demokrasi terpinpin itu layaknya demokrasi dalam Islam yang mengenal lembaga *khalifah*, dimana khalifah harus dipilih oleh umat Islam, dan harus mampu melindungi seluruh umat Islam.

Slogan demokrasi dari rakyat untuk rakyat, selalu dijadikan ajaran untuk memaknai hakikat demokrasi. Soekarno memberi pandangan bahwa seharusnya demokrasi itu benar-benar memberi keuntungan kepada rakyat, bukan demokrasi yang dipakai oleh beberapa kelompok orang saja untuk

---

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 387.

mencari keuntungan.<sup>72</sup> Untuk itu, demokrasi harus memiliki disiplin dan harus mempunyai pemimpin. Oleh karena itu, Soekarno mencetuskan ide *demokrasi terpimpin*.

Menurut Soekarno, Demokrasi Terpimpin itu cocok dengan UUD 1945. Karena UUD 1945 menurutnya merupakan asli cerminan kepribadian bangsa Indonesia, sejak jaman purbakala-mula mendasarkan sistem pemerintahannya pada musyawarah dan mufakat dengan pimpinan satu kekuasaan sentral di tangan seorang “sesepuh” atau seorang tetua, yang tidak mendiktator tetapi “memimpin” dan “mengayomi”.<sup>73</sup> Oleh karena itu, demokrasi terpimpin menurutnya, cocok untuk iklim dan kultur rakyat Indonesia. Lebih lanjut Soekarno menjelaskan, Demokrasi Terpimpin ialah demokrasi, atau menurut istilah UUD 1945, ialah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.<sup>74</sup> Intinya, pemimpin dalam Demokrasi Terpimpin adalah permusyawaratan yang “dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan”, bukan oleh perdebatan dan penyiasatan yang diakhiri dengan pengaduan kekuatan dan penghitungan suara pro dan kontra yang tampak pada Demokrasi Liberal. Dengan demikian, menurut Soekarno, Demokrasi Terpimpin bukanlah diktator, kemudian berlainan dengan Demokrasi Sentralisme, dan berbeda pula dengan Demokrasi Liberal.

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 388.

<sup>73</sup> *Idem*.

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 389.

Dengan tegas pula Soekarno menegaskan bahwa Demokrasi Terpimpin bukanlah tujuan, tetapi alat.<sup>75</sup> Tujuan melaksanakan demokrasi terpimpin adalah mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur. Karena itu, menurutnya, masyarakat adil dan makmur tidak lain adalah masyarakat teratur dan terpimpin, yang terikat pada batas-batas tuntutan keadilan dan kemakmuran. Dengan demikian, pada hakikatnya Demokrasi Terpimpin, menurut Soekarno, adalah demokrasi penyelenggaraan atau demokrasi karya. Demokrasi yang perlu dihasilkan dengan bekerja dan bekerja, bukan hanya berbicara.<sup>76</sup> Soekarno menambahkan, bahwa dalam situasi transisi seperti ini sebenarnya yang diperlukan adalah sistem pemerintahan yang kuat dan stabil, dan hal itu dapat terjadi apabila pemerintahan Indonesia dijalankan dengan sistem presidensial, atau dalam bahasa Soekarno adalah Sistem Terpimpin.<sup>77</sup> Oleh sebab itu, Demokrasi Parle menter yang sedang berjalan, menurut Soekarno, bukanlah sitem demokrasi yang sesuai untuk bangsa Indonesia.

Prinsip dari Demokrasi Terpimpin itu sendiri adalah, melakukan perencanaan pembangunan dengan satu tindakan kuat dengan didukung kekuatan-kekuatan golongan terbesar dan berpengaruh di dalam masyarakat.<sup>78</sup> Untuk itu, menurut Soekarno, perlu disatukannya seluruh unsur-unsur atau golongan-golongan dalam masyarakat, yakni golongan Nasionalis, Islam, Tentara, bahkan Komunis. Prinsip ini yang kemudian nantinya memunculkan gagasan NASAKOM (Nasionalisme, Agamis, dan Komunisme).

---

<sup>75</sup> *Ibid*, hlm. 390.

<sup>76</sup> *Ibid*, hlm. 391.

<sup>77</sup> *Ibid*, hlm. 253.

<sup>78</sup> Nugroho Budisantoso, yang dikutip Rikard Bagun, *op.cit.*, hlm. 384.

Tampaknya penjelasan Soekarno tersebut dalam memunculkan gagasannya tentang Demokrasi Terpimpin, mengandung unsur ketidaksetujuan Soekarno terhadap sistem Demokrasi Parlementer, bahkan menunjukkan penolakan Soekarno terhadap gagasan Demokrasi Parlementer Hatta. Soekarno bahkan menuding bahwa Demokrasi Parlementer yang sedang berjalan merupakan demokrasi model Barat yang penuh dengan pertarungan bebas. Karenanya dapat mengancam persatuan dan keutuhan bangsa.

### **b. Pemikiran Hatta**

Menanggapi gagasan Soekarno tersebut, Hatta juga mempunyai pandangan serta pemikiran yang cukup mendasar pula. Hatta menegaskan bahwa dasar kedaulatan rakyat yang dijunjungnya tidak sama dengan parlementer seperti di Barat. Memang ada persamaan nama, tetapi tidak serupa. Hatta mengakui bahwa bangsa Indonesia boleh mengambil mana yang baik dari Barat, tetapi jangan ditiru melainkan disesuaikan. Bukan diadopsi melainkan diadaptasikan.<sup>79</sup>

Dalam mencari bentuk dan sifat demokrasi di Indonesia, Hatta menyetujui musyawarah, tetapi menolak mufakat. Menurutnya, musyawarah dinilainya merupakan cara-cara menolak sikap menang sendiri dan sikap diktatorial atau otoriter. Tetapi mufakat merupakan cara mengambil keputusan tanpa seorang atau beberapa orang menunjukkan perbedaannya. Karena itu,

---

<sup>79</sup> Wawan Tunggul Alam SH, *op.cit.*, hlm. 392.



mufakat memang mudah untuk dilakukan di desa-desa, akan tetapi tidak pada pusat-pusat pemerintahan yang mempunyai cakupan wilayah yang luas dan heterogen. Untuk membangun negara, perlu diterapkan dalam badan-badan perwakilan. Sistem perwakilan sangat tepat untuk Indonesia yang begitu besar dan luas. Sistem perwakilan, yang bisa memperlihatkan perbedaan pendapat, adalah tepat untuk sistem mayoritas. Oleh karena itu, sistem voting (penghitungan suara) lebih cocok untuk dilakukan. Namun, bukan berarti harus mengorbankan yang minoritas. Karena dalam sistem demokrasi yang demikian diperlukan adanya kerelaan serta kepercayaan pada keputusan bersama.

Menurut Hatta, hal inilah yang bisa membedakan dengan Demokrasi Barat yang lebih bersifat individualistis. Sedangkan dalam sistem totaliter, mufakat memang bisa terjadi, tetapi itu berlawanan dengan demokrasi asli Indonesia. Dalam rezim totaliter, musyawarah tidak akan berlangsung sebagaimana musyawarah yang sesungguhnya.

Bagi Hatta, kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, tetapi kemerdekaan merupakan jembatan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu caranya adalah melalui jalan demokrasi.

Untuk istilah demokrasi, Hatta mempergunakan kata *kedaulatan rakyat* dan *kerakyatan*.

Kedaulatan ada pada rakyat. Segala hukum (peraturan-peraturan negeri) haruslah bersandar pada Keadilan dan Kebenaran yang hidup di hati rakyat banyak, dan aturan penghidupan haruslah sempurna dan berbahagia bagi rakyat...<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 155.

Kata-kata Hatta tersebut mengandung arti bahwa cara untuk mengatur segala bidang kehidupan, baik itu cara untuk mengatur pemerintahan negara, cara mengatur perekonomian negara, semuanya harus dijalankan secara demokratis dan demi kepentingan rakyat. Kemudian, rakyat juga berarti sebagai suara mayoritas, tetapi dalam soal ini Hatta menggunakan istilah atau kata *mufakat*.<sup>81</sup> Artinya bahwa untuk memutuskan segala keputusan harus dilakukan secara musyawarah untuk mencapai suatu kesepakatan. Namun, dalam persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan bersama, Hatta mengatakan, diperlukan “keputusan dengan mufakat rakyat yang banyak”,<sup>82</sup> dalam arti keputusan berdasar dari suara rakyat banyak.

Menurut Hatta, konsep demokrasi di Indonesia berbeda dengan konsep demokrasi model Barat, dimana demokrasi di Barat bersandar pada individualisme.<sup>83</sup> Semangat individualisme ini yang membuat kapitalisme dapat bertumbuh subur di Barat. Dengan demikian, dalam hal ekonomi tetap berlaku dasar tidak sama. Sehingga terjadi kepincangan atau kesenjangan ekonomi dan sosial, dimana golongan ekonomi kuat mendominasi bahkan menentukan segala aspek kehidupan. Demokrasi yang seperti itu bukanlah demokrasi yang dimaksudkan Hatta karena tidak sesuai dengan Indonesia yang mendasarkan diri pada perikemanusiaan dan keadilan sosial. Disamping demokrasi politik, demokrasi ekonomi harus diwujudkan pula. Demokrasi yang ingin diwujudkan di Indonesia adalah demokrasi rakyat yang berbeda

---

<sup>81</sup> *Idem*

<sup>82</sup> *Idem*

<sup>83</sup> Sri Edi Swasono dan Fauzie Ridjal (Penyunting), 1992, *Mohammad Hatta: Beberapa Pokok Pikiran*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 120-121. Baca juga Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 159.

dengan demokrasi kapitalis di Barat. Oleh sebab itu, cita-cita demokrasi Indonesia adalah demokrasi sosial,<sup>84</sup> dimana demokrasi tersebut harus meliputi segala bidang kehidupan, baik ekonomi, politik, maupun sosial.

Demokrasi yang sesungguhnya menurut Hatta, adalah demokrasi yang berasaskan atas kedaulatan rakyat. Karena rakyat adalah yang utama, rakyat adalah jantung hati bangsa, dan rakyat yang menjadi ukuran tinggi rendahnya bangsa. Dalam demokrasi yang sesungguhnya pula, bahwa suara rakyat haruslah didengar, dan bila terjadi konflik antara rakyat dan penguasa, maka penguasa yang seharusnya mundur.

Kedaulatan rakyat yang dipikirkan Hatta tersebut, mengacu pada demokrasi yang sebenarnya dianggapnya telah ada dan terlaksana sejak lama dalam masyarakat Indonesia, terutama pada masyarakat desa. Dimana ini tercermin dalam hal rapat, yang terdapat unsur musyawarah dan mufakat, kemudian tradisi gotong-royong dalam melakukan segala pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan bersama, kemudian juga nampak dalam hal protes massa yang memungkinkan rakyat menolak peraturan yang tidak disetujuinya.<sup>85</sup> Dalam soal ini Hatta setuju dengan Soekarno. Ciri masyarakat Indonesia yang berdasar pada sifat kolektivitas seperti itu, bagi Hatta, merupakan dasar ide demokrasi yang sesuai bagi bangsa Indonesia. Masyarakat yang demikian merupakan wujud kedaulatan rakyat yang sesungguhnya.

---

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 121.

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 122-123. Baca juga Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 155. Baca juga Rikard Bagun, *op.cit.*, hlm. 164-165.

Namun, pada tingkat yang lebih luas atau tingkat nasional keadannya memang berbeda dengan di desa. Pada tingkat nasional jumlah warganya lebih banyak cakupannya dan wilayahnya pun lebih luas. Oleh sebab itu, demokrasi secara langsung memang tidak dapat dilakukan seperti di desa. Dengan demikian perlu adanya lembaga perwakilan rakyat dalam pemerintahan sebagai penyambung lidah rakyat atau penyalur aspirasi rakyat. Pemerintah terdiri dari orang-orang yang dipercaya oleh rakyat, tunduk pada perwakilan rakyat tadi. Suara rakyat untuk mengambil keputusan pun harus diperoleh melalui referéndum. Sehubungan dengan ini, Hatta membagi demokrasi Indonesia menjadi beberapa lapisan, yakni di tingkat desa, tingkat provinsi atau daerah, dan kemudian tingkat nasional.

Untuk mendukung serta menjamin pelaksanaan demokrasi di Indonesia, maka perlu adanya jaminan kebebasan bagi rakyat dalam segala aspek kehidupan. Hatta menekankan sekali perlunya sifat terbuka dalam masyarakat, termasuk pemimpin. Kemudian soal “karakter” atau watak, sangat diutamakan.<sup>86</sup> Karakter, menurut Hatta, merupakan watak yang teguh dan yang disertai oleh kemauan.<sup>87</sup> Orang yang berkarakter, menurutnya, adalah orang yang cinta akan kebenaran, dan berani mengatakan salah. Hal ini perlu dipupuk oleh bangsa Indonesia karena bangsa kita sering menutup-nutupi keadaan. Sikap ini menurut Hatta, tidak menguntungkan bagi perkembangan demokrasi. Untuk itu, keterusterangan dan keberanian sangat diperlukan. Selain itu, perlu jaminan akan kebebasan berserikat dan berorganisasi,

---

<sup>86</sup> Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 158.

<sup>87</sup> *Idem*

kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun melalui tulisan, serta hak akan protes secara masal atau protes massa. Apa pun yang dicita-citakan, menurut Hatta, kalau tekanan cita-cita itu pada rakyat, maka perlu rakyat dididik. Kedaulatan sendiri mendidik rakyat supaya tahu berpikir dan tidak terlalu bergantung pada pemimpinnya. Hatta sangat menekankan sekali peranan pendidikan dalam rangka mewujudkan demokrasi. Menurut Hatta pendidikan merupakan sarana yang dapat menumbuhkan kesadaran dan dapat mendewasakan rakyat dalam bersikap. Dengan demikian dapat mendukung jalannya demokrasi, karena rakyat telah memiliki kesadaran yang disertai dengan rasa tanggungjawab.

Pemikiran ide demokrasi di atas merupakan dasar pemikiran Hatta dalam mencetuskan ide “demokrasi kita”. Cukup jelas, bahwa menurut Hatta, pemikirannya tentang demokrasi di atas merupakan ide demokrasi yang sesuai bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan atau mencapai cita-cita bangsa yang adil, makmur, dan sejahtera. Jika mencoba memahaminya, ide demokrasi Hatta memang merupakan ide yang realistis atau ideal bagi bangsa Indonesia. Sepertinya Hatta benar-benar memahami dan mengerti apa yang menjadi keinginan serta kebutuhan rakyat Indonesia.

Pemikiran Hatta soal demokrasi pada intinya adalah bahwa demokrasi haruslah bersandar pada asas kerakyatan, yang mengandung arti bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Segala hukum atau peraturan-peraturan negara harus bersandar pada perasaan keadilan dan kebenaran yang ada dalam hati rakyat banyak. Asas kedaulatan rakyat inilah yang menjadi dasar

pemikiran demokrasi serta sistem Demokrasi Parlementer bagi Hatta. Demokrasi bukanlah tujuan, akan tetapi merupakan alat untuk mencapai tujuan, yakni kemakmuran dan keadilan. Untuk itu, bagi Hatta, selayaknyalah demokrasi itu berdiri di atas kepentingan dan kehendak rakyat.

Kemudian, Hatta juga menanggapi atas gagasan Soekarno di atas, bahwa pada dasarnya gagasan Soekarno merupakan suatu gagasan dan pemikiran yang baik, karena yang ingin dicapai adalah tujuan dan cita-cita bangsa. Namun, Hatta memberikan kritik pada Soekarno, bahwa konsepsi Soekarno soal demokrasi terpimpin tidak akan ada bedanya dengan sistem totaliter. Hatta menjelaskan bahwa penyatuan golongan-golongan seperti yang diinginkan Soekarno, justru akan menjadi boomerang. Karena mereka itu terdiri dari berbagai aliran yang pada dasarnya saling bertentangan satu sama lain, saling membatasi, dan saling menghambat.<sup>88</sup> Mereka dapat bekerjasama dengan musyawarah karena adanya Soekarno yang menentukan. Dalam keadaan seperti itu, tenaga-tenaga demokrasi dalam masyarakat terpaksa harus menunggu segala keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintahan Soekarno. Hatta menambahkan, bahwa selama politiknya didukung oleh aliran-aliran atau kekuatan-kekuatan politik terbesar jumlahnya dan golongan yang berkuasa, maka tenaga atau aliran demokrasi tidak akan mampu berbuat apa-apa.<sup>89</sup>

Hatta juga mencoba memandang berdasarkan tabiat dan pembawaan Soekarno. Hatta melihat bahwa cara pandang Soekarno tersebut hanya sampai

---

<sup>88</sup> Sri Edi Swasono dan Fauzie Ridjal (Penyunting), *op.cit.*, hlm. 118.

<sup>89</sup> *Idem*

pada tataran dasar permukaannya saja atau hanya garis besarnya saja. Tidak mencakup pada soal bagaimana pelaksanaan serta realisasinya. Sebab itu, menurut Hatta, apa yang dicita-citakan Soekarno dalam teori, kerap kali dalam pelaksanaannya atau dalam prakteknya sering jauh dari kenyataannya. Bahkan terkadang langkah-langkah yang diambilnya menjauhkan dia dari tujuannya.<sup>90</sup>

Oleh sebab itu, pada tahun 1955, Hatta menjelaskan kembali mengapa Indonesia harus memilih jalan demokrasi parlementer.<sup>91</sup> Demokrasi parlementer, menurutnya, bukan hanya mempunyai Parlemen sebagai wakil rakyat. Itu hanya alat untuk mencapai tujuan demokrasi. Demokrasi tidak ditunjukkan dengan adanya Dewan Perwakilan Rakyat atau yang hanya ditemukan di Istana Presiden atau di Kantor Perdana Menteri. Menurut Hatta, demokrasi adalah sesuatu yang harus menyinggung kehidupan rakyat dalam segala aspek kehidupan. Mendirikan parlemen dan peralatan parlementer hanya merupakan satu langkah ke arah pembangunan.

Oleh sebab itu pula, Hatta membela demokrasi parlementer dari tuduhan Soekarno yang mengatakan bahwa sistem ini menunjukkan demokrasi pertarungan bebas. Ia menyatakan bahwa sistem seperti ini tergantung pada kepemimpinannya yang bertanggungjawab. Demikian pula pada demokrasi terpimpin. Hatta menjelaskan kembali bahwa demokrasi parlementer bukanlah Demokrasi Parlementer seperti di Barat. Demokrasi Parlementer di Barat pada hakikatnya didasarkan pada kekuatan ekonomi, dan

---

<sup>90</sup> *Ibid*, hlm. 118-119.

<sup>91</sup> Wawan Tunggal Alam SH, *op.cit.*, hlm. 397.

lahir antara lain karena sudah adanya kekuatan ekonomi yang mapan.<sup>92</sup> Sehingga, Demokrasi Parlementer di Barat lebih mengutamakan aspek-aspek politik. Dalam ukuran tertentu, memang, bahwa perwakilan parlementer di Barat adalah ganjaran politik untuk kekuatan ekonomi yang telah dicapai, karena mereka yang kuat ekonominya berusaha melindungi kekuatan itu dengan alat-alat politik. Sedangkan di Indonesia, demokrasi mesti mengandung unsur pembinaan dan pelaksanaan ekonomi, demi mencapai kekuatan ekonomi tersebut (kemakmuran rakyat).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa perbedaan pemikiran antara Hatta dengan Soekarno sebenarnya cukup prinsipil. Antara Hatta dengan Soekarno mempunyai cara pandang serta gagasan yang berbeda soal wujud demokrasi yang sesuai bagi bangsa Indonesia. Perbedaan karakter, sifat, serta ditambah lagi latar belakang pendidikan berbeda, memberikan suatu prinsip dalam memberi warna dalam pemikiran di antara keduanya, yang saling bertolak belakang.

#### **4. Pandangan Hatta Terhadap Sikap Kepemimpinan Soekarno**

Perbedaan pandangan soal dasar pemikiran di atas, diperkuat dengan ketidaksenangan Hatta melihat cara kepemimpinan Soekarno serta sifat-sifat Soekarno sebagai Kepala Negara yang dipandang Hatta tidak pantas.

Sikap Soekarno yang tidak disenangi Hatta diantaranya adalah ketika Soekarno tidak mau menandatangani RUU pembatalan perjanjian Konferensi

---

<sup>92</sup> *Ibid*, hlm 397-398.



Meja Bundar (KMB) yang diajukan oleh Kabinet Burhanuddin pada tahun 1956 dengan alasan bahwa rapat DPR yang bersangkutan tidak sah. Padahal Mahkamah Agung sendiri telah mengemukakan bahwa rapat DPR yang bersangkutan sah.<sup>93</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Soekarno tampak bersikap sewenang-wenang dan tampak tidak mepedulikan konstitusi yang berjalan. Soekarno tampak tidak turut mendukung jalannya pemerintahan.

Kemudian sikap Soekarno yang juga tidak disenangi Hatta adalah soal Soekarno yang mulai pula sering bepergian ke luar negeri dalam waktu yang lama. Hatta melihat ketidakberesan perlawatan seorang kepala negara. Ada dua hal yang menyangkut dalam hal ini. Pertama, tingkah laku Soekarno seperti yang diungkapkan Mochtar Lubis, seorang wartawan kawakan, dengan mengatakan bahwa perlawatan Soekarno ke luar negeri menjadi sebuah hobi dan penuh cerita seks serta penghamburan uang negara.<sup>94</sup> Walaupun catatan ini dihubungkan dengan masa-masa kemudian, namun cerita seks dan rombongan besar sudah terdengar di tengah masyarakat soal perlawatan Soekarno ke luar negeri sejak tahun 1956. Kedua, perlawatan Soekarno itu membawa nama negara. Kalau sekiranya sikap dan perbuatan Soekarno yang bersifat pribadi selama lawatan tersebut masih bisa dibiarkan, dengan alasan bahwa itu adalah masalah pribadi. Namun, kenyataannya bahwa perlawatannya tersebut tidak lepas dari kedudukan negara dan membawa nama negara.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 476.

<sup>94</sup> *Idem*

<sup>95</sup> *Ibid*, hlm. 479-480.

Sikap Soekarno di atas dipandang Hatta sebagai sikap pemimpin yang mengarah pada sikap pemimpin yang otoriter. Sebagai Kepala Negara, Hatta melihat bahwa Soekarno tidak memperlihatkan sikapnya dalam mendukung jalannya pemerintahan, justru memperlihatkan sikap-sikap yang mengarah pada suatu konsep bahwa dirinya adalah seorang pemimpin negara yang mempunyai kekuasaan atas negara dan bangsa. Sikap ini yang tidak disenangi Hatta. Kedudukan sebagai Presiden ternyata dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Perbedaan pandangan soal dasar-dasar pemikiran di atas menjadi faktor penting bagi Hatta dalam mengambil sikap. Sepertinya Hatta dengan Soekarno memang sudah saling bertolak belakang dalam memandang bangsa dan negara ini. Keduanya mempunyai tujuan yang sama, yakni mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Bahkan soal sistem demokrasi sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Akan tetapi, keduanya mempunyai pandangan dan cara yang berbeda, terutama soal cara untuk melaksanakan demokrasi bagi bangsa Indonesia. Baik Hatta maupun Soekarno memiliki pemikiran serta gagasan yang berbeda soal demokrasi.

Faktor-faktor pendorong di atas merupakan faktor pendorong yang membuat Hatta mengambil keputusan untuk mundur. Banyak kekecewaan yang dirasakan Hatta pada masa-masa percobaan demokrasi tersebut. Di antara faktor-faktor tersebut, perbedaan pandangan Hatta dengan Soekarno merupakan faktor penting yang menentukan bagi Hatta dalam pengambilan keputusannya untuk mundur. Sebenarnya, Hatta bisa saja tetap

mempertahankan kedudukannya, atau paling tidak tetap mengambil peran dalam badan pemerintahan. Namun, tampaknya Hatta lebih memilih untuk mengalah dan mundur dari jabatannya. Meski demikian, Hatta turut merasa memiliki beban moral, meski Hatta tidak mampu berbuat apa-apa karena kedudukannya.

## **B. Jabatan Wakil Presiden Konstitusional Yang Tidak Memiliki Peran dan Fungsi Menentukan**

Pada tanggal 17 Agustus 1950 Indonesia kembali pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hatta dipilih kembali sebagai Wakil Presiden oleh DPR pada tanggal 14 Oktober 1950 tanpa perlawanan yang berarti.<sup>96</sup> Hatta mengungguli calon-calon lainnya dengan memperoleh 113 suara.<sup>97</sup> Dengan perolehan suara yang demikian, maka cukup jelas bahwa Hatta tetap merupakan tokoh yang dipercaya dan diharapkan mampu membawa perubahan bagi bangsa Indonesia. Hatta kembali mendampingi Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Sejak itu Hatta menjadi wakil kepala negara yang konstitusional, dalam arti ia tidak aktif dalam pemerintahan.

Pada masa ini, Indonesia sedang mencari bentuk dan sistem pemerintahan yang tepat bagi bangsa dan negara ini. Karena asas demokrasi ingin ditanamkan di Indonesia, maka di Indonesia pada masa ini dicoba dijalankan *Sistem Demokrasi Parlementer*. Maka, pada masa ini disebut

---

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm. 409.

<sup>97</sup> *Idem*. Termasuk calon lain adalah Ki Hajar Dewantara yang memperoleh 19 suara, Sjahrir, Sukiman, dan Yamin masing-masing memperoleh 2 suara; kemudian Baharuddin, Iwa Kusumasumantri, dan Nerus Ginting Suka masing-masing memperoleh 1 suara.

sebagai masa *percobaan demokrasi*. Dengan demikian, kedudukan Hatta sebagai Wakil Presiden yang konstitusional dapat dikatakan hanya sebagai simbol negara saja. Karena Hatta tidak mempunyai kekuasaan dan kewenangan seperti pada masa jabatan sebelumnya. Peran atau fungsinya hanya nampak pada keperluan-keperluan seremonial seperti pada perayaan Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus, pembukaan berbagai kegiatan seperti pada sidang parlemen, berbagai konferensi baik nasional maupun internasional, atau dalam pengesahan atau peresmian berbagai pembangunan-pembangunan, atau juga jika ditunjuk oleh DPR untuk mewakili Indonesia dalam lawatannya ke luar negeri, dan acara atau kegiatan semacamnya.<sup>98</sup>

Hatta tentu tidak aktif dalam mengatur pemerintahan. Hatta sangat menjaga kedudukannya dalam kabinet parlementer itu sebagai Wakil Presiden Konstitusional. Sehingga, yang dapat dilakukan Hatta dalam sistem pemerintahan yang demikian hanya mengemukakan nasihat atau anjuran, ataupun pertimbangan-pertimbangan bagi pemerintahan yang bersangkutan. Karena, keputusan yang menyangkut segala persoalan-persoalan negara tetap berada ditangan parlemen. Namun, dalam persoalan-persoalan atau hal-hal tertentu jika memang perlu adanya peran atau pertimbangan bahkan keputusan dari presiden ataupun wakil presiden, maka barulah Hatta dapat menunjukkan fungsinya dalam keadaan seperti ini atau dalam keadaan genting. Dalam hal ini presiden dan wakil presiden harus mentaati konstitusi atau undang-undang.

---

<sup>98</sup> *Idem*

Kemudian, apabila Hatta tidak setuju dengan kebijakan atau keputusan kabinet, sebagai Wakil Presiden Konstitusional Hatta hanya melayangkan surat mempertanyakan keputusan tersebut dan tidak turut menentukan keputusan. Jika ia turut langsung dalam sidang kabinet, maka peran yang paling mungkin dilakukannya adalah memberi saran atau juga pertimbangan. Tindakan yang paling jauh yang dapat dilakukan Hatta apabila menemukan ketidaksesuaian dengan tindakan yang dilakukan pemerintah, yakni memberi peringatan dengan mengingatkan pejabat atau kabinet yang bersangkutan.<sup>99</sup> Dengan demikian, jelas bahwa Hatta sangat mentaati kedudukannya dalam konstitusi, dan ia juga sangat menghargai jalannya demokrasi yang sedang berjalan di negara ini.

Dengan berjalannya masa demokrasi parlementer ini, maka persoalan demi persoalan mulai dihadapi oleh bangsa Indonesia. Hubungan Hatta dengan Presiden Soekarno pada tahun-tahun ini mulai tampak kurang sejalan, terutama karena Hatta melihat Soekarno bagai tidak bisa bertahan sebagai presiden kontitusional menurut Undang-Undang Dasar 1950. Hatta melihat bahwa Soekarno semakin ingin turut menentukan pemerintahan, yang tampak pada campur tangan Soekarno dalam pemerintahan, seperti yang akan diungkapkan pada pembahasan berikutnya.

Melihat peran dan fungsinya sebagai Wakil Presiden Konstitusional yang sebenarnya tidak diperlukan, maka Hatta memilih untuk mundur.

Disamping karena perseteruannya dengan Soekarno seperti yang telah dibahas

---

<sup>99</sup> Deliar Noer, 2002, *Mohammad Hatta: Hati Nurani Bangsa 1902-1980*, Penerbit Djambatan Perwakilan KITLV, Jakarta, hlm. 105.

dalam pembahasan sebelumnya. Hatta beranggapan bahwa tidak mungkin ia mampu turut mempertanggungjawabkan segala persoalan yang dihadapi bangsa ini secara moral kepada rakyat jika jabatannya sendiri tidak memungkinkan dirinya untuk mengambil suatu kebijakan atau tindakan, karena ia tidak mempunyai wewenang dalam mengambil keputusan. Seperti yang pernah diungkapkannya sejak dahulu bahwa ia merasa tidak perlu adanya jabatan Wakil Presiden dalam sistem Kabinet Parlementer.<sup>100</sup> Oleh karena itu, Hatta memilih untuk mundur. Namun, yang cukup mengherankan bahwa Hatta juga tidak lagi menginginkan jabatan apa pun dalam pemerintahan.

### C. Kecewa Terhadap Jalannya Pemerintahan

Sama seperti rakyat Indonesia pada umumnya, Hatta menghadapi tahun 1950-an<sup>101</sup> dengan penuh harapan, bahwa pemulihan kedaulatan akan membawa Indonesia kepada cita-cita yang selama ini diperjuangkan, berupa keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, dengan jabatannya pada masa demokrasi yang sedang dijalankan ini, Hatta sangat mengharapkan tegaknya konstitusi untuk dijalankan, aparatur pemerintahan yang bersih dan jujur sesuai konstitusi yang berlaku, dan pengabdian pada rakyat demi terwujudnya tujuan bersama. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa kemerdekaan adalah jalan atau jembatan untuk mencapai cita-cita

---

<sup>100</sup> Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 482.

<sup>101</sup> Penyebutan tahun "1950-an" digunakan untuk menyebut masa antara tahun 1950 hingga tahun 1956. Dimana tahun 1950 Hatta terpilih menjadi Wakil Presiden Konstitusional, dan mundur dari jabatan Wakil Presiden pada tahun 1956.

bangsa, yakni keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Oleh karena itu, seluruh golongan atau lapisan masyarakat hendaknya turut berperan aktif dalam mewujudkan kemerdekaan yang sesungguhnya, serta dalam menegakkan jalannya demokrasi.

Pada masa berlakunya demokrasi parlementer, Hatta mengharapkan melalui sistem ini demokrasi dapat berjalan seperti yang diharapkan oleh dirinya maupun oleh rakyat Indonesia pada umumnya. Diharapkan demokrasi dapat benar-benar mewujudkan keadilan sosial serta kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

Berkenaan dengan ini, Hatta sungguh memperhatikan bidang-bidang yang dianggapnya cukup penting demi mewujudkan cita-cita tersebut. Seperti soal kepegawaian, soal perekonomian, soal pendidikan, soal tentara (militer), dan yang cukup mendapatkan perhatian besar bagi Hatta adalah soal partai politik. Bidang-bidang tersebut menurut Hatta perlu terus dibina karena merupakan unsur yang cukup penting dalam rangka menegakkan demokrasi.

Akan tetapi, pada masa-masa ini Hatta melihat demokrasi parlementer yang sedang berjalan tidak tampak seperti yang diharapkan. Penyimpangan-penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan mulai tampak dan berkembang di negeri ini. Terutama sekali adalah soal korupsi dan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan. Hatta sangat mengecam praktek korupsi dan penyelewengan-penyelewengan, seperti yang ia ungkapkan kemudian kepada kawannya Jacobs melalui sebuah surat yang mengatakan, *“soal korupsi inilah tempo hari salah satu sebab yang penting, apa sebab*

*saya mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden”.*<sup>102</sup> Tindak korupsi atau penyelewengan yang terjadi, misalnya saja soal kepegawaian, pemberian grasi oleh Presiden, serta soal penyalahgunaan wewenang.

Masalah kepegawaian, misalnya seperti kasus pemecatan seorang pegawai, Sosrodanukusumo, pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo I.<sup>103</sup> Hatta tidak dapat memahami keputusan kabinet Ali tersebut. Tanpa meneliti, tanpa konsultasi atau dibicarakan oleh Hatta, Soekarno dengan sepihak menandatangani begitu saja surat pemecatan tersebut. Bahkan, yang bersangkutan tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Hatta sangat tidak dapat menerima jika pegawai-pegawai diperlakukan dengan tidak adil. Seperti yang diungkapkannya dengan mengatakan, bahwa *”saya tidak menerima pegawai-pegawai diperlakukan dengan sewenang-wenang, menyalahi segala aturan sehingga mereka tidak mempunyai jaminan hukum, tetapi dalam kedudukan saya sebagai Wakil Presiden konstitusional, saya hanya bisa mencela ke dalam, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa”.*<sup>104</sup>

Soekarno menandatangani pemecatan Sosrodanukusumo oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo I tahun 1955 tanpa konsultasi dengan Hatta. Kepada Perdana Menteri Ali, Hatta mengharapkan peninjauan kembali karena prosedur pemecatan juga tidak dilakukan dengan wajar. Hatta menghubungkannya dengan perikemanusiaan dari Pancasila. Kepada Soekarno yang tidak membicarakannya lebih dahulu soal ini dengannya, Hatta

---

<sup>102</sup> Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 474. Surat Hatta kepada Jacobs 20 November 1961.

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm. 476. Sosrodanukusumo adalah seorang pegawai tinggi kepolisian yang menjabat sebagai Kepala Jawatan Reserse Pusat pada Kejaksaan Agung dan Ketua Interdepartemental Peninjau Kepercayaan dalam Masyarakat (menangani soal Intel)

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm. 417.



pun mengatakan, *“kalau Saudara memandang Dwitunggal yang begitu banyak dibicarakan di waktu yang akhir ini lebih dari show saja, sebenarnya dalam hal-hal yang mengenai dasar-dasar negara Saudara sepatutnya berembuk dengan saya lebih dahulu, sebelum mengambil tindakan”*.<sup>105</sup>

Kemudian soal pemberian grasi kepada Menteri Kehakiman, Djody Gondokusumo oleh Presiden Soekarno, yang sebenarnya telah terbukti adanya tindak korupsi yang dilakukan Djody sewaktu menjabat sebagai menteri. Hatta tidak senang dengan sikap dan tindakan Soekarno yang menyimpang dari konstitusi dengan ikut mencampuri persoalan-persoalan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Perdana Menteri (PM) bersama kabinetnya, serta tampak tidak mendukung proses demokrasi. Melihat jabatan Soekarno sebagai Presiden Konstitusi, seharusnya ia menghargai dan taat pada konstitusi yang ada. Seharusnya Soekarno juga memberi kesempatan serta dukungan kepada kabinet agar dapat menjalankan tugas dan wewenangnya. Semua ini juga demi berjalannya proses demokrasi. Hatta juga kecewa terhadap Kejaksaan Agung pada masa Kabinet Wilopo. Pada tahun 1952, badan ini terbukti melakukan korupsi, yakni dengan melakukan pemberian persetujuan terhadap penyelundupan senjata oleh beberapa bekas pejuang.<sup>106</sup> Hatta kecewa karena Kejaksaan Agung yang seharusnya menjadi badan yang berkewajiban menegakkan hukum dan Undang-Undang, justru menggunakan kewenangan dan kekuasaan mereka demi keuntungan pribadi. Yang mengecewakan lagi bahwa korupsi, penyelewengan, dan penyalahgunaan

---

<sup>105</sup> *Ibid*, hlm. 475. Surat Hatta kepada Soekarno tanggal 25 Maret 1955.

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm. 416.

wewenang terus berkembang pada jajaran pemerintahan serta para pelaku politik, termasuk oleh partai-partai politik.

Kemudian soal partai politik, yang merupakan unsur penting dalam jalannya pemerintahan di Indonesia. Partai politik yang seharusnya menjadi alat untuk menyusun pendapat umum atau sebagai sarana penyalur aspirasi rakyat supaya rakyat belajar untuk bertanggungjawab sebagai pemangku negara maupun sebagai anggota masyarakat, namun apa yang didambakan dan diimpikan Hatta tentang demokratisasi di Indonesia ternyata tidak berjalan seperti yang dicita-citakannya. Pada kenyataannya, justru penyimpangan-penyimpangan yang banyak muncul dan banyak terjadi dalam perpolitikan di Indonesia. Hatta melihat bahwa partai-partai politik tidak menunjukkan sikap yang menggambarkan sikap sebuah negara demokrasi. Dalam pidatonya yang terakhir saat pengunduran dirinya, Hatta mengecam perilaku partai-partai yang didasarkan atas kepentingan pribadi yang sempit<sup>107</sup>.

Menurut Hatta, partai-partai politik seharusnya memperlihatkan sebuah cerminan dari demokrasi, bukan justru memperlihatkan persaingan antar partai demi kekuasaan dan demi keuntungan pribadi maupun partainya. Hatta melihat, yang berkembang pada masa-masa itu justru proses demoralisasi dan mulai hilangnya rasa tanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya. Segala macam pergerakan dan semboyan nasional (nasionalisme) digunakan dan dimanfaatkan sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi. Partai-partai politik yang ditunggangi oleh pihak-pihak berkepentingan untuk mencapai

---

<sup>107</sup> M.C. Ricklefs, *op.cit.*, hlm. 502.

kepentingan sendiri, menggunakan semboyan-semboyan nasionalisme dan demokrasi demi mencapai kepentingan mereka. Partai-partai menyuruh orang-orangnya untuk duduk di dalam kabinet sehingga lembaga pemerintahan hanya seperti suruhan partai saja.

Hatta memang merupakan salah satu pemrakarsa yang memberikan kesempatan bagi rakyat untuk mendirikan partai-partai politik. Hatta pula yang menandatangani Maklumat 3 November 1945 soal partai politik.<sup>108</sup> Motivasi dari disahkannya maklumat ini adalah agar memberi ruang bagi hak-hak politik rakyat serta untuk menegakkan demokrasi. Hatta memang menekankan sekali penegakan hak-hak politik rakyat, tetapi tidak berarti bahwa ia setuju begitu saja dengan jumlah partai politik yang begitu banyak. Yang terpenting adalah terjaganya kepentingan rakyat. Akan tetapi, pada masa demokrasi parlementer diberlakukan, Hatta tidak mampu dan tidak mempunyai kewenangan untuk membendung apalagi melarang jumlah partai politik yang semakin banyak.

Dari perkembangan keadaan, sikap dan kegiatan berbagai tokoh serta partai, dan penyelenggaraan pemerintahan di atas, banyak sekali yang mengecewakan Hatta. Terutama adalah kabinet yang belum mempunyai kewibawaan sehingga dalam menjalankan pemerintahannya dapat dengan mudah dipengaruhi oleh kelompok-kelompok ataupun para pemangku pemerintahan yang mempunyai kepentingan di dalamnya. Para pemimpin rakyat justru saling sibuk sendiri dengan urusan serta kepentingan mereka.

---

<sup>108</sup> Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 286-287.

Jabatan mereka dipersalahkan demi memperoleh keuntungan diri sendiri ataupun bagi kelompok mereka, sehingga kepentingan rakyat terlupakan. Dan pemerintahan menjadi pertarungan politik dan kepentingan antar kelompok dan golongan ataupun antar penguasa dan para pelaku politik. Semuanya tidak lebih demi memperoleh kekuasaan ataupun dalam rangka mempertahankan kekuasaan mereka. Tetapi semuanya ini bisa dikatakan merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia umumnya, dan bagi Hatta khususnya. Hatta sendiri dapat menghadapinya dengan kesabaran. Tetapi kekecewaan yang terbesar adalah kenyataan yang tak bisa ia hindarkan bahwa karena kedudukannya yang konstitusional, ia tidak dapat berbuat apa-apa.

Dari persoalan-persoalan tersebut dapat diketahui bahwa masa Demokrasi Parlemerter merupakan masa penuh kekecewaan bagi Hatta. Apa yang telah lama diperjuangkan ternyata tidak sesuai dan tidak seperti yang diharapkannya. Berbagai persoalan yang muncul pada masa-masa ini justru mengherankan bagi diri Hatta sendiri. Berbagai kepincangan dan penyelewengan hanya dapat dilihatnya saja. Jika bertindak itu pun hanya sebatas teguran atau peringatan. Hal-hal seperti yang telah sebagian diungkapkan di atas, membuat Hatta kecewa besar dan berat untuk turut memikul tanggungjawab karena ia sendiri tidak bisa berbuat apa-apa dengan kedudukan kontitusionalnya.

Dalam menghadapi hal-hal seperti itu, kekecewaannya bertambah besar, karena sahabatnya, Soekarno yang bersama-sama dia memproklamasikan kemerdekaan, kemudian menegakkan Republik Indonesia

di masa revolusi, serta sama-sama menduduki jabatan tertinggi negara sesudah penyerahan kedaulatan, bukan saja tidak sepaham dan sependapat dengannya, justru berselisih pendapat.

Faktor-faktor pendorong di atas merupakan faktor pendorong yang membuat Hatta mengambil keputusan untuk mundur. Banyak kekecewaan yang dirasakan Hatta pada masa-masa percobaan demokrasi tersebut. Di antara faktor-faktor tersebut, perbedaan pandangan Hatta dengan Soekarno merupakan faktor penting yang menentukan bagi Hatta dalam pengambilan keputusannya untuk mundur. Sebenarnya, Hatta bisa saja tetap mempertahankan kedudukannya, atau paling tidak tetap mengambil peran dalam badan pemerintahan. Namun, tampaknya Hatta lebih memilih untuk mengalah dan mundur dari jabatannya. Meski demikian, Hatta turut merasa memiliki beban moral, meski Hatta tidak mampu berbuat apa-apa karena kedudukannya.

### BAB III

#### PROSES PENGUNDURAN DIRI HATTA

#### SEBAGAI WAKIL PRESIDEN TAHUN 1956

Pada tanggal 1 Desember 1956 secara resmi Mohammad Hatta meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Alasan resmi yang dipergunakan Hatta untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden ialah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Konstituante hasil pemilihan umum 1955. Setelah pelantikan Konstituante, Hatta memberitahukan Presiden Soekarno bahwa secara resmi ia meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden pada tanggal 1 Desember 1956. Maksud serta keinginannya tersebut juga ia sampaikan kepada ketua DPR dan Kabinet.

##### A. Maksud dan Isu Pengunduran Diri Hatta

Sebenarnya desas-desus tentang maksud pengunduran diri Hatta telah muncul sejak tahun 1955, sebelum Soekarno berangkat ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji. Soekarno sendiri secara retorika menyinggung soal masalah ini dalam pidatonya di Yogyakarta pada tahun 1955 dengan mengatakan, bahwa tidak ada keretakan Dwi tunggal.<sup>109</sup> Oleh karena itu juga Hatta, sehubungan dengan rencana dua tokoh yang bekas menteri, Sutardjo Kartohadikusumo dan Wongsonegoro kepadanya Juli 1955, agar dibuat pengumuman bersama dengan Soekarno berisi penegasan bahwa “tidak benar

---

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm. 481.

Dwitunggal pecah”,<sup>110</sup> Hatta berpendapat bahwa lebih baik hal ini dibuktikan dengan tindakan nyata. Suatu pendapat yang menurut Hatta dibenarkan Sutardjo dan Wongsonegoro. Ketika Hatta melihat perkembangan yang kurang baik, sedangkan Soekarno akan keluar Indonesia untuk menunaikan ibadah haji, Hatta menggunakan kesempatan ini dengan menasihati sahabatnya ini dengan mengatakan<sup>111</sup> :

Dari mulai Saudara memakai pakaian ihram untuk mengerjakan tawaf pertama kali, hendaklah Saudara bulatkan makrifat kepada menunaikan haji dan menyingkirkan soal-soal di Indonesia dari pikiran Saudara. Sebagaimana biasa saya akan menghadapi segala perkembangan ini dari kedudukan saya yang konstitusional dan menimbang sesuatunya dengan ukuran yang objektif.

Namun, tanda-tanda mundurnya Hatta mulai terlihat sejak periode Juli-Desember 1956. Isyarat pengunduran dirinya, pernah diungkapkannya sendiri ketika diwawancarai oleh koresponden Belanda, Elsevier, yang kemudian dikutip harian *Merdeka*, 26 April 1956 dengan judul berita “*Wakil Presiden Hatta letakkan jabatan Agustus*”. Dalam berita *Merdeka* itu disebutkan bahwa Hatta berniat meletakkan jabatannya sebagai Wakil Presiden setelah pelantikan Konstituante (Agustus 1956). Ia juga menyatakan pendapatnya, bahwa selanjutnya Indonesia tidak memerlukan Wakil Presiden. Ketika ditanya apa yang akan dilakukannya setelah meletakkan jabatan, Hatta mengatakan bahwa dirinya berniat melanjutkan usahanya dalam mengembangkan koperasi.<sup>112</sup>

---

<sup>110</sup> *Idem*

<sup>111</sup> *Idem*. Surat Hatta kepada Soekarno tanggal 20 Juli 1955, sebelum Soekarno menunaikan ibadah haji.

<sup>112</sup> Wawan Tunggal Alam SH, *op.cit.*, hlm. 269.

Disamping itu, kira-kira bulan Juli 1956, Hatta juga pernah menyampaikan keinginannya meletakkan jabatan kepada Natsir, dan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa lagi terus berjalan dengan Soekarno. Akan tetapi, Natsir dan Halim membujuk Hatta supaya mengurungkan niatnya tersebut dan bersedia untuk tetap berada dalam pemerintahan. Maka, Hatta bersedia untuk tetap menjabat jabatan sebagai Wakil Presiden dan bekerjasama dengan Soekarno sampai enam bulan lagi.<sup>113</sup> Meski demikian, pada akhirnya keputusan Hatta ini hanya bersifat sementara saja.

Isu yang berkembang dalam masyarakat pada umumnya memandang bahwa maksud pengunduran diri Hatta dari jabatannya sebagai Wakil Presiden tersebut lebih dikarenakan hubungan antara Presiden Soekarno dan Hatta yang tidak lagi harmonis. Keduanya tidak lagi memiliki pandangan yang sama dalam memandang persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa, baik itu masalah politik maupun masalah ekonomi dan masalah sosial. Banyak kalangan yang mengatakan bahwa Dwitunggal telah retak dan berada diujung kehancuran. Sebenarnya, perbedaan-perbedaan pendapat ataupun pandangan antara Hatta dengan Soekarno bukanlah hal baru. Keduanya pernah berbeda pendapat pada masa pergerakan nasional, misalnya pada tahun 1932, yaitu dalam persoalan bentuk perjuangan yang *co* dan *non-kooperatif*.<sup>114</sup> Namun, keduanya masih dapat menghindari perpecahan diantara mereka. Akan tetapi, pada tahap selanjutnya ini, perseteruan atau perbedaan pendapat atau gagasan antara keduanya dapat dikatakan mencapai pada puncaknya, karena

---

<sup>113</sup> *Idem*. Lihat juga Mavis Rose, 1991, *Indonesia Merdeka: Biografi Politik Mohammad Hatta*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 310.

<sup>114</sup> Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 55-57.



tidak mampu disatukannya lagi antara Hatta dengan Soekarno, yang kemudian akan ditandai dengan pengunduran diri Hatta sebagai Wakil Presiden bahkan dari segala jabatan dalam pemerintahan.

## **B. Hatta Tetap Memilih untuk Mundur**

Alasan resmi yang dipergunakan Hatta untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden ialah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Konstituante hasil pemilihan umum 1955. Bersamaan dengan hasil pemilihan umum pada bulan Juli 1956, pada tanggal 20 Juli 1956 Hatta secara resmi mengirim surat kepada DPR bahwa ia akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden setelah DPR baru terbentuk. Surat yang diterima oleh DPR pada hari senin, 23 Juli 1956 tersebut berbunyi sebagai berikut:

Bersama ini saya beritahukan dengan hormat, bahwa sekarang, setelah DPR yang dipilih rakyat mulai bekerja dan Konstituante menurut pilihan rakyat sudah tersusun, sudah tiba waktunya bagi saya untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden.

Segera, sesudah Konstituante dilantik, saya akan meletakkan jabatan itu secara resmi.

Saat itu saya pilih, karena sesuai dengan penerimaan saya dahulu waktu diminta menjadi Wakil kembali, yang menurut dugaan saya di waktu itu jabatan sementara ini tidak akan lebih lama dari setahun dua tahun.<sup>115</sup>

Pada tanggal 21 Juli 1956, Hatta mengemukakan lebih terperinci maksudnya yang sama kepada Kabinet. Ia terlebih dahulu menulis surat kepada DPR, sebab menurutnya, DPR-lah yang telah memilih dirinya sebagai

---

<sup>115</sup> *Ibid*, hlm. 481-482.

Wakil Presiden. Dan dengan demikian, menurut Hatta, bahwa tanggung jawab moralnya tentang keselamatan negara dapat berakhir, setelah tanggung jawab atas pemerintahan negara sekarang terletak di tangan instansi yang dipilih oleh rakyat, dan sudah ada pula Konstituante yang meletakkan dasar-dasar yang tetap bagi pemerintah negara di masa datang.<sup>116</sup>

Hatta juga mengingatkan dalam suratnya kepada Kabinet bahwa sejak dahulu ia merasa tidak perlu jabatan Wakil Presiden dalam sistem kabinet parlementer. Bahkan ia juga mengatakan, bahwa Dwitunggal yang memang baik dan berguna pada permulaan revolusi nasional sampai tercapai pemulihan kedaulatan, tidak lagi sesuai dengan sistem pemerintahan yang seperti sekarang. Ia menunjuk pada pengalaman sejak beberapa tahun terakhir, sebagai pembenaran pendapatnya itu.

Segera setelah pelantikan Konstituante, Hatta memberitahukan Presiden Soekarno tentang maksud pengunduran dirinya, dengan mengatakan, “secara resmi ... bahwa pada tanggal 1 Desember ini [1956] saya letakkan jabatan saya sebagai Wakil Presiden”<sup>117</sup>. Hal yang sama ia sampaikan kepada ketua DPR dan Kabinet. Maka, terjadi kehebohan dalam masyarakat termasuk DPR. DPR segera mengirim suatu delegasi dari Panitia Permusyawaratan yang terdiri dari lima orang untuk lebih memahami isi surat Hatta tersebut di atas. Delegasi tersebut terdiri dari Arudji Kartawinata (PSII), K.H. Masjkur

---

<sup>116</sup> *Ibid*, hlm. 482.

<sup>117</sup> *Idem*

(NU), Hardi (PNI), Djaja Rachmad (Masjumi) dan P. Pardede (PKI).<sup>118</sup>

Panitia Permusyawaratan merasa “tidak rida, tidak puas” dan “tidak ikhlas”, dan oleh sebab itu “sangat berat”. Panitia Permusyawaratan yang ditunjuk oleh DPR tersebut, ditugaskan untuk mendekatkan kembali kedua tokoh ini. Namun, Panitia DPR yang bertugas mencari bentuk kerja sama diantara kedua tokoh tersebut tidak membuahkan hasil, karena Hatta tetap pada keputusannya, yakni memilih mundur dari jabatannya.

### C. Mengalah dan Memberi Kesempatan

Hatta juga menggunakan kesempatan tersebut untuk mengemukakan ketidakpuasannya terhadap perkembangan keadaan yang tidak dapat ia apakan karena kedudukan konstitusionalnya. Terutama soal ketidaksenangan Hatta terhadap sikap dan tindakan Soekarno. Faktor-faktor seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, yang telah cukup membuat Hatta kecewa, diperkuat dengan melihat cara kepemimpinan Soekarno serta sifat-sifat Soekarno sebagai Kepala Negara yang dipandang Hatta tidak pantas. Dalam pada itu, banyak tindakan Soekarno yang tidak dapat turut ia pertanggungjawabkannya. Hatta menilai, Soekarno lebih memperlihatkan sosoknya sebagai pemimpin rakyat daripada sebagai Presiden Konstitusional. Soekarno tampaknya tidak begitu mempedulikan pelbagai macam keterikatan jabatan, termasuk moral maupun hukum (konstitusi). Hal ini dibuktikan

---

<sup>118</sup> *Ibid*, hlm. 483.

dengan kegemaran Soekarno berbicara langsung kepada rakyat atau berpidato. Misalnya saja, pidato setiap 17 Agustus dari tangga Istana merupakan cermin pula dari hal ini. Kemudian, Soekarno juga pernah menuntut agar ia disetujui untuk membakar semangat rakyat dalam menghadapi soal Irian Barat tahun 1950-1951, tuntutan yang terpaksa secara tegas ditolak oleh Perdana Menteri Natsir. Atau juga pidato Soekarno di Amuntai, Kalimantan Selatan pada tahun 1953, dimana ia menganjurkan kepada rakyat agar menolak gagasan negara Islam.<sup>119</sup> Rapat-rapat umum pun juga dipergunakannya untuk ini. Ini menunjukkan bahwa tampaknya pidato-pidato semacam ini seakan lebih utama dari pada pidatonya di depan DPR.

Hatta menambahkan bahwa ia merasa dalam banyak hal dirinya seringkali tidak diajak berunding oleh Soekarno dalam memutuskan sesuatu hal dan dilampaui begitu saja oleh Soekarno. Akibatnya, moril Hatta merasa terlalu tertekan<sup>120</sup>. Sedangkan Soekarno sendiri tampaknya pada masa kabinet parlementer ia tidak merasa terlalu terikat dengan predikat *the President can do no wrong*. Padahal, sesuai UUDS 1950, kedudukan Presiden atau Kepala Negara tidak boleh mengambil tindakan sendiri dalam sesuatu hal. Hal ini selalu dan terus diingatkan Hatta kepada Soekarno, meski pada akhirnya kekecewaan yang didapat Hatta.

Melihat keadaan politik yang demikian, Hatta mengemukakan bahwa hanya ada dua kemungkinan cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini,

---

<sup>119</sup> *Ibid*, hlm. 475-476.

<sup>120</sup> *Ibid*, hlm. 484.

yakni “keluar dari pemerintah” atau “mengadakan coup atau kudeta” (merebut kekuasaan).<sup>121</sup> Namun, alternatif yang terakhir ini tampaknya sangat bertentangan dengan jiwa demokrat yang ada pada dalam diri Hatta. Hatta juga mengatakan bahwa dirinya tidak mau bentrokan dengan Soekarno.<sup>122</sup> Dirinya juga tidak pernah menghasut untuk melawan Soekarno dengan kekerasan dan menggantikan kedudukan Soekarno.<sup>123</sup> Maka, tidak ada pilihan lain bagi Hatta selain mengajukan pengunduran diri sebagai Wakil Presiden pada 1 Desember 1956. Bagi Hatta, ini merupakan pilihan yang tepat. Tampaknya bagi Hatta, memberikan kesempatan kepada Soekarno untuk menjalankan konsepsinya dan memberi kesempatan untuk membuktikannya merupakan jalan yang terbaik dan lebih bijaksana. Seperti yang diungkapkan Hatta kemudian dalam bukunya yang berjudul *Demokrasi Kita*, ia mengatakan:

Bagi saya yang lama bertengkar dengan Soekarno tentang bentuk dan susunan pemerintahan yang efisien, ada baiknya diberikan *fair chance* dalam waktu yang layak kepada Presiden Soekarno untuk mengalami sendiri, apakah sistemnya itu akan menjadi suatu sukses atau suatu kegagalan.... Ada ukuran yang objektif yang akan menentukan dalam hal ini. Tercapaikah atau tidak kemakmuran rakyat dengan itu, kemakmuran rakyat yang Soekarno sendiri juga menciptakannya dengan sepenuh-penuh fantasinya? Sanggupkah ia menahan kemerosotan taraf hidup rakyat dalam tempo yang singkat? Dapatkah ia menyetop inflasi yang terus-menerus dalam waktu yang tidak terlalu lama, inflasi yang membawa orang putus harapan?<sup>124</sup>

Jelas, bahwa Hatta sama sekali tidak ada keinginan bahkan niat untuk menggusur kedudukan Soekarno. Justru Hatta memilih untuk mengalah dan memberikan kesempatan pada Pemerintahan yang akan berjalan. Tampaknya

<sup>121</sup> *Idem*

<sup>122</sup> *Idem*

<sup>123</sup> Baca Mavis Rose, 1991, *Indonesia Merdeka: Biografi Politik Mohammad Hatta*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 336.

<sup>124</sup> Sri Edi Swasono dan Fauzie Ridjal (Penyunting), *op.cit.*, hlm. 118.

Hatta telah mempunyai pertimbangan yang matang akan maksud dan keputusannya tersebut.

#### **D. Hatta Resmi Berhenti dari Jabatan Wakil Presiden**

Dalam sebuah pertemuan bersama Parlemen, delegasi mengemukakan bahwa rakyat masih ingin melihat adanya Dwitunggal. Hatta menegaskan bahwa Dwitunggal yang tidak mempunyai kekuasaan tidak ada gunanya. Di Yogya, ketika masa revolusi, Dwitunggal itu memang perlu, karena mempunyai kekuasaan, tetapi sekarang tidak lagi.<sup>125</sup>

Hatta menambahkan, bahwa secara moral terlalu berat bagi dirinya turut bertanggungjawab, sedangkan ia tidak ada kekuasaan. Ia juga mengingatkan bahwa dengan konstitusi yang ada (UUDS 1950), wewenang Kepala Negara ataupun Wakil Kepala Negara tidak ada. Dan wewenang ini kalau pun diberikan oleh “rakyat” (menurut istilah, delegasi), Hatta tetap “tidak mau bertindak inkonstitusional”.<sup>126</sup>

Bagi Hatta sendiri pilihannya tetap, yakni mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden pada tanggal 1 Desember 1956. Sebagian anggota parlemen, dan masyarakat pada umumnya sungguh menyayangkan bahkan kecewa dengan keputusan tersebut. Salah satunya adalah seorang ulama tua dari kota kecil di Sumatera Utara, Syaikh Baringin di Tebingtinggi, dimana dalam suratnya kepada Hatta tanggal 6 Desember 1956 mengungkapkan bahwa tindakan Hatta itu menyedihkan hatinya terutama bagi dirinya sendiri dan

---

<sup>125</sup> Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 484.

<sup>126</sup> *Idem*

rakyat Sumatera pada umumnya.<sup>127</sup> Hatta menjawab bahwa dengan pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden, ia akan dapat lebih banyak bekerja untuk membangun masyarakat. Ia kemudian mengungkapkan kembali alasannya mundur kepada ulama tersebut dengan mengatakan, bahwa *“Dalam jabatan saya sebagai Wakil Presiden banyak terjadi hal-hal yang tidak dapat saya halangi, karena orang lain yang bertanggung jawab, sedangkan saya merasakan ikut serta memikul tanggung jawab morel sebagai orang yang duduk di pucuk”*.<sup>128</sup>

Pada akhirnya, DPR sendiri mengeluarkan pernyataan pada malam hari pengunduran diri Hatta tanggal 30 November 1956, yang menyatakan:<sup>129</sup>

1. terima kasih yang seikhlas-ikhlasnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa Mohammad Hatta terhadap Nusa dan Bangsa.
2. kepercayaan bahwa Mohammad Hatta akan tetap menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk kepentingan Rakyat dan Negara.

Dengan pernyataan yang dikeluarkan DPR tersebut menunjukkan bahwa DPR tidak mampu menghentikan langkah Hatta dalam keputusannya untuk mundur dari jabatan dalam pemerintahan.

Pada tanggal 5 Februari 1957, dengan keputusan no. 13/1957, Presiden Soekarno dihitung sejak 1 Desember 1956, dan dengan tata cara kenegaraan, secara resmi memberhentikan Hatta sebagai Wakil Presiden. Keputusan yang diambil Hatta ini menimbulkan banyak kekecewaan pada simpatisannya.

---

<sup>127</sup> *Ibid*, hlm. 485.

<sup>128</sup> *Idem*

<sup>129</sup> *Ibid*, hlm. 484-485.

Namun, dengan caranya, Hatta mengatakan bahwa sebagai warga negara ia akan tetap berusaha memberikan sumbangan bagi kepentingan rakyat dan negara. Seperti yang dikatakannya sebelum secara resmi ia mengundurkan diri, ia pernah berkata, *“setelah 11 tahun ikut serta membangun negara dan masyarakat dari atas, ingin pula ... menyumbangkan tenaga ... dari bawah sebagai orang biasa, terlepas dari suatu kedudukan yang resmi”*.<sup>130</sup>

Hatta mundur dari pemerintahan dalam usianya yang bisa dikatakan pada usia yang masih matang pemikirannya dan masih sangat produktif untuk aktif dalam karier pemerintahan.<sup>131</sup> Hatta mundur pada saat Indonesia berada pada masa-masa transisi dan penuh gejolak, dimana sedang membutuhkan seorang tokoh-tokoh yang mampu membawa perubahan bagi bangsa Indonesia, seperti Hatta.

Pada akhirnya Hatta memang mundur, namun tampaknya Hatta tetap terus dipenuhi oleh kekecewaan. Seperti yang diungkapkan oleh Prof. Kahin dari Universitas Cornell, yang menyatakan,

Hatta pasti kecewa karena harapannya tidak terwujud, tetapi ia telah meletakkan dasar-dasar yang diharapkan berkembang dengan sehat yaitu sistem kepartaian, sistem perwakilan, otonomi daerah serta ekonomi. Sistem tersebut tidak dilanjutkan secara konsisten sehingga korupsi politik dan ekonomi kian menjadi. Itulah tantangan Hatta yang menjadikan beban bagi dirinya.<sup>132</sup>

Cara dan alasan Hatta dalam mengambil keputusan untuk mundur, dapat dikatakan menunjukkan sikap seorang pemimpin yang bijak dan

---

<sup>130</sup> *Ibid*, hlm. 482.

<sup>131</sup> Hatta mundur pada usia 54 tahun.

<sup>132</sup> Tashadi, dkk., 1993, *Tokoh-Tokoh Pemikir Paham Kebangsaan*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, Jakarta, hlm. 59.



disamping itu juga menunjukkan seorang tokoh politik yang mengerti akan etika politik serta profesional. Hatta menunjukkan kebesarannya sebagai seorang pemimpin melalui sikapnya dalam mengambil keputusan mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden. Meski terdapat pertentangan dengan Soekarno serta kekecewaan Hatta terhadap pemerintah akan jalannya demokrasi, Hatta tetap menunjukkan kebesaran hatinya dengan mengatakan bahwa alasan dirinya mundur karena telah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Konstituante hasil pemilihan umum. Tampaknya Hatta tidak ingin menunjukkan perseteruannya dengan Soekarno di depan masyarakat. Menurutnya, pertentangan atau perseteruan terhadap hal-hal tersebut tidak dapat dilakukannya secara terbuka, karena pertentangan atau perseteruan secara terbuka akan menyebabkan ia dinilai melanggar konstitusi.<sup>133</sup> Apalagi jika perseteruan itu menjurus pada terjadinya konflik terbuka, hanya akan membingungkan rakyat. Padahal, rakyat melihat bahwa Soekarno-Hatta masih dipandang sebagai dwitunggal.<sup>134</sup>

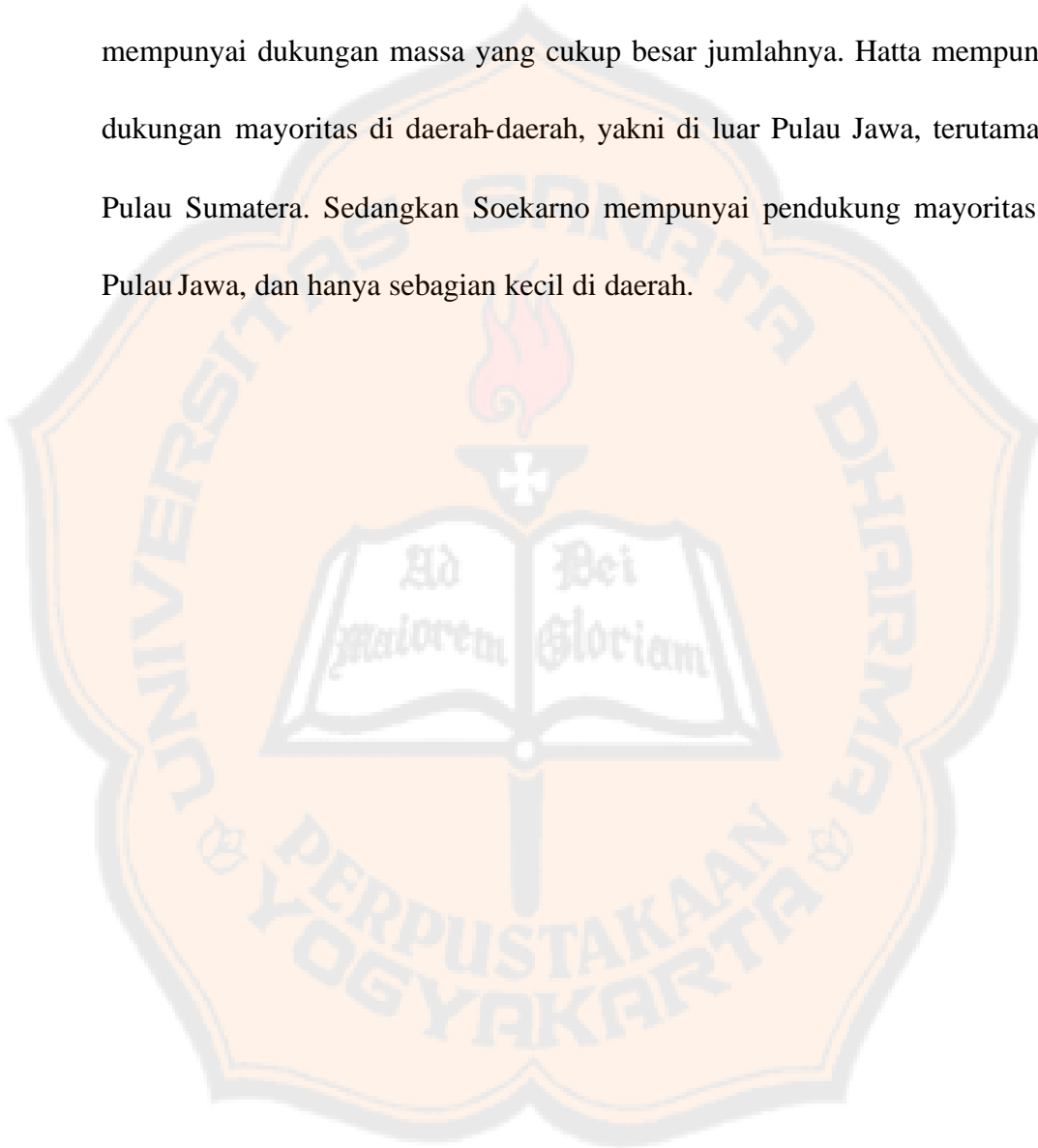
Demi menjaga keutuhan bangsa dan menjaga persatuan, dan demi menghindari timbulnya perpecahan akibat perseteruan antara dirinya dengan Soekarno, maka Hatta memilih untuk mengalah dan memilih mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden. Bahkan Hatta menarik dirinya dari segala jabatan dalam pemerintahan. Hatta juga menghindari bentrokan dengan Soekarno. Karena menurutnya, bentrokan dengan Soekarno akan dapat

---

<sup>133</sup> Deliar Noer, yang dikutip dalam Rikard Bagun, *op.cit.*, hlm. 97.

<sup>134</sup> *Idem*

memberikan dampak yang luas dalam masyarakat. Hatta tampaknya sadar betul bahwa bentrokan antara dirinya dengan Soekarno akan dapat menimbulkan perpecahan. Seperti yang diketahui bahwa masing-masing mempunyai dukungan massa yang cukup besar jumlahnya. Hatta mempunyai dukungan mayoritas di daerah-daerah, yakni di luar Pulau Jawa, terutama di Pulau Sumatera. Sedangkan Soekarno mempunyai pendukung mayoritas di Pulau Jawa, dan hanya sebagian kecil di daerah.



**BAB IV**  
**PENGARUH PENGUNDURAN DIRI HATTA**  
**BAGI PEMERINTAH**

Pengunduran diri Hatta sebagai Wakil Presiden ternyata membawa pengaruh yang tidak terduga sebelumnya bagi pemerintah Indonesia. Pertama, mundurnya Hatta mengakibatkan semakin meningkatnya pertentangan di daerah-daerah terhadap pusat yang berpotensi terjadinya pemberontakan. Terutama daerah Sumatera dan Sulawesi. Dalam seruan mereka, ada unsur kesetiaan Sumatera kepada Hatta. Kedua, dengan mundurnya Hatta itu berarti Soekarno menjadi pemimpin tunggal bangsa Indonesia dan tentu akan menjalankan konsepsi Demokrasi Terpimpin-nya.

**A. Pemberontakan-Pemberontakan di Daerah**

Setelah Hatta mundur, di daerah-daerah semakin meningkatkan tuntutan-tuntutan mereka terhadap Pemerintah Pusat. Disamping tuntutan mereka soal otonomi daerah, persoalan berhentinya Hatta dari jabatan Wakil Presiden juga mulai menjadi persoalan bagi daerah. Mereka beranggapan bahwa dengan berhentinya Hatta sebagai Wakil Presiden itu berarti terlemparnya tokoh “*luar Jawa*” yang paling dikagumi dari Pusat Pemerintahan.<sup>135</sup> Hal ini yang semakin menimbulkan kecemasan bagi daerah (luar Jawa) bahwa nantinya pemerintahan akan di isi oleh pejabat-pejabat

---

<sup>135</sup> M.C. Ricklefs, *op.cit.*, hlm. 502.

yang didominasi dari Jawa. Tidak hanya itu, orang-orang luar Jawa juga mulai merasa cemas terhadap suatu sistem pemerintahan kolaborasi Soekarno – Komunis (PKI) – Partai Nasional Indonesia (PNI) – Islam (NU), suatu pemerintahan Jawa dan kaum radikal yang saling bertentangan, dan tentu akan mengancam mereka.<sup>136</sup>

Hatta terus memperoleh kepercayaan dari daerah-daerah luar Jawa sebagai seorang pemimpin yang diharapkan tampil kembali dalam pemerintahan untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Tidak hanya penyelesaian persoalan daerah, tetapi juga persoalan-persoalan di Tanah Air pada umumnya. Meskipun Hatta adalah salah seorang pemimpin nasional, namun bagi daerah, Hatta adalah “*putra (anak) daerah*”.<sup>137</sup> Oleh karenanya, pengunduran diri Hatta dari kedudukannya sebagai Wakil Presiden tampaknya dipandang oleh orang-orang daerah sebagai suatu kehilangan besar bagi mereka. Mereka merasa bahwa tempat untuk bergantung telah lepas.<sup>138</sup>

Menyusul pengunduran diri Hatta tersebut, pada bulan Desember 1956 para perwira tentara di Sumatera, yang kebanyakan dari mereka adalah veteran-veteran dari bekas Divisi Banteng dari masa Revolusi,<sup>139</sup> mengambil keputusan untuk melawan Jakarta dengan dukungan kaum sipil setempat. Panglima daerah, Letnan Kolonel (Letkol) Ahmad Hussein, yang bertindak

---

<sup>136</sup> *Ibid*, hlm. 503.

<sup>137</sup> Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 486.

<sup>138</sup> *Idem*

<sup>139</sup> Divisi Banteng merupakan unit tempur utama di Minangkabau selama Revolusi (1945-1949). Pada tanggal 20-24 November 1956, berlangsung reuni Divisi Banteng, yang kemudian dibubarkan oleh Nasution. Namun, sebelum reuni tersebut berakhir diambil sebuah keputusan untuk membentuk “Dewan Banteng” yang akan melakukan tekanan terhadap reformasi, terutama untuk meningkatkan negara dan kepemimpinan Angkatan Darat. Lihat Mavis Rose, 1991, *Indonesia Merdeka: Biografi Politik Mohammad Hatta*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 319.

selaku ketua Dewan Banteng, secara resmi mengambil alih tanggungjawab sementara pemerintahan di Sumatera Tengah. Pada tanggal 20 Desember, komandan resimen di Sumatera Barat mengambil alih pemerintahan sipil. Dua hari kemudian, tanggal 22 Desember, pimpinan Panglima Militer Angkatan Darat M. Simbolon mengumumkan pengambilalihan kekuasaan di Sumatera Utara. Ia mengumumkan bahwa negara berada dalam keadaan darurat perang.<sup>140</sup> Simbolon menekankan, bahwa ia tidak menghendaki separatisme, tetapi ingin meningkatkan situasi bangsa dan rakyat Indonesia dengan menyerahkan kekuasaan pemerintah kepada pemimpin nasional, yang dengan kejujuran dan integritasnya dapat membangun bangsa, merdeka dari nafsu kekuasaan dan keuntungan diri sendiri.<sup>141</sup> Untuk itulah, Simbolon menghimbau pemulihan Dwitunggal dengan menyatakan, “adalah keyakinan kami... bahwa Dwitunggal tidak lagi hanya bertindak semata-mata sebagai simbol, tetapi harus berfungsi sebagai kekuatan pendorong, dengan pembagian tugas yang cermat”.<sup>142</sup>

Dari pernyataan Simbolon tersebut mengandung makna penting, bahwa mereka masih menginginkan Hatta untuk tetap berada pada pemerintahan. Simbolon menyarankan supaya Hatta diberi jabatan yang setara dengan kekuasaan baru Soekarno, dalam rangka memulihkan perwujudan konsep Dwitunggal.

Tidak lama kemudian, Sumatera Selatan mengikuti contoh yang diberikan oleh dua propinsi sebelumnya. Panglima Angkatan Darat Sumatera

---

<sup>140</sup> Mavis Rose, *op.cit.*, hlm. 320. Lihat juga M.C. Ricklefs, *op.cit.*, hlm. 503.

<sup>141</sup> *Ibid*, hlm. 320.

<sup>142</sup> *Idem*

Selatan, Barlian, membentuk Dewan Garuda, dan memaksa gubernur sipil di sana (yang merupakan orang Jawa) supaya setuju dengan pemerintahan daerah yang berdiri sendiri dan supaya segera memulai langkah-langkah otonomi.<sup>143</sup> Dewan-dewan militer di Sumatera dengan cepat mendapat dukungan dari rakyat karena melakukan pembaruan-pembaruan.<sup>144</sup>

Ketika Soekarno melakukan perjalanan ke luar negeri, para panglima pemberontak Sumatera dan Sumual dari Sulawesi bertemu dengan para pemimpin politik seperti Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, dan Sumitro Djojohadikusumo di Sungai Dareh, sebuah kota kecil dekat perbatasan Sumatera Barat-Jambi, antara tanggal 9 dan 13 Januari 1958. Mereka menyusun rencana untuk membentuk sebuah pemerintah alternatif Indonesia yang berpusat di Bukittinggi. Sjafruddin Prawiranegara ditunjuk sebagai Perdana Menteri (seperti halnya pada tahun 1949).<sup>145</sup>

Hatta menolak dengan tegas tindakan kaum pembangkang yang membentuk pemerintahan tandingan.<sup>146</sup> Meskipun Hatta tidak setuju dengan tindakan pemerintahan kaum pemberontak, namun seorang wartawan Inggris, James Mossman, dalam wawancara dengan para pemimpin pemberontak, mengemukakan bahwa kelompok pemberontak tampaknya berharap Hatta akan bergabung dengan mereka jika pemerintahan tersebut sudah terbentuk.<sup>147</sup>

Simbolon sendiri menyatakan, ‘jika kami menunggu Hatta supaya bertindak

---

<sup>143</sup> *Idem*. Lihat juga M.C. Ricklefs, *op.cit.*, hlm. 503.

<sup>144</sup> Ricklefs, *op.cit.*, hlm. 503.

<sup>145</sup> Wawan Tunggul Alam SH, *op.cit.*, hlm. 279. Lihat juga Mavis Rose, *op.cit.*, hlm. 330.

<sup>146</sup> Mavis Rose, *op.cit.*, hlm. 330-331.

<sup>147</sup> *Idem*

melawan Soekarno, kami akan menunggu ratusan tahun, tetapi kalau kami mengambil inisiatif sendiri, Hatta akan ikut.” Natsir pun mempunyai pernyataan yang sama.<sup>148</sup>

Akhirnya para pemberontak memang melancarkan pemberontakan mereka dengan membentuk pemerintahan tandingan dan mengajukan tuntutan-tuntutan serta tekanan terhadap pemerintah pusat. Pada tanggal 15 Februari 1957 terbentuk *Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia* (PRRI). Meski pada akhirnya pemberontakan ini dapat dipadamkan.

Pembelotan tidak hanya terjadi di Sumatera. Pada tanggal 2 Maret 1957, menyusul daerah Sulawesi Selatan. Panglima wilayah Sulawesi Selatan dan untuk Indonesia Timur, Letnan Kolonel H.N.V. Sumual, mengumumkan keadaan darurat perang di seluruh wilayahnya dari markas besarnya di Makasar.<sup>149</sup> Dengan demikian, secara teoritis dia mengambil alih semua kekuasaan sipil dari Bali sampai Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Sumual kemudian memproklamkan “*Piagam Perjuangan Semesta*” atau *Permesta*. Sebuah deklarasi yang mendukung otonomi daerah dan ungkapan ketidaksetujuan terhadap pemerintahan di Jakarta. Deklarasi ini menjelaskan, bahwa apabila Dewan Nasional<sup>150</sup> dan Kabinet Gotong Royong yang diusulkan ingin memperoleh dukungan, maka harus dipimpin secara bersama-

---

<sup>148</sup> *Idem*

<sup>149</sup> Ricklefs, *op.cit.*, hlm. 505. Lihat juga Mavis Rose, *op.cit.*, hlm. 320.

<sup>150</sup> Dewan Nasional, yang akan dipimpin oleh Soekarno sendiri, adalah badan penasehat yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil aliran dan kelompok fungsional (seperti pengusaha, buruh, tani, manteri, termasuk kepala staf tentara) di Indonesia. Keanggotannya dicalonkan, bukan hasil dari pemilu. Tetapi, Dewan Nasional akan lebih diutamakan daripada parlemen yang dipilih oleh rakyat. Konsep ini digulirkan oleh Soekarno pada Februari 1957.

sama oleh Soekarno dan Hatta.<sup>151</sup> Seperti halnya Sumatera, tampaknya Permesta juga menunjukkan adanya unsur kesetiiaannya kepada Hatta, meski yang diinginkan adalah kembali bersatunya antara Soekarno dan Hatta. Mereka menginginkan Hatta tetap barada dalam pemerintahan dan mempunyai kedudukan yang setara dengan Soekarno.

Jika melihat ke belakang, sikap para panglima militer daerah tersebut tampaknya lebih banyak disebabkan oleh konflik intern di tubuh Angkatan Darat yang sudah ada sejak 1952,<sup>152</sup> lalu muncul kembali. Kemunculannya dimulai dari keinginan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Mayor Jendral Nasution untuk menegakkan kewibawaan Markas Besar Angkatan Darat (MBAD) terhadap para panglima daerah yang relatif mandiri (seolah otonomi), dengan cara memindahkan mereka ke posisi yang baru.<sup>153</sup>

Kebijakan Nasution tersebut ditentang para perwira senior yang kedudukannya mulai terancam. Untuk itu, mereka mencari dukungan dari luar Angkatan Darat, seperti melalui partai politik di parlemen, dan termasuk Hatta. Oleh sebab itu, ketika Nasution mulai memindahkan beberapa panglima daerah dan perwira senior lainnya, mereka yang pernah kecewa bersedia melakukan suatu tindakan tertentu, termasuk melakukan pemberontakan,

---

<sup>151</sup> Mavis Rose, *op.cit.*, hlm. 320.

<sup>152</sup> Pada tahun 1952 terjadi "Peristiwa 17 Oktober", yakni demonstrasi tentara pusat dengan membawa tank-tank serta artileri dan banyak demonstran sipil. Peristiwa ini disebabkan oleh persoalan rencana sentralisasi dan demobilisasi oleh pemerintah pusat (kabinet Wilopo) untuk mengurangi jumlah anggota tentara, yang ditentang oleh panglima tentara daerah. Di dalam DPR muncul tuntutan agar kepemimpinan tentara pusat dibubarkan. Persoalan ini tampak seperti mengadu domba antara kelompok tentara pusat dengan para panglima tentara daerah. Lihat Ricklefs, *op.cit.*, hlm. 486-487.

<sup>153</sup> Strategi Nasution adalah dengan menjatuhkan posisi Simbolon di Sumatera Utara dengan menunjuk seorang perwira komando yang berbeda suku dan agama. Dalam kasus Hussein, karena homogennya wilayah Minangkabau dan tingginya dukungan untuk Dewan Banteng, maka Nasution hanya bisa membujuk dan berunding. Lihat Mavis Rose, *op.cit.*, hlm. 352.



sekalipun mereka tidak menghendaki separatisme. Mereka berharap, jika tuntutan mereka terpenuhi, akan ada pemimpin pemerintahan yang pemikirannya sejalan seperti halnya dalam soal otonomi. Dan orang itu tidak lain adalah Hatta, yang telah lama mempunyai pemikiran soal otonomi.<sup>154</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengunduran diri Hatta dari jabatan Wakil Presiden menjadi alat yang semakin memperkuat tuntutan akan otonomi di daerah-daerah. Dengan melihat potensi atau sumber daya alam (SDA) yang melimpah di setiap daerah mereka, maka mendorong kaum sipil di daerah untuk menuntut otonomi yang jauh lebih besar. Sedangkan kalangan militer daerah, seperti di Sumatera, mempunyai latar belakang suatu persoalan yang tidak kunjung dapat segera terselesaikan.

Krisis daerah tersebut menyebabkan muncul seruan-seruan supaya dibentuk suatu kabinet nonparlementer yang dipimpin oleh Hatta, yang dianggap merupakan satu-satunya orang yang dapat memuaskan rakyat daerah, terutama Sumatera.<sup>155</sup> Sementara perundingan-perundingan antara kelompok-kelompok tentara daerah (terutama Sumatera) dengan Jakarta terus berlangsung, semakin banyak dewan-dewan perwira bermunculan di Kalimantan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, serta Maluku yang turut serta ikut menuntut otonomi yang lebih besar dari Jakarta.<sup>156</sup>

Sebenarnya, untuk menanggapi tuntutan panglima-panglima daerah yang memberontak itu, Nasution (juga Masyumi) pernah mendesak Soekarno supaya membujuk Hatta untuk bersedia kembali ke pemerintahan, tetapi tidak

---

<sup>154</sup> Wawan Tunggul Alam SH, *op.cit.*, hlm. 275.

<sup>155</sup> Ricklefs, *op.cit.*, hlm. 504.

<sup>156</sup> *Idem*

ditanggapi oleh Soekarno.<sup>157</sup> Ketika kini persoalan menjadi lebih buruk dan pecahnya Dwitunggal semakin menjadi persoalan publik, maka untuk meredakan ketegangan akan isu pecahnya Dwitunggal, Soekarno memberi kuasa kepada Kabinet Djuanda untuk menawarkan kepada Hatta kedudukan sebagai Ketua Badan Perencanaan Nasional, tetapi Hatta menolak tawaran tersebut.<sup>158</sup>

Untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut, pernah pada tanggal 10 September 1957, atas prakarsa Perdana Menteri (PM) Djuanda diselenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) sebagai upaya menyatukan kembali Soekarno dan Hatta. Wakil-wakil sipil dan militer dari setiap daerah diundang, termasuk wakil-wakil para pemberontak di Sumatera dan Sulawesi.<sup>159</sup> Menjelang Munas, kelompok pembangkang berkumpul di Sumatera Selatan untuk menyiapkan tuntutan mereka, dan akhirnya melahirkan “Piagam Palembang”.<sup>160</sup> Isi dari piagam ini adalah menghimbau dipulihkannya Dwitunggal, perubahan-perubahan dalam kepemimpinan tentara di pusat, otonomi daerah, dan pengubahan Dewan Nasional yang baru menjadi Senat. Munas (14 September 1957) menghasilkan sebuah “ikrar bersama” yang ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta, yang mendukung

---

<sup>157</sup> Wawan Tunggal Alam SH, *op.cit.*, hlm. 276. Nasution siap untuk mempertahankan Hatta dalam Dwitunggal, dengan menyatakan: “Dalam kalangan pimpinan Angkatan Darat, kami semua sepakat bahwa persoalan dwitunggal akan membahayakan persatuan nasional”. Lihat A.H. Nasution, “Bung Hatta Teladan Konsistensi Pada Prinsip-Prinsip”, dalam Meutia Farida Swasono, 1980, *Bung Hatta: Pribadinya dalam Kenangan*, Penerbit Sinar Harapan dan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 372.

<sup>158</sup> *Ibid*, hlm. 277-278. Djuanda merupakan Perdana Menteri yang ditunjuk Soekarno untuk memimpin formatur kabinet bentukan Soekarno, yang disebutnya “Kabinet kerja darurat ekstra parlementer”.

<sup>159</sup> Mavis Rose, *op.cit.*, hlm. 327.

<sup>160</sup> *Idem*

pembangunan bangsa dan Pancasila. Namun, tampaknya ikrar tersebut hanyalah sebuah ikrar tanpa tindak lanjut yang berarti. Begitu pula ketika Munas mengangkat Panitia Tujuh, yang terdiri atas Soekarno dan Hatta, Djuanda, Hamengkubuwono, Leimena, Azis Saleh, dan Nasution, untuk menyelesaikan persoalan di tubuh Angkatan Darat (AD).<sup>161</sup> Pengangkatan Nasution sebagai KSAD tidak disetujui oleh kelompok pemberontak di daerah-daerah, sehingga sulit mencapai hasil yang maksimal. Bahkan, kerja Panitia Tujuh ini akhirnya juga tidak ada hasilnya.

Hasil Munas tampaknya tidak memberikan keuntungan bagi daerah. Rasa tidak puas terhadap hasil Munas diperlihatkan dengan dikeluarkannya “Realisasi Piagam Persetujuan Palembang” yang ditandatangani oleh Letkol Barlian, Letkol Ahmad Hussein, dan Letkol H.N.V. Sumual, yang isinya berupa tuntutan pergantian KSAD, melepaskan dan meniadakan mitos dwitunggal, serta memperjuangkan terlaksananya pemilihan Presiden RI yang baru.<sup>162</sup>

Menanggapi situasi tersebut, kemudian pernah juga diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap) pada bulan November 1957, yang dipimpin langsung oleh Soekarno dan Hatta. Tetapi, Sumatera Tengah yang dipimpin oleh Letkol Hussein tidak mengirimkan wakilnya sama sekali. Begitu pula dengan Nasution yang tidak hadir dalam Munap tersebut. Dengan

---

<sup>161</sup> Wawan Tunggal Alam SH, *op.cit.*, hlm. 278.

<sup>162</sup> *Ibid*, hlm. 278-279. Lihat juga Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 525.

demikian, maka Munap pun kembali tidak membuahkan hasil.<sup>163</sup> Dan tidak diterimanya tuntutan daerah-daerah tersebut, membangkitkan pembangkangan yang semakin memuncak.

Pengunduran diri Hatta sebagai Wakil Presiden (dari pemerintahan) tampaknya memang mendapat simpati dari rakyat di daerah, sampai terjadinya pemberontakan di daerah. Dalam pernyataan-pernyataannya, mereka memang mengangkat persoalan mudurnya Hatta dan meminta supaya perwujudan konsep dwitunggal dipulihkan kembali. Tidak hanya itu, mereka juga meminta supaya Hatta diberi jabatan yang setara dengan kekuasaan baru Soekarno. Bahkan menuntut hak otonomi daerah. Muncul sebuah pertanyaan, apakah benar tuntutan itu merupakan sebuah aspirasi murni dari kehendak mereka yang tidak puas dengan pengunduran diri Hatta dan menginginkan Hatta kembali menjadi pemimpin pemerintahan, ataukah mundurnya Hatta ini hanya menjadi sebuah alat untuk melegitimasi tuntutan-tuntutan mereka akan kepentingan daerah. Namun, terlepas dari itu, bahwa pada faktanya pengunduran diri Hatta memang menimbulkan suatu dampak bagi pemerintahan Indonesia, yakni terjadinya gejolak di daerah-daerah. Dengan demikian, menunjukkan bahwa sosok Hatta mempunyai arti penting bagi rakyat Indonesia, terutama rakyat di daerah-daerah (luar Jawa), yang merasa terwakili kepentingan mereka apabila Hatta berada dalam pemerintahan.

---

<sup>163</sup> *Ibid*, hlm 279.

## B. Soekarno Menjadi Pemimpin Tunggal

Setelah Hatta mundur, dengan segera, pada tanggal 21 Februari 1957 Soekarno mengemukakan gagasannya tentang struktur pemerintahan yang memungkinkan Indonesia akan lebih mampu menangani kesulitan-kesulitannya. Gagasan Soekarno tersebut terkenal dengan “Konsepsi Soekarno” atau “Konsepsi Presiden”.<sup>164</sup>

Konsepsi Presiden itu dikemukakan di hadapan sejumlah tokoh di ibukota, termasuk para menteri, pemimpin partai dan organisasi massa, para Kepala Staf Angkatan Perang serta perwira-perwira lain, Kepala Polisi, dan para pejabat tinggi berbagai kementerian. Dalam konsepsinya tersebut, Soekarno menyatakan bahwa pemerintahan akan didasarkan pada “*kabinet gotong-royong*” yang terdiri atas partai-partai besar, termasuk PKI.<sup>165</sup> Dalam rangka ini, Soekarno sangat menghendaki agar PKI juga turut serta dalam pemerintahan (dalam formatur kabinet). Soekarno tampaknya, dalam memasukkan PKI ke dalam formatur kabinet lebih dikarenakan jumlah pendukung atau massa dari partai ini yang cukup besar, dan pada kenyataannya PKI termasuk dalam empat besar dalam jajaran partai-partai terbesar dari hasil pemilu 1955.

Soekarno juga membentuk sebuah “*Dewan Nasional*” yang anggotanya terdiri atas wakil-wakil aliran dan golongan-golongan fungsional seperti para cendekiawan, pemuda, kaum buruh, kaum tani, kelompok agama, pengusaha, Angkatan 45 dan daerah. Termasuk di dalamnya ketiga Kepala

---

<sup>164</sup> Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 488.

<sup>165</sup> *Idem*

Staf Angkatan Perang, Kepala Kepolisian, Jaksa Agung dan beberapa orang menteri.<sup>166</sup> Bukannya partai-partai politik semata. Dimana Dewan Nasional ini akan dipimpin Soekarno sendiri. Akan tetapi, dalam gagasannya tersebut, Soekarno tidak mengusulkan penghapusan parlemen. Namun, Dewan Nasional ini tampaknya akan lebih diutamakan (menjadi unsur terpenting) daripada parlemen yang dipilih oleh rakyat.<sup>167</sup>

Menurut Soekarno, Dewan Nasional tersebut akan bertugas memberi nasihat kepada pemerintah, baik diminta ataupun tidak diminta oleh pemerintah. Oleh sebab itu, Dewan akan merupakan “cerminan masyarakat”, sedangkan kabinet merupakan “cermin dari parlemen”.<sup>168</sup>

Konsepsi Soekarno tersebut memperoleh dukungan paling basar terutama dari PKI. Partai yang kemudian akan menjadi basis kekuatan Soekarno dalam pemerintahan sebagai pengimbang kekuatan ataupun dalam rangka untuk menghadapi lawan-lawan politiknya termasuk tentara.

Soekarno tampaknya tidak berusaha mencari pengganti Hatta sebagai Wakil Presiden. tampaknya tidak ada tempat lagi bagi dwitunggal dalam konsepsi Soekarno tentang “Demokrasi Terpimpin”, meskipun dalam menjalankan pemerintahannya, dirinya sangat percaya kepada para penasihat dan pejabat di sekelilingnya. Namun, tampaknya tidak bagi Hatta.

Dengan dijalankannya konsepsi Soekarno tersebut, maka Indonesia telah menjalankan suatu sistem pemerintahan yang dipimpin, dengan apa yang disebut Demokrasi Terpimpin di bawah satu pucuk pimpinan yang

---

<sup>166</sup> *Ibid*, hlm. 489.

<sup>167</sup> Mavis Rose, *op.cit.*, hlm. 321.

<sup>168</sup> Deliar Noer, *op.cit.*, hlm. 489.

secara mutlak sebagai pemegang kekuasaan dan kedaulatan. Dengan demikian, Soekarno sebagai pemimpin bangsa dan pemerintahan menjadi pemimpin tunggal pemerintahan, yang akan secara langsung memimpin bangsa Indonesia. Hal ini merupakan suatu konsekuensi logis yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Pemerintahan dijalankan menurut pemimpin atau penguasa yang sedang berkuasa.

Dari uraian di atas memberikan fakta bahwa pengunduran diri Hatta dari pemerintahan telah memberikan pengaruh yang tidak kecil bagi pemerintah. Munculnya pemberontakan-pemberontakan di daerah dan peneguhan Soekarno menjadi pemimpin tunggal bagi bangsa Indonesia menunjukkan suatu konsekuensi dari keputusan Hatta tersebut, dan suatu kenyataan yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Meskipun pemberontakan-pemberontakan di daerah merupakan kelanjutan dari persoalan-persoalan yang telah ada sebelumnya, namun pada kenyataannya bahwa loyalitas dan dukungan rakyat daerah terhadap Hatta itu ada, dan memberikan motivasi tersendiri bagi mereka dalam rangka melancarkan sikap mereka terhadap pemerintah. Dan pada kenyataannya, rakyat Indonesia juga kemudian dihadapkan kepada suatu sistem pemerintahan yang baru, sistem pemerintahan terpimpin, yang mungkin akan mampu memberikan suatu perubahan yang lebih baik bagi bangsa dan rakyat Indonesia, atau tidak sama sekali. Ataukah justru akan memperburuk seluruh bidang kehidupan.

## BAB V

### PENUTUP

Hatta memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Pengaruh Hatta mewarnai berbagai peristiwa penting yang turut menentukan sejarah Indonesia modern. Obsesi Hatta tentang masa depan Indonesia yang lebih baik, membuatnya gelisah dan tidak pernah memejamkan mata. Terus menatap masa depan bangsa Indonesia jauh ke depan. Hal ini dibuktikan dengan konsistensi Hatta dalam memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, meski Indonesia telah merdeka. Hatta juga konsekuen dengan segala sikap dan tindakannya, sehingga karena hal ini pula membuat Hatta mundur dari pemerintahan, dari segala jabatan dalam pemerintahan. Dasar pemikiran Hatta yang kuat, menjadi penentu sikap serta tindakannya.

Pengunduran diri Hatta ini disebabkan terutama oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah, 1) kekecewaan Hatta terhadap pemerintahan yang dianggapnya tidak lagi sejalan dengan perjuangan dan cita-cita bangsa. Hatta melihat bahwa para pelaku politik seperti para pemangku jabatan dalam pemerintahan maupun partai-partai politik, tidak menunjukkan suatu konsistensi sikap dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat. 2) Kedudukan Hatta sebagai Wakil Presiden yang Konstitusional membuat dirinya tidak mampu melakukan apa-apa atas segala bentuk persoalan yang dihadapi bangsa ini, terutama dalam melihat tindakan-tindakan para pelaku politik dan pemerintah. 3)



Hal lain yang turut membawa Hatta pada keputusan untuk mundur adalah ketidaksepahaman lagi dengan Soekarno. Perbedaan paham dan pandangan antara keduanya yang semakin memuncak, membuat Hatta mengambil keputusan untuk mundur dari kursi pemerintahan dan dari segala jabatan. Hatta mempunyai cara pandang serta gagasan yang berbeda dengan Soekarno, terutama mengenai bentuk pemerintahan yang tepat untuk Indonesia serta sistem demokrasi yang sesuai untuk bangsa Indonesia.

Pengunduran diri Hatta melalui proses yang tidak mudah. Ia perlu waktu serta alasan yang tepat. Alasan resmi yang dipergunakan Hatta untuk mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden adalah terbentuknya DPR dan Konstituante hasil pemilihan umum. Bersama dengan hasil pemilihan umum pada bulan Juli 1956, Hatta mengirim surat kepada DPR (hasil pemilihan umum) bahwa ia akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden setelah DPR baru tersusun. Ia menganggap bahwa dengan pemilihan umum, pimpinan negara hendaknya diperbaharui pula. Tampaknya hal ini pula yang menjadi alasan Hatta untuk mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden, serta menjadi pilihan waktu yang tepat menurut Hatta untuk mengajukan pengunduran dirinya. Akhirnya, pada tanggal 5 Februari 1957, Hatta secara resmi berhenti dari jabatan Wakil Presiden. Dengan keputusan no. 13/1957, Presiden Soekarno, melalui tata cara kenegaraan, terhitung mulai 1 Desember 1956 memberhentikan Hatta sebagai Wakil Presiden. Dengan banyak kekecewaan pada simpatisannya, Hatta mengatakan bahwa dirinya akan tetap berusaha memberikan sumbangan bagi kepentingan rakyat dan negara sebagai warga negara biasa.

Pengunduran diri Hatta sebagai Wakil Presiden ternyata membawa pengaruh yang tidak kecil bagi pemerintah Indonesia. Mundurnya Hatta ini ternyata membuat stabilitas nasional sedikit terganggu, karena mengakibatkan semakin meningkatnya pertentangan daerah terhadap pusat yang berpotensi terjadinya pemberontakan, terutama daerah Sumatera dan Sulawesi. Dalam seruan mereka, ada unsur kesetiaan rakyat di daerah, terutama Sumatera, kepada Hatta. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan Hatta di dalam pemerintahan dianggap penting bagi rakyat daerah, karena Hatta merupakan sosok pemimpin dari luar Jawa yang dianggap mampu menjadi penyambung lidah rakyat di daerah terhadap pemerintah pusat. Hal ini yang tampaknya menjadi kekecewaan rakyat di daerah akan keputusan Hatta tersebut. Dengan mundurnya Hatta itu berarti Soekarno menjadi pemimpin tunggal bangsa Indonesia, yang akan menjalankan konsepsi Demokrasi Terpimpin-nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Deliar Noer, 1990, *Mohammad Hatta: Biografi Politik*, Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Mohammad Hatta : Hati Nurani Bangsa 1902 – 1980*, Jakarta: Djambatan Perwakilan KITLV.
- Dudung Abdurahman, 2007, *Metodologi Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: AR-RUZZ Media.
- Hatta, 1978, *Mohammad Hatta Memoir*, Jakarta: PT. Tintamas Indonesia.
- Hatta dan I Gde Anak Agung, 1987, *Surat-Menyurat Hatta dan Anak Agung*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kuntowijoyo, 2001, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Gottschalk, Louis, 1986, *Mengerti Sejarah*, Terj., Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Martin Handoko, 1992, *Motivasi Daya Penggerak Tingkah Laku*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Mavis Rose, 1991, *Indonesia Merdeka: Biografi Politik Mohammad Hatta*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Meutia Farida Swasono, 1980, *Bung Hatta Pribadinya Dalam Kenangan*, Jakarta: Sinar Harapan dan Penerbit Universitas Indonesia.
- Moedjanto, 1992, *Indonesia Abad Ke-20 (jilid 2)*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

\_\_\_\_\_, 2003, *Dari Pembentukan Pax Neerlandica Sampai Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Universitas Sanata Dharma.

Mohammad Tolchah Mansoer, 1969, *Pembahasan Beberapa Aspek Tentang Kekuasaan – Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Negara Indonesia*, Yogyakarta: Radya Indria.

Peter Salim, Yenny Salim, 1991, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press.

Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.

Pringgodigdo, 1955, *Tiga Undang-Undang Dasar*, Jakarta: Penerbit PT. Pembangunan.

Ricklefs, 2005, *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004*, Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta.

Rikard Bagun, (Ed.), 2003, *Bung Hatta*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas.

Rukman Amanwinata, dkk., 1985, *Kamus Istilah Tata Negara*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Sartono Kartodirdjo, 1992, *Pendekatan Ilmu Sosial dan Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia.

Simorangkir dan Mang Reng Say, 1959, *Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Kantjah Penetapan Undang-Undang Dasar Tetap Indonesia*, Jakarta: Penerbit Djambatan.

Sri Edi Swasono dan Fauzie Ridjal, (Ed.), 1992, *Mohammad Hatta: Beberapa Pokok Pikiran*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sumanang, dkk., 1972, *Bung Hatta Mengabdikan Pada Tjita-Tjita Perdjolongan Bangsa*, Jakarta: Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta Ke-70.

Suwarno, 1994, (*Hand Out*) *Pengantar Ilmu Sejarah*, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Tashadi, dkk., 1993, *Tokoh-Tokoh Pemikir Paham Kebangsaan*, Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional.


Wawancara Mohammad Hatta dengan Dr. Z. Yasni, 1978, *Bung Hatta Menjawab*, Jakarta: Gunung Agung.

Wawan Tunggal Alam, 2003, *Demi Bangsaku Pertentangan Bung Karno vs Bung Hatta*, Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama.

\_\_\_\_\_, 1980, *Dwi Tunggal Soekarno Hatta*, Jakarta: Yayasan Idayu.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

# Lampiran



*Lampiran 1*



Gambar Foto Mohammad Hatta

*(Proklamator RI, Wakil Presiden RI Pertama, dan Bapak Koperasi Indonesia)*

*Lampiran 2*

**BIODATA MOHAMMAD HATTA**

Nama : Mohammad Hatta  
Tempat/Tgl. Lahir : Kampung Aur Tanjungkang Bukittinggi, 12 Agustus 1902  
Agama : Islam  
Tempat/Tgl. Wafat : Jakarta, 14 Maret 1980

**PENDIDIKAN**

- Europese Lagere School (ELS) di Bukittinggi (lulus 1916)
- Meer Vitgebreid Lager Onderwijs (MULO) di Padang (lulus 1919)
- Handel Middlebare School (Sekolah Menengah Dagang) di Jakarta (lulus 1921)
- Nederland Handelshogeschool di Rotterdam (tamat dengan gelar Drs, 1932)

**PERJALANAN KARIER**

- Bendahara *Jong Sumatranen Bond* di Padang (1916-1919)
- Bendahara *Jong Sumatranen Bond* di Jakarta dan mengurus majalah *Jong Sumatra* (1920-1921)
- Menjadi anggota *Indinesische Vereniging* (ketika belajar di Belanda) yang kemudian berubah menjadi *Perhimpoean Indonesia*, dan menjadi Dewan Redaksi majalah *Indonesia Merdeka* (1922-1925)
- Ketua Pemuda Indonesia di Belanda (1925-1930)
- SEBAGAI WAKIL Indonesia dalam gerakan *Liga Melawan Imperialisme dan Penjajahan*, berkedudukan di Berlin (1927-1931)
- Ikut *Kongres Democratique International IV* di Beirvile, Paris (1936)
- Ditangkap dan dipenjara di Den Haag, Belanda (23 September 1927-22 Maret 1928) karena tulisan-tulisannya di Majalah *Indonesia Merdeka*
- Kembali ke Indonesia (1932)
- Ketua Partai *Pendidikan Nasional Indonesia* (lazim disebut PNI Baru) dan menangani majalah *Daulat Rakyat* (1934-1935)



- Dipenjarakan pemerintah Hindia Belanda di Glodok, Jakarta (1934)
- Dibuang ke Boven Digul, Papua (1934-1935)
- Dibuang ke Banda Neira (1935-1942)
- Dipindahkan ke penjara di Sukabumi (Februari 1942)
- Dibebaskan dari penjara (9 Maret 1942)
- Kepala Kantor Penasihat pada pemerintah Bala Tentara Dai Nippon (April 1942)
- Diangkat menjadi salah satu pimpinan *Pusat Tenaga Rakyat* (Putera-1943)
- Anggota Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai (Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan – Mei 1945)
- Wakil Ketua *Panitia Persiapan kemerdekaan Indonesia* (PPKI – 7 Agustus 1945)
- Memproklamasikan Kemerdekaan RI bersama Soekarno (17 Agustus 1945)
- Wakil Presiden Indonesia I (18 Agustus-1 Desember 1956)
- Mengeluarkan Maklumat Nomor X (16 Oktober 1945) yang memberikan kekuasaan untuk menentukan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) kepada Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
- Mengeluarkan *Maklumat Politik* (1 November 1945) yang antara lain menyatakan bahwa Indonesia bersedia menyelesaikan sengketa dengan Belanda dengan cara diplomasi
- Mengeluarkan Maklumat (3 November 1945) yang membuka peluang berdirinya partai-partai politik
- Wakil Presiden merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan (29 Januari 1948-Desember 1949)
- Ketua Delegasi Indonesia ke Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag dan menerima penyerahan kedaulatan dari Ratu Juliana (1949)
- Wakil Presiden merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menlu dalam Kabinet RIS (Desember 1949-Agustus 1950)

### **PENGHARGAAN**

- Gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada (1956)

- Gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Hasanuddin (1973)
- Gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Indonesia (1975)
- Menerima tanda jasa Bintang Republik dari Presiden Soeharto (15 Agustus 1975)

## **KEGIATAN LAIN**

- Menjadi dosen di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat di Bandung (1951-1961)
- Menjadi dosen di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta (1954-1959)
- Dosen Luar Biasa pada Universitas Hasanuddin (1966-1971)
- Penasihat Presiden dan Penasihat Komisi tentang masalah korupsi (1969)
- Dosen Luar Biasa Universitas Padjajaran Bandung (1967-1971)
- Ketua Panitia Lima yang bertugas memberikan perumusan penafsiran mengenai Pancasila (1975)

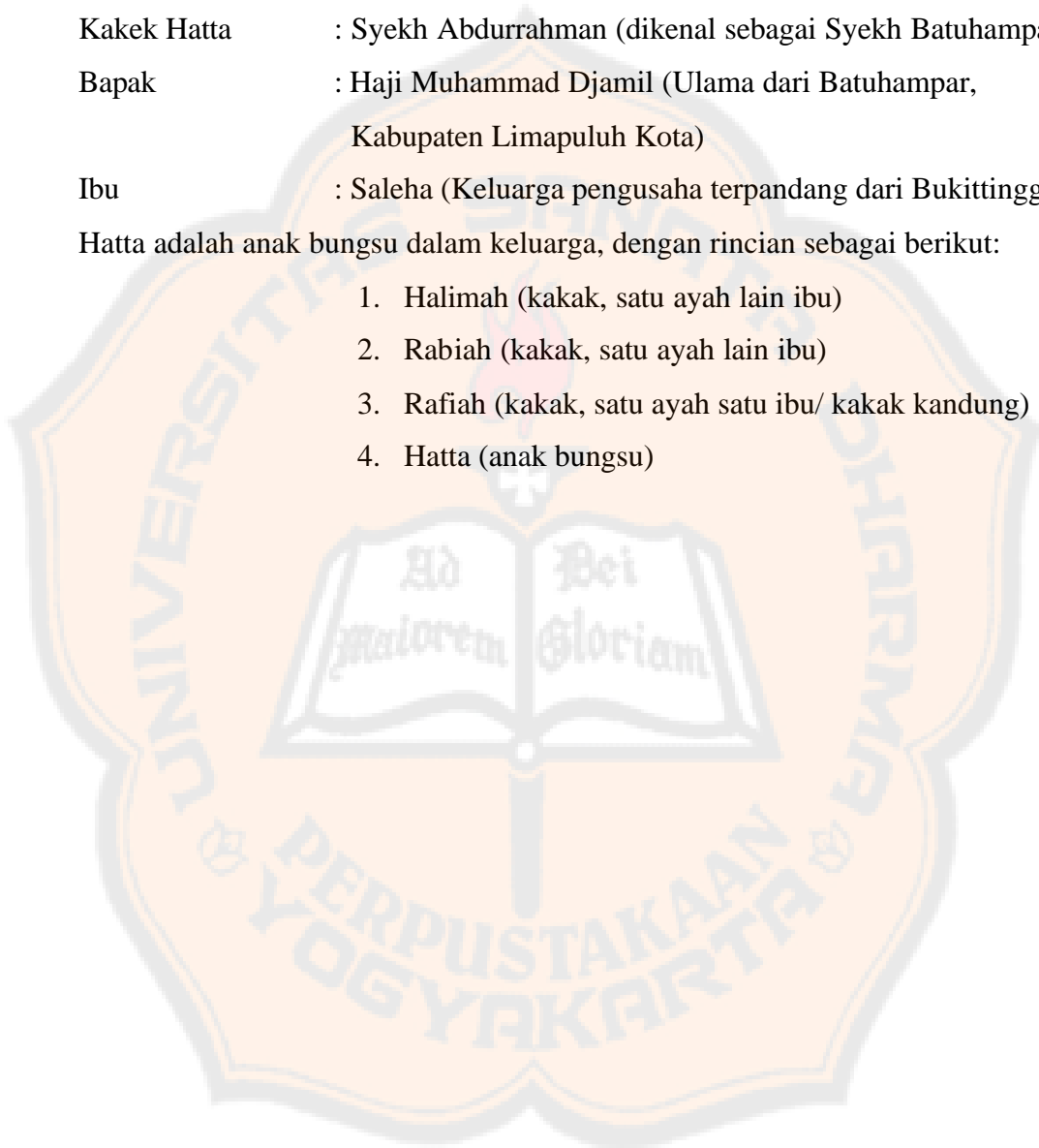
## **KARYA TULIS MONUMENTAL**

- Economische wereldbouw en machtstegenstellingen (1926)
- L'Indonesie et son problema de l'Independence (1927)
- Indonesia Vrij (1928)
- Tujuan dan Politik Pergerakan Nasional Indonesia (1931)
- Krisis Ekonomi dan Kapitalisme (1934)
- Rasionalisasi (1939)
- Penunjuk bagi Rakyat dalam Ekonomi, Teori, dan Praktek (1940)
- Alam Pikiran Yunani (1941)
- Portrait of a patriot, Selected Writings (1972)
- Pikiran-pikiran dalam bidang Ekonomi untuk mencapai Kemakmuran yang Merata (1974)
- Mohammad Hatta Memoir (1979)

## **KELUARGA**

- Istri : Rahmi Hatta

- Anak : 1. Meutia Farida Hatta (21 Maret 1947)  
2. Gemala Rabi'ah Hatta (1953)  
3. Halidah Nuriah Hatta (25 Januari 1956)
- Orangtua Hatta :  
Kakek Hatta : Syekh Abdurrahman (dikenal sebagai Syekh Batuhampar)  
Bapak : Haji Muhammad Djamil (Ulama dari Batuhampar,  
Kabupaten Limapuluh Kota)  
Ibu : Saleha (Keluarga pengusaha terpandang dari Bukittinggi)  
Hatta adalah anak bungsu dalam keluarga, dengan rincian sebagai berikut:
  1. Halimah (kakak, satu ayah lain ibu)
  2. Rabiah (kakak, satu ayah lain ibu)
  3. Rafiah (kakak, satu ayah satu ibu/ kakak kandung)
  4. Hatta (anak bungsu)



*Lampiran 3*



**SILABUS  
&  
RENCANA PELAKSANAAN  
PEMBELAJARAN**

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## SILABUS (KTSP)

Nama Sekolah : SMA St. Thomas

Program : Ilmu Pengetahuan Sosial

Mata Pelajaran : Sejarah

Kelas/ Semester : XII / 1

Standar Kompetensi : 1. Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga lahirnya Orde Baru.

KOMPETENSI DASAR	MATERI POKOK/ PEMBELAJARAN	KEGIATAN PEMBELAJARAN	INDIKATOR	PENILAIAN	ALOKASI WAKTU	SUMBER dan MEDIA
1.4. Menganalisis perkembangan politik dan ekonomi serta perubahan masyarakat di Indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan.	<p>Perkembangan politik dan ekonomi serta perubahan masyarakat di Indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan.</p> <p><u>Uraian Materi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perkembangan politik dan perubahan masyarakat di Indonesia dalam upaya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menganalisis perkembangan politik dan perubahan masyarakat di Indonesia dalam upaya mengisi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Siswa mampu menganalisis hubungan perkembangan politik dengan perubahan</li> </ul>	<p>Jenis Tagihan dan Instrumen/alat:</p> <p><b>Produk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tertulis                             <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bentuk: pilihan ganda dan essay</li> <li>b. alat: tes</li> </ul> </li> <li>▪ Portofolio (<i>portfolio</i>)</li> </ul>	<p><b>12 x 45 Menit:</b></p> <p>3 x 45 Menit</p>	<p><b>Sumber Belajar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Buku Sejarah Nasional dan Umum untuk SMA kelas 3, Penerbit: Bumi Aksara.</li> <li>▪ Deliar Noer, 1990, <i>Mohammad</i></li> </ul>

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	<p>mengisi kemerdekaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perkembangan politik dan perubahan masyarakat di Indonesia pada masa Demokrasi Parlemitter pada saat Mundurnya Mohammad Hatta dari jabatan wakil presiden dalam pemerintahan</li> </ul>	<p>kemerdekaan melalui studi pustaka, eksplorasi internet, diskusi kelompok, dan diskusi kelas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menganalisis perkembangan politik dan perubahan masyarakat di Indonesia pada masa Demokrasi Parlemitter terutama Mundurnya Mohammad Hatta dari jabatan Wakil Presiden dalam pemerintahan melalui studi pustaka, diskusi kelompok, presentasi, dan diskusi kelas.</li> </ul>	<p>masyarakat di Indonesia pada awal kemerdekaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Siswa mampu menganalisis faktor pendorong pengunduran diri Hatta dari jabatan Wakil Presiden serta pengaruhnya terhadap pemerintah.</li> <li>▪ Siswa mampu menganalisis hubungan perkembangan politik dan perubahan masyarakat di Indonesia pada masa Demokrasi Parlemitter dengan Mundurnya Mohammad Hatta dari jabatan Wakil</li> </ul>	<p>a. bentuk: makalah b. alat: skala nilai</p> <p><b>Proses:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Unjuk kerja (<i>performance</i>) <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bentuk: presentasi</li> <li>b. alat: skala nilai</li> </ul> </li> <li>▪ Sikap <ul style="list-style-type: none"> <li>a. bentuk: observasi guru</li> <li>b. alat: skala sikap</li> </ul> </li> </ul>	<p style="text-align: center;">1 x 45 Menit</p>	<p><i>Hatta: Buografi Politik, Jakarta, Penerbit: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ricklefs, 2005, <i>Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004</i>, Jakarta, Penerbit: PT. Serambi Ilmu Semesta.</li> <li>▪ Moedjanto,</li> </ul>
--	--	--	--	--	---	---

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

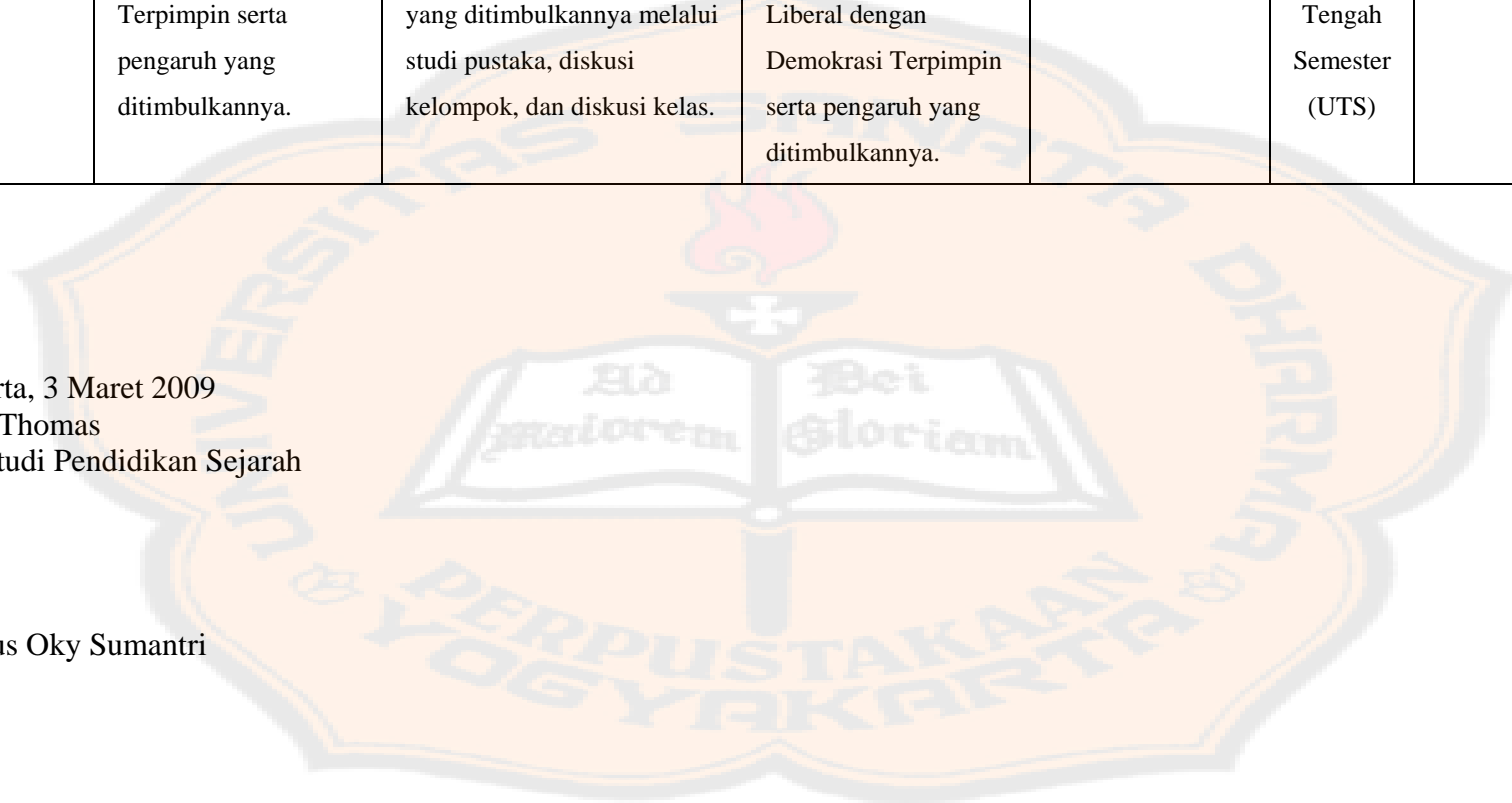
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan penyusunan undang-undang dasar baru.</li> <li>▪ Hubungan kebijakan ekonomi pemerintah dengan kondisi ekonomi nasional dan daerah sampai tahun 1965.</li> <li>▪ Membandingkan sistem dan struktur politik pada masa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menganalisis faktor-faktor penyebab kegagalan penyusunan undang-undang dasar baru melalui studi pustaka, diskusi kelompok, dan diskusi kelas.</li> <li>▪ Menganalisis hubungan kebijakan ekonomi pemerintah dengan kondisi ekonomi nasional dan daerah sampai tahun 1965 melalui studi pustaka, eksplorasi internet, diskusi kelompok, diskusi kelas, dan presentasi.</li> <li>▪ Membandingkan secara analisis sistem dan struktur politik pada masa Demokrasi</li> </ul>	<p style="text-align: center;">Presiden</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Siswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kegagalan penyusunan undang-undang dasar baru.</li> <li>▪ Siswa mampu menganalisis hubungan antara kebijakan ekonomi pemerintah dengan kondisi ekonomi nasional dan daerah pada masa demokrasi terpimpin.</li> <li>▪ Siswa mampu membandingkan secara analisis sistem</li> </ul>		<p style="text-align: center;">1 x 45 Menit</p> <p style="text-align: center;">2 x 45 Menit</p> <p style="text-align: center;">3 x 45 Menit</p>	<p>1992, <i>Indonesia Abad Ke-20 (jilid 1 dan 2)</i>, Yogyakarta, Penerbit: Kanisius.</p> <p><b><u>Alat/media:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ komputer dan viewer (program powerpoint).</li> <li>▪ papan tulis (black/white board).</li> <li>▪ Gambar tokoh.</li> </ul>
--	--	--	---	--	---	---

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	Demokrasi Liberal dengan Demokrasi Terpimpin serta pengaruh yang ditimbulkannya.	Liberal dengan Demokrasi Terpimpin serta pengaruh yang ditimbulkannya melalui studi pustaka, diskusi kelompok, dan diskusi kelas.	dan struktur politik pada masa Demokrasi Liberal dengan Demokrasi Terpimpin serta pengaruh yang ditimbulkannya.		(2 x 45) Ulangan Tengah Semester (UTS)	
--	--	---	---	--	--	--

Yogyakarta, 3 Maret 2009  
SMA St. Thomas  
Bidang Studi Pendidikan Sejarah

Ambrosius Oky Sumantri





# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## **RPP** **(RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN)**

1. Nama Sekolah : SMA St. Thomas
2. Program : Ilmu Pengetahuan Sosial
3. Mata Pelajaran : Sejarah
4. Kelas/ Semester : XII / 1
5. Alokasi Waktu : 1 x 45 menit (satu pertemuan)
6. Standar Kompetensi : 1. Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia sejak proklamasi hingga lahirnya Orde Baru.
7. Kompetensi dasar : 1.4. Menganalisis perkembangan politik dan ekonomi serta perubahan masyarakat di Indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan.
8. Indikator :
  - 1) Siswa mampu menganalisis hubungan perkembangan politik dan perubahan masyarakat di Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer dengan Mundurnya Mohammad Hatta dari jabatan Wakil Presiden.
  - 2) Siswa mampu menganalisis faktor pendorong pengunduran diri Hatta dari jabatan Wakil Presiden serta pengaruhnya terhadap pemerintah.
  - 3) Siswa mampu mengungkapkan makna peristiwa mundurnya Hatta bagi bangsa Indonesia terutama bagi perkembangan serta perubahan masyarakat di Indonesia dalam upaya mengisi kemerdekaan (reflektif).
  - 4) Siswa mampu memahami sikap saling menghargai perbedaan pendapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan bangsa ini (reflektif).

### **A. TUJUAN PEMBELAJARAN**

1. Siswa dapat menjelaskan faktor pendorong mundurnya Hatta sebagai Wakil Presiden tahun 1956 dan situasi politik masa Demokrasi Parlementer di sekitar mundurnya Hatta.
2. Siswa dapat menjelaskan pengaruh pengunduran diri Hatta bagi pemerintah Indonesia.
3. Siswa dapat menjelaskan makna pengunduran diri Hatta bagi perkembangan bangsa Indonesia.
4. Siswa dapat memberi contoh sikap saling menghargai perbedaan pendapat.



## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

<p>mundurnya Hatta dari jabatan Wakil Presiden karena kecewa terhadap jalannya pemerintahan</p> <p><b>Kartu keempat:</b> kartu-kartu yang berisi potongan-potongan informasi-informasi tentang proses pengunduran diri Hatta</p> <p><b>Kartu kelima:</b> kartu-kartu yang berisi potongan-potongan informasi-informasi tentang pengaruh pengunduran diri Hatta</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2) Siswa yang telah mendapatkan kartu informasi harus mencari pasangan yang mempunyai lanjutan informasi yang berkaitan dengan materi yang ada pada kartu mereka.</li><li>3) Setelah menemukan pasangannya (pemegang kartu lanjutan informasi), kemudian berkumpul membentuk kelompok untuk mendiskusikannya.</li><li>4) Setiap kelompok melaporkan hasil kerjanya, dilanjutkan dengan tanya jawab.</li><li>5) Guru mengklarifikasi atas hasil diskusi, serta memberikan penguatan/penegasan poin-poin penting dari pembahasan.</li><li>6) Refleksi guru-siswa dari hasil pembahasan materi.</li></ol> <p><b>3. PENUTUP:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Guru meninjau kembali/memberi kesimpulan terhadap keseluruhan materi yang baru saja dipelajari.</li><li>2) Guru meminta siswa untuk mempelajari materi berikutnya</li></ol>	<p><b>5 menit</b></p>
--	-----------------------

### E. SUMBER dan MEDIA BELAJAR

#### Sumber Belajar:

- Deliar Noer, 1990, *Mohammad Hatta: Buografi Politik*, Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Ricklefs, 2005, *Sejarah Indonesia Modern 1200 – 2004*, Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Moedjanto, 1992, *Indonesia Abad Ke-20 (jilid 1 dan 2)*, Yogyakarta: Kanisius.
- Deliar Noer, 1990, *Mohammad Hatta: Buografi Politik*, Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.

#### Media Belajar:

komputer dan viewer (program powerpoint), papan tulis (black/white board), Gambar tokoh dan Peta Indonesia.

# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## F. PENILAIAN

### Produk:

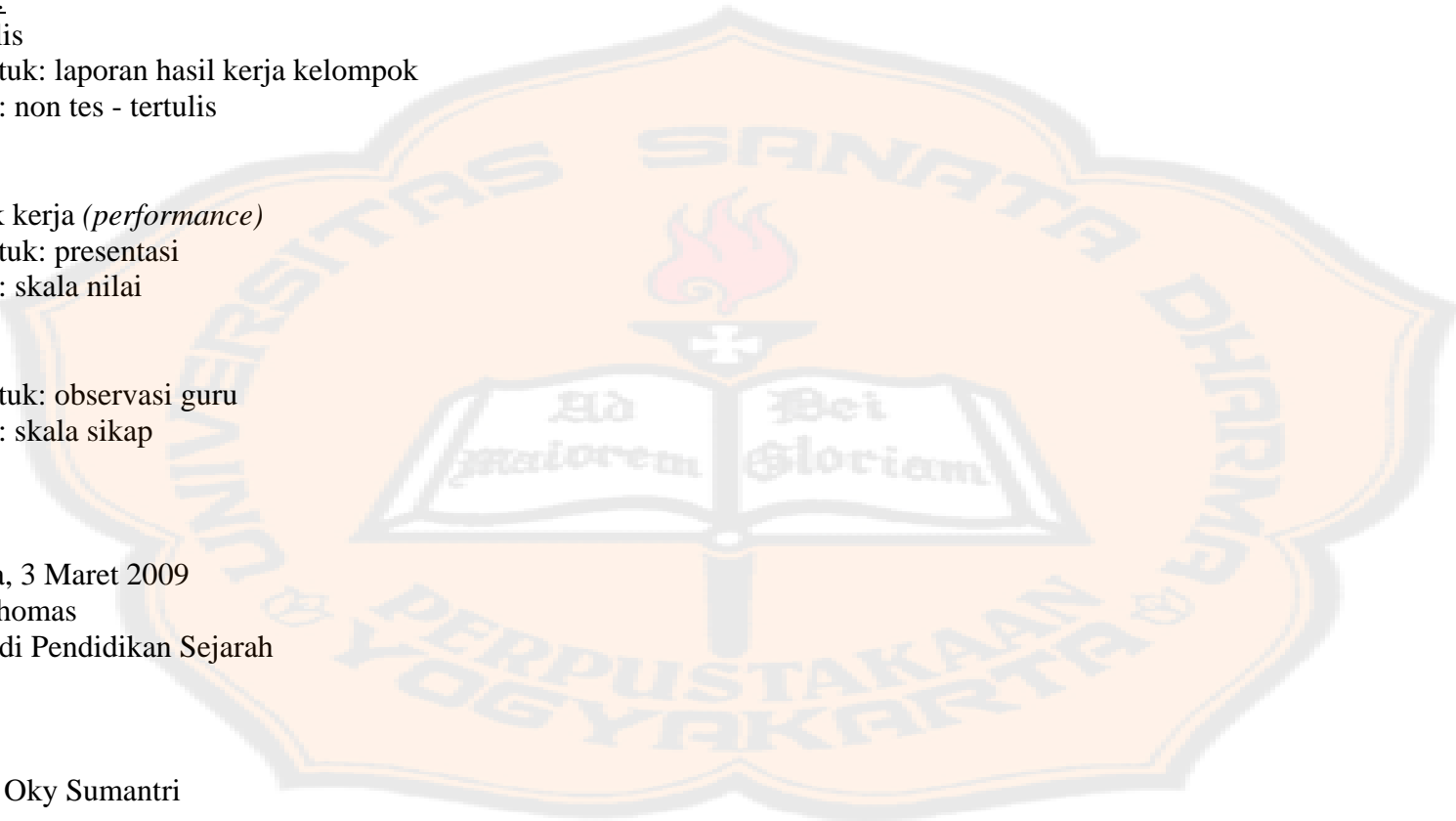
- Tertulis
  - a. bentuk: laporan hasil kerja kelompok
  - b. alat: non tes - tertulis

### Proses:

- Unjuk kerja (*performance*)
  - a. bentuk: presentasi
  - b. alat: skala nilai
- Sikap
  - a. bentuk: observasi guru
  - b. alat: skala sikap

Yogyakarta, 3 Maret 2009  
SMA St. Thomas  
Bidang Studi Pendidikan Sejarah

Ambrosius Oky Sumantri



# PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

## 1. Instrumen/alat Penilaian Portofolio (makalah):

No.	Nama/Kelompok	Kriteria Penilaian			
		Tata Bahasa	Isi Pembahasan	Analisa	Sitematika Penulisan
1.	Kelompok 1: a. b. c. dsb.				
2.	Kelompok 2: a. b. c. dsb.				
3.	Kelompok 3: a. b. c. dsb.				

## 2. Instrumen/alat Penilaian Unjuk Kerja/Performance (Presentasi):

1. Biodata Siswa  
Nama :  
NIP :  
Jenis Kelamin :  
No. Absen :

No.	Komponen Penilaian	Skor/Nilai	Komentar
1.	<b>Penguasaan Materi</b>		
	a. Penataan materi sistematis	1 2 3 4	
	b. Penyampaian materi sistematis	1 2 3 4	
2.	<b>Ekspresi roman muka</b>		
	a. Ekspresif dan tidak berlebihan	1 2 3 4	
	b. Mata tertuju padaseluruh audiens	1 2 3 4	
3.	<b>Kemampuan Berbahasa/berbicara</b>		
	a. Artikulasi dan intonasi	1 2 3 4	
	b. Penggunaan bahasa baik/baku	1 2 3 4	

### Keterangan (Skor/Nilai):

- 1 : Kurang baik      3 : Baik  
2 : Cukup baik      4 : Sangat Baik

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

### 3. Instrumen/alat Penilaian Sikap:

No.	Nama Siswa	Sikap/Perilaku Yang Dinilai			Skor/ Nilai	Komentar
		Aktif dalam PBM	Perhatian	Kehadiran		
1.						
2.						
3.						
dsb.						

### 4. Instrumen/alat Penilaian Tertulis (Essay):

1. Apa saja faktor penyebab Mohammad Hatta mundur dari jabatan Wakil Presiden tahun 1956? Sebutkan dan jelaskan secara singkat! **(skor: 15)**
2. Mengapa Mohammad Hatta tidak setuju apabila Partai Komunis Indonesia (PKI) turut serta dimasukkan ke dalam format kabinet? Berikan argumentasi anda beserta bukti! **(skor: 20)**
3. Apa pengaruh pengunduran diri Hatta terhadap Pemerintah Indonesia dan bagi perubahan masyarakat Indonesia (masa transisi) yang sedang berjalan? Jelaskan! **(skor: 25)**
4. Kekecewaan Hatta terutama adalah terhadap Pemerintah dan terhadap Presiden Soekarno.  
Pertanyaannya: Mengapa Hatta tidak melakukan perlawanan (kudeta) terhadap pemerintahan Soekarno pada saat itu? Jelaskan dan beri argumentasi anda! **(skor: 25)**
5. Apakah ada reaksi rakyat terhadap pengunduran diri Hatta? Jika ada, dimana dan Jelaskan! **(skor: 15)**